

# **EKONOMI BERKEADILAN**

Perekonomian dan Kemandirian

Rumusan Hasil  
Kongres Kebudayaan Desa  
1 Juni-15 Agustus 2020



# **EKONOMI BERKEADILAN**

Perekonomian dan Kemandirian

**Webinar Seri 2**

**Kongres Kebudayaan Desa 2020**

**1-10 Juli 2020**



## **EKONOMI BERKEADILAN**

Perekonomian dan Kemandirian

©Sanggar Inovasi Desa 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Diterbitkan oleh Sanggar Inovasi Desa 2020

Kampoeng Mataraman, Jl. Ringroad Selatan, Glugo No. 93,

Panggunharjo, Yogyakarta

Web: [www.sanggarinovasidesa.id](http://www.sanggarinovasidesa.id)

Penanggung jawab	: Faiz Ahsoul
Penyunting	: Dwi Cipta
Penyelia aksara	: Chusna Rizqati
Desain & ilustrasi sampul	: Ketjilbergerak, Arif Gunawan, dan Agus Teriyana
Tata letak isi	: Prima Hidayah

Cetakan pertama, Agustus 2020

Ukuran Buku:

13 x 19 cm, xxxvi + 162 hlm.

ISBN:

Dilarang memperbanyak atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial. Setiap tindak pembajakan akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pengutipan untuk kepentingan akademis, jurnalistik, dan advokasi diperkenankan dalam batas ketentuan yang berlaku.



## Pengantar Editor

*Dwi Cipta*

**B**adan Pusat Statistik (BPS) baru saja mengumumkan bahwa pertumbuhan GDP pada kuartal II tahun ini minus 5,32 persen. Pertumbuhan ekonomi yang negatif ini merupakan yang pertama kalinya sejak Indonesia terjerembap ke dalam krisis moneter 1997-1998. Sebelumnya, pertumbuhan ekonomi triwulan I 2020 mulai menunjukkan adanya perlambatan akibat pandemi Covid-19 dengan hanya mencapai 2,97 persen. Ketidakpastian kapan pandemi Covid-19 akan berakhir dan tren suramnya

perkembangan ekonomi ke depan menjadi indikasi kalau ekonomi negeri ini akan memasuki masa resesi.

Barangkali walaupun bisa diambil sebagai pelajaran berharga, pandemi Covid-19 punya andil besar dalam menyingkap fakta tentang betapa rentannya pertumbuhan ekonomi yang hanya bergantung pada investor atau pemodal besar. Mereka yang dalam situasi normal sering diagung-agungkan sebagai pencipta lapangan kerja justru menjadi kelompok pertama yang gulung tikar dan tidak berdaya menghadapi krisis. Ini membuktikan pernyataan Francis Wahono bahwa pasar bebas sempurna dengan *general equilibrium* di sekitar harga pasar dalam praktiknya tidak pernah ada. Sebagai model teori marginalis yang disederhanakan, hal itu hanya bisa terwujud dengan seribu satu pengandaian. Kenyataannya perusahaan besar menang bersaing, dalam arti surplus di atas *general equilibrium* karena faktor “dukungan kebijaksanaan/oknum negara” lewat undang-undang dan aturan lainnya serta dukungan aturan global lewat WTO dengan banyak belalai *octopus* aturan dagang seperti TRIPs, TRIMs, GATs, dan AOA.

Yang menarik, meski krisis yang dibuka lewat pandemi Covid-19 ini berbeda dengan krisis moneter yang berujung pada krisis ekonomi tahun 1997-1998, tetapi ada kecenderungan yang serupa di antara kedua krisis tersebut, yaitu unggulnya desa dan masyarakat pedesaan dibandingkan dengan kota dan masyarakat perkotaan. Lebih kuatnya resiliensi desa dan masyarakat pedesaan dibandingkan kota dan masyarakat perkotaannya adalah karena



pihak yang pertama belum masuk terlalu jauh dalam lingkaran setan proses sirkulasi kapital yang keuntungannya hanya bisa dinikmati segelintir orang.

Dalam situasi krisis seperti sekarang memang banyak pihak membayangkan dan mengharapkan desa sebagai penyelamat hidup warga. Diakui atau tidak, gelombang migrasi besar-besaran manusia dari Jakarta atau perkotaan lain ke daerah-daerah dan desa yang berlangsung masif dilatari oleh pembayangan dan pengharapan tersebut. Kebiasaan hidup gotong royong, solidaritas, hidup berbagi, dan seperangkat praktik baik hidup di sosial desa disorongan kembali sebagai solusi mujarab menghadapi krisis multidimensi seperti sekarang. Namun, dalam konstruksi liberal, modal sosial tidak ingin bergerak lebih jauh dengan melebarkan cakupan modal sosial dalam aktivitas ekonomi. Bagi mereka, modal sosial akan dipuja saat krisis, berharap masyarakat mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Dengan demikian, modal sosial seperti yang dimiliki oleh masyarakat pedesaan sering kali justru menjadi dalih bagi negara dan pasar untuk mempertanggungjawabkan semua kekacauan yang diakibatkan proses akumulasi kapital yang hanya terkonsentrasi di tangan segelintir orang atau kelompok.

Krisis kapitalisme yang dibuka oleh pandemik Covid-19 ini perlu direfleksikan pada sejumlah gagasan dan inisiasi pelebagaan tata ekonomi baru yang lebih berkeadilan. Dalam konteks desa, refleksi ini berada pada kisaran upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menata ulang bangunan industrialisasi desa yang telah



dikondisikan dengan cara sedemikian rupa oleh tatanan ekonomi neoliberal menjadi bangunan industrialisasi yang didikte oleh pasar. Desa perlu menentukan relasi yang lebih berkeadilan dengan kota, dengan aktor-aktor ekonomi dari luar dirinya yang selama ini begitu dominan menentukan perkembangan hidupnya sendiri, sampai mengembalikan prinsip kelestarian lingkungan yang selama ini disisihkan dalam penentuan kebijakan ekonomi yang melibatkan desa.

Bila mau melakukan sedikit kilas balik, kebutuhan untuk melakukan reorientasi pembangunan ekonomi kita sebenarnya sudah diputuskan sekitar enam tahun lalu. Ketika pertama kali Joko Widodo dilantik menjadi presiden Indonesia ketujuh, salah satu kebijakan pembangunan yang ia putuskan dalam Nawacita, terutama yang tertuang dalam Nawacita ketiga adalah Nawacita ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Bersamaan dengan diputuskannya kebijakan tersebut, dua produk regulasi dikeluarkan sebagai pedomannya, yaitu Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pada akhirnya, kehadiran pandemik Covid-19 dan krisis ekonomi yang mengikutinya menyingkap alasan sejati kenapa membangun dari desa atau wilayah pinggir begitu mendesak dan layak dikedepankan, yaitu karena persentuhan desa dengan modernisasi (pembangunan) yang berwatak kapitalistik masih



belum begitu jauh. Dengan demikian, eksperimen membentuk gugusan baru pembangunan dengan nilai dasar negara tersebut cenderung masih mudah dijalankan. Perubahan mendasar dalam sistem perekonomian dengan pembangunan desa sebagai pusatnya layak dikedepankan alih-alih menjadikan kota sebagai pusat pembangunan.

Bagi desa sendiri, krisis ekonomi ini perlu dibaca kembali untuk mendudukkan sejauh mana sistem ekonomi yang berlaku sebelumnya telah berpihak kepada desa. Berpihak artinya mengedepankan desa sebagai kekuatan ekonomi berdaulat dalam membangun sistem ekonomi yang lebih berkeadilan bersendikan pada nilai-nilai keluhuran hidup masyarakat desa. Basis produksi yang utama adalah kedaulatan manusia/rakyat dan penguasaan sumber daya alam, serta peluang atas kecerdasan teknologi dan jaringan distribusi/pemasaran. Singkat kata, SDA dan modal sosial kultural. Model “solidaritas” yang bertolak dari inisiatif rakyat, dari modal sosial yang syarat musyawarah untuk mencapai mufakat, bisa dijadikan basis untuk pembangunan.

Beberapa puluh tahun yang lalu berdasarkan penelitian lapangan, Tjodronegoro menemukan sistem “sodalist” yang hidup di kalangan rakyat sebagai modal sosial untuk pembangunan dari pinggir, dari desa dan kampung. Sistem sodalist inilah yang di masa lalu mampu menghadirkan lumbung pangan, sistem pengairan subak, sambatan, dan ekonomi subsisten yang tidak mengeksploitasi alam. Untuk itu segala pembangunan yang menyangkut harkat hidup



rakyat banyak, termasuk pembangunan desa di daratan maupun pesisir harus didekati secara sosial budaya, bukan bisnis ekonomi saja.

Kemampuan masyarakat desa untuk membangun ekonomi yang lebih berkeadilan dan tidak mengeksploitasi sumber daya alam atau lingkungan hidupnya hanya bisa muncul karena kecerdikan mereka memperhitungkan seluruh potensi yang ada di dalam dan di luar dirinya. Dari kecerdikan itulah akhirnya muncul inovasi-inovasi di tataran kehidupan sehari-hari. Inovasi memang tak melulu soal investasi dan anggaran *Research and Development* yang besar, aplikasi pintar pada ponsel, hak paten atau bahkan tentang ekspor produk berteknologi tinggi (*high-tech*) saja, tetapi juga bergerak pada ide, kecerdikan, dan terkadang 'hanya' melalui improvisasi dengan tujuan mengatasi persoalan atau tantangan aktual yang ada di depan mata.

Faktor pendorong inovasi di tataran masyarakat akar rumput adalah motivasi/keinginan yang tinggi untuk mencari masalah komunitas, kuatnya jaringan komunitas yang ada, adanya cerita/pembelajaran inspiratif yang sebanding dari pihak eksternal. Sejauh faktor-faktor pendorong itu ada, desa tidak pernah kehilangan vitalitas untuk mengembangkan dirinya.

Masyarakat di tataran akar rumput sendiri biasanya melakukan setidaknya tiga macam hal agar bisa menjaga dan mengembangkan faktor pendorong tumbuhnya inovasi akar rumput adalah sebagai berikut. Pertama, menjaga atau bahkan memperkuat kerapatan jaringan sosial antarwarga desa serta memperkuat/memperluas jaringan tersebut. Penguatan jaringan komunitas masyarakat bisa



dilakukan dengan mengintensifkan komunikasi formal maupun informal antaranggota masyarakat. Kedua, menemukan partner kreatif yang memiliki kapasitas untuk memfasilitasi dan membantu proses perencanaan dan penganggaran terkait inovasi yang sedang dikerjakan. Ketiga, menjalin kontak dengan tokoh-tokoh inovator yang secara nyata berhasil menciptakan inovasi. Cerita/pembelajaran inspiratif yang sebanding dari pihak eksternal tersebut akan membuat masyarakat akar rumput termotivasi lebih tinggi untuk berinovasi.

Contoh inovasi yang berangkat dari kecerdikan masyarakat akar rumput dalam menghadapi krisis selama pandemi Covid-19 adalah penciptaan pasar tertutup di Desa Panggungharjo untuk meminimalisasi uang masyarakat keluar dari wilayahnya. Desa Panggungharjo bersama 4 (empat) desa di Kabupaten Bantul, yaitu Ngestiharjo, Guwosari, Wirokerten, dan Sriharjo telah menginisiasi kolaborasi mengelola krisis ekonomi dampak pandemi, setidaknya pada level penyediaan barang konsumsi pangan pokok warga yang menyambungkan unit usaha warga dengan konsumen di dalam dan luar desa. Kelima desa bergabung dalam *platform pasardesa.id* yang berupaya mendesain “pasar tertutup” agar peredaran uang warga dapat selama mungkin ditahan untuk tetap bergulir di desa. Saat bersamaan, *pasardesa.id* juga dimaksudkan agar usaha warga tetap dapat jalan dan mendapatkan insentif pemasaran karena hambatan mobilitas dalam kebijakan pembatasan sosial. Mesin penggerak *pasardesa.id* di tahap awal dikombinasikan dengan kebijakan pemanfaatan BLT Dana Desa yang oleh kelima desa disepakati dalam



bentuk nontunai, berdurasi sampai minimal 8 (delapan) bulan, dan pemanfaatannya dibatasi terutama untuk mengakses kebutuhan pangan pokok. (TOR)

Dalam konteks resiliensi masa krisis, gagasan institusionalisasi pasar tertutup sebagai moda ekonomi krisis juga menarik untuk dieksplorasi dan dikembangkan lebih dalam, termasuk melengkapinya dengan alat tukar komplementer/alat tukar lokal (*complementary/ local currency*) sebagai benteng ekspansi ekonomi pasar terbuka dan rentannya uang yang dikelola desa terus saja mengalir keluar, bukan untuk kemanfaatan desa.

Sementara dalam kerangka regulasi negara sesuai dengan konteks masa sekarang, desa sudah memiliki badan ekonomi yang punya peluang untuk mendaulatkan dirinya, yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan Usaha Milik Desa adalah salah satu instrumen desa yang secara konsep bisa diandalkan untuk mewadahi semangat tersebut. Sebagai wadah, isi BUMDes adalah kegiatan usaha kolektif yang dilakukan masyarakat. Kepengurusan BUMDes dijalankan oleh pemerintah dan masyarakat setempat dan produknya menyesuaikan potensi dan kebutuhan desa. Dengan demikian, prinsip BUMDes sesuai dengan UU Desa No.6 2014 bahwa desa berhak memiliki kewenangan mengatur wilayahnya, potensinya, dan penduduknya untuk kesejahteraan warganya. (RS)

Berdasarkan produk hukum pendiriannya, BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai *lembaga sosial dan komersial*. BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada



kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial, BUMDes bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (baik barang maupun jasa) ke pasar.

Kebutuhan untuk memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat lewat BUMDes di dunia digital inilah yang akhirnya mendorong lahirnya *Bumdes.id*. *Bumdes.id* adalah sebuah *platform* digital yang mencoba membantu menumbuhkan, menguatkan, dan mengembangkan BUMDes di seluruh Indonesia. *Platform* ini bisa dikatakan lahir dari Kampung Mataraman sebagai tindak lanjut dari Rembuk Desa Nasional tahun 2017 yang mengundang 60.000 kepala desa. Dalam pertemuan tersebut tercetus Piagam Panggunharjo yang salah satu poinnya ialah mengembangkan ekonomi desa melalui BUMDes. *Bumdes.id* diinisiasi dan dikelola oleh Syncore Indonesia bekerja sama dan didukung komunitas ABCGFM (Acamedics, Bumdes, Community Government, Financial/ Business, Media).

Seluruh narasi yang telah dipaparkan di atas adalah perahan dari Webinar Seri 2 dengan tajuk “Ekonomi Berkeadilan: Perekonomian Desa dalam Tatanan Indonesia Baru” yang diselenggarakan Kongres Kebudayaan desa pada tanggal 1 Juli 2020. Di tengah situasi pandemi Covid-19, ketika sebagian besar dari kita mengisolasi diri dari interaksi langsung dengan orang lain, penyelenggaraan Kongres Kebudayaan Desa dan acara webinar ini bisa menjadi media saling berbagi refleksi atas kondisi ekonomi yang sedang terjadi



dan mencoba untuk menentukan proyeksi kehidupan ekonomi macam apa yang akan kita jalani di masa yang akan datang. Lewat penyelenggaraan acara seperti Kongres Kebudayaan Desa inilah kita terus menghidupkan impian Hatta tentang kemajuan Indonesia lewat desa: *“Indonesia tidak akan bercahaya karena obor besar di Jakarta, tetapi Indonesia baru akan bercahaya karena lilin-lilin di desa”*. □





## Sekarur Sirih

*Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta*

*A*ssalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh, salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu, namo budhaya, salam kebajikan.

Ada ungkapan Jawa tentang desa yang menyatakan: “*Desa Mawa Cara, Negara Mawa Tata*”. Dalam UU Otonomi Desa No. 6/2014, ada kewenangan desa secara luas untuk mengatur cara dan mengurus rumah tangga sendiri, tetapi tidak berarti keluar dari tata ketatanegaraan NKRI. Sebelumnya, khusus untuk desa-desa di Yogyakarta, sudah ada landasan UU Keistimewaan DIY No.

13/2012 sehingga UU Desa menjadi lebih spesifik dalam arti ada perubahan mendasar dari *Pangreh Projo* menjadi *Pamong Praja*. Termasuk penyesuaian nomenklatur Jabatan Camat pada level bawah maupun nama beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di provinsi dan kabupaten/kota. Bukan hanya perubahan nama, tetapi pelayanannya pun menjadi lebih berbudaya Jogja. Oleh karena itu, semua perangkat wajib mengikuti *short course* di Pawiyatan Pamong sehingga sesanti *desa mowo coro negara mawa tata* lebih tampak nuansanya di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Secara tematik, membaca desa adalah sebuah introspeksi atas eksistensinya selama ini. Mengeja Indonesia dengan melafalkan per huruf membentuk kata I-n-d-o-n-e-s-i-a, merupakan bentuk evaluasi perannya sebagai wadah keragaman desa se-Nusantara. Semuanya itu harus ditempatkan pada era “normal baru” daripada aspek kebudayaan.

“*New normal*” adalah *back to normal* karena kehidupan kemarin justru *abnormal*, menandai sebuah *hiper realita*, seperti ketika kita harus membeli *image* sebuah produk air yang—seolah—meningkat statusnya setelah menjadi produk kemasan. Sebuah kondisi mental yang membuat sesuatu tidak substansif, menjadi melebihi kebutuhan dasar kita sendiri. “*New normal*” adalah sebuah terapi psikis dan kultural *healing*, berefek kejut untuk merefleksi dan mengintrospeksi betapa rapuhnya kehidupan kita kemarin, untuk itu kembalilah ke jati diri dan fungsi diri kita yang nyata. Dunia kemarin sudah mati.



Dunia hari ini ibarat sebagai sebuah rumah sakit besar, kita tergeletak di dalamnya dan hanya berpikir sehat dan agar tetap bisa hidup.

Di situlah kini desa berada, yang berimbas pada tata pergaulan dan tata pemerintahan desa. Akhirnya kita menjadi bagian dari generasi yang dipertemukan oleh situasi terbaru dengan perubahan relasi sosial, dinamika organisasi kerja, dan berbagai hal yang selama ini telah kita lalui. Konsekuensinya, Kongres Kebudayaan Desa harus membahas pergeseran budaya desa yang tentu tidak mudah.

Menurut pakar kebudayaan August Comte, Disanayake, maupun Alvin Toffler, setiap pergeseran peradaban ditandai oleh tahapan yang selalu mengedepankan rasionalitas. Bahwa iptek merupakan komponen utama majunya peradaban. Semakin baik penguasaan akan beragam iptek, masyarakat akan semakin mendekati tahap adaptif terhadap kemajuan dan perkembangan zaman. Cara berpikir fungsional inilah yang harus kita hidupkan dan kembangkan di setiap desa agar sejalan dengan konsep *townbie*, membangun kelompok kreatif berbasis kebudayaan seperti contoh *Jogja gumregah*.

Pada masa awal, tentu canggung dan getir, bahkan sakit untuk *melakoninya*. Sebagaimana watak perubahan, harus melewati proses bertahap, terasa ada ketidaknyamanan yang mau tidak mau kita harus hadir menjadi bagian dalam proses tersebut. Potret perubahan dan ketidaknyamanan tersebut, tampak jelas dalam proses Kongres



Kebudayaan Desa yang salah satunya menghasilkan 21 buku rumusan Indonesia Menuju Tatanan Baru dari Desa.

Dampak Covid-19 berkelindan dengan disrupsi teknologi menuju era Industri 4.0 yang belum mapan. Itu pun sudah dibayang-bayangi era Sosial 5.0 yang segera menyusul. Perubahan total ini juga berkejaran dengan pergeseran budaya desa yang belum teridentifikasi secara cermat. Untuk itu, pemerintah pusat dan daerah, termasuk desa, harus bersinergi memastikan pemeriksaan kesehatan masyarakat: tersedianya sarana medis, tersedianya jaring pengaman sosial untuk melindungi—mereka—yang paling rentan, dan tersedianya perlindungan kesehatan. Selebihnya, berhentilah menjadi provokator dan menyebarkan energi negatif yang tidak bermanfaat bagi siapa pun dan berpotensi menimbulkan kecemasan publik.

Gambaran strategis lingkungan desa yang telah berubah harus diikuti perubahan tata masyarakat, antara lain dengan relokasi dan *refocusing* Dana Desa. Dampak ekonomi membawa dampak sosial yang positif dalam meningkatkan peradaban empati, diikuti kesediaan saling belajar, menghargai, dan berbagi sebagai penguat modal sosial dan partisipasi publik. Penguatan ini berdampak positif pada peningkatan daya tahan ekonomi warga karena terbangunnya jaringan kerja sama, kolaborasi, dan kemitraan. Kebijakan “normal baru” atau adaptif menghadapi realitas perubahan, tidak lain dimaksudkan untuk menyatukan kehendak membangun hidup *guyub* di tengah keragaman perbedaan yang didasari oleh *mutual*



*trust* untuk memperoleh *mutual benefit*. Untuk itu kita harus siap mengubah *mindset* budaya dalam mengelola kehidupan bersama.

Dalam penyelenggaraan pemerintah desa, lurah atau kepala desa, harus memiliki wawasan adaptasi dan kapasitas daya tahan. Bekal kompetensi dalam dunia yang kompleks dan penuh kejutan serta perubahan yang tidak terduga merupakan syarat utama. Harus mampu melakukan lompatan *non-linier* bahkan *out of the box*. Dari *Terra Firma*, daratan yang dikenal dengan baik, ke *Terra Incognita* atau dunia masa depan. Demikianlah, semoga buku rumusan hasil Kongres Kebudayaan Desa ini bermanfaat bagi desa, bangsa, dan negara Indonesia. Akhir kata, saya ucapkan selamat dan semoga sukses. Sekian, terima kasih. *Wassalam.*[]

Yogyakarta, 5 Agustus 2020

**Hamengku Buwono X**  
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta





# Sekapur Sirih

*Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi*

**A**ssalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh, salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu, namo budhaya, salam kebajikan.

## **Melawan korupsi dari desa.**

Pergeseran nilai-nilai kejujuran dan kesederhanaan menjadi “pekerjaan rumah” kita bersama. Semakin banyak anak-anak muda kota yang meski tumbuh di desa, tetapi terjangkit penyakit materialisme. Tercerabutnya suasana dan pikiran desa membuat

banyak orang berpikir: apa yang ada dalam pikiran mereka hingga tercerabut dari budaya desanya, padahal berasal dari desa?

Kira-kira apa masalahnya di Indonesia? Keteladanan kepala desa dan orang tua menjadi sangat penting. Guru agama pun tak kalah penting. Di kota semakin hilang keteladanan dan sikap apresiasi sehingga muncul materialisme di masyarakat kota. Tentu butuh obat dengan sikap keteladanan dan orang yang sudah harus selesai dengan dirinya. Sikap spiritual ini banyak ditemukan di desa, harmonisasi alam dan manusia di desa baiknya tidak sekadar jadi inspirasi, tetapi harus dipraktikkan.

Materialisme yang menghantui pikiran orang kota bukan pepohonan dan sawah, melainkan mengumpulkan logam-logam. Bentley, Lamborghini, dan mobil-mobil mewah lainnya semua ada di parkiran Komisi Pemberantasan Korupsi, sitaan dari kasus korupsi. Kumpulan mobil itu menjadi tidak penting. Namun, mengapa masih ada orang-orang yang ingin memilikinya dengan cara salah: korupsi? Apakah ada yang salah dengan pikiran orang kota? Kita perlu rekonstruksi bagaimana pikiran orang desa yang simpel: naik angkot, truk, dan moda transpor publik lainnya yang lebih fungsional.

Mari kita tengok pemikiran ekonom peraih Nobel: *When enough is not enough, a hedonist is born*. Ketika cukup sudah dianggap tidak cukup maka penyakit cinta dunia materialistis akan tumbuh. Pemenang Nobel ini sangat spiritual, seperti ajakan kembali ke desa dan mendalami pemikiran sederhana orang-orang desa. Namun pada



prinsipnya, urusan menimbun kekayaan adalah penyakit semua orang, baik orang kota maupun orang desa.

Tantangan yang tidak kalah besar di desa, salah satunya *money politic*. Ternyata sistem politik yang kita pilih kemudian menular. Pemilihan bupati, gubernur, sampai tingkat pusat penuh syarat *money politic*. Berharap untuk pilkades tidak ada *money politic*. Namun, harapan itu membentur kenyataan. Bahkan saling menularkan, baik dari desa ke kota maupun sebaliknya. Jadi, apakah desa menjadi inspiator korupsi karena *money politic* pilkades?

Sebenarnya sumber permasalahan ada pada politik yang tidak rasional. Kenapa tidak rasional? Kepala desa tidak ada gaji, tetapi dibayar dengan bengkok. Bengkok untuk pembangunan desa kemudian diasosiasikan menjadi milik kepala desa. Kalau panen padi tiga kali dalam setahun, dihitung paling tidak pendapatan 200 juta. Kemudian dikalikan berapa ton pemimpin ketemu angka, kalau dikeluarkan 1 miliar maka untung sedikit. Itu dari bengkok. Sementara dari dana desa maupun beberapa bantuan pembangunan infrastruktur dari pusat bisa menjadi bumerang dan jebakan pikiran koruptif. Ini harus kita pecahkan bersama karena tantangan di desa hari ini berbeda dengan dahulu.

Sistem politik yang kita pilih mahal, sistem terbuka. Sementara pendanaan negara untuk partai politik rendah. Konversi suara ternyata sering kali tidak berbanding lurus dengan pendanaan secara rasional kepada partai politik. Contohnya, gaji bupati 6,5 juta, gubernur 8,5 juta, dan wakil presiden 40 juta yang dinilai tidak laik



dengan proses ketika mereka terpilih. Negara harus sudah mulai memikirkan kepala desa digaji yang cukup. Di Surabaya contohnya: lurah digaji 30 juta, camat bisa 50 juta, tetapi di desa-desa lain bagaimana? Sehingga yang terjadi, tidak sedikit kasus kepala desa hasil pemilihan secara *money politic*, kemudian melakukan upaya-upaya yang merusak perilaku masyarakat desa itu sendiri.

Mengapa 36 persen pelaku korupsi yang ditahan KPK adalah kader politik, anggota DPR, dan kepala daerah? Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Angka politik sangat memengaruhi angka persepsi indeks korupsi Indonesia, jadi varietas demokrasi proyek angkanya 28, sementara dari lulusan ekonomi ratingnya 59. Jadi angka-angka ini merupakan perbandingan korupsi yang diperbandingkan setiap negara. Untuk kasus Indonesia cukup menarik karena terus menanjak, ini jarang terjadi di negara lain.

Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain, terbaik di dunia untuk pergerakannya. Dari 17 ke 40, naik 23 poin. Cina memberantas korupsi dengan hukuman mati naik 7 poin. Kemudian Malaysia di bawah kepemimpinan Mahathir bisa *reborn* setelah di zaman Najib turun 47. Itu pun hanya menaikkan Malaysia di angka 2 poin saja. Jadi, Indonesia sudah benar dalam pemberantasan korupsi, tetapi terlalu kaya dengan isu kota sehingga di desa juga perlu dilibatkan pemberantasan korupsi. Untuk itu, ada tiga strategi yang dilakukan KPK: Penindakan agar koruptor jera, pencegahan agar orang tidak melakukan korupsi, pendidikan agar orang tidak



ingin korupsi. Demikian sekapur sirih dari kami untuk 21 judul buku hasil rumusan Kongres Kebudayaan Desa. Terima kasih.[]

Jakarta, 5 Agustus 2020

**Giri Suprpdiono**

Direktur Dikyanmas KPK





## Sekapur Sirih

*Menteri Desa, PDTT*

*A*ssalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh, salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu, namo budhaya, salam kebajikan.

Pertama-tama, mari kita bersama-sama bersyukur kehadiran Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan Kongres Kebudayaan Desa tahun 2020. Ini adalah satu momentum yang sangat luar biasa, titik pijak atau titik tolak dari kebangkitan desa-desa yang memiliki akar budaya, di mana

perencanaan pembangunan dan pelaksanaan pembangunan desa jangan sekali-kali lepas dari tumpuan akar budaya desa setempat. Mudah-mudahan kongres ini merupakan awal untuk kongres kebudayaan desa tahun-tahun berikutnya. Kedua, selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. yang memberi cetak tebal kebudayaan manusia di muka bumi.

Melalui kongres desa, kita semua sudah diberikan pandangan dan paradigma baru dalam melihat dunia, termasuk kebudayaan. Kita tentunya semakin sadar bahwa di balik pandemi Covid-19 terdapat ujian sekaligus hikmah. Kita belum tahu kapan tuntasnya, tetapi kita harus mengambil langkah konkret dan strategis, salah satunya dengan merumuskan tatanan baru. Dan tentu saja kita berharap pandemi segera berlalu.

Sebagaimana dijelaskan selama kongres, pandemi Covid-19 sudah sampai pada level mendekonstruksi tataran budaya manusia. Tidak hanya kebudayaan semata, tetapi ekososial politik juga terdekonstruksi. Untuk itu, ada beberapa hal terkait rumusan kongres agar bisa berkontribusi terhadap paradigma baru Indonesia pascapandemi.

Pertama, melalui kongres kita berharap bisa mengidentifikasi nalar tebal kebudayaan masyarakat desa, seperti gotong royong atau *holopis kuntul baris*, saling peduli antarsesama masyarakat desa, sekaligus membaiknya ekosistem politik di mana masyarakat desa mampu berpartisipasi terhadap pembangunan bangsa dan negara.



Kedua, kongres diharapkan mampu berkontribusi untuk pemikiran nalar kebudayaan baru yang otentik, unik, dan inovatif yang hari-harinya dijalankan masyarakat desa. Dengan kata lain, di balik keriuhan negara mengurus problem bangsa, masyarakat desa punya model dan modul pendekatan khas yang berasal dari cara mereka menghadapi persoalan. Ini *problem solving* yang spesifik khas desa, contoh ketika ada masalah tidak terlalu berat, cukup selesai di desa. Hukum positif tidak selalu menjadi rujukan. Misalnya, ada pencuri ayam, tidak serta-merta diurus ke kantor polisi, dimasukkan sel. Melainkan diselesaikan di desa dengan sanksi sosial yang diputuskan oleh kepala desa, yang karena kemampuan dan kewibawaan yang dimilikinya sehingga keputusan diterima oleh masyarakat.

Ketiga, forum Kongres Kebudayaan Desa yang melibatkan beragam unsur keterwakilan: akademisi, praktisi, seniman, budayawan, pemangku adat, dan elemen pemerintahan dari pusat sampai desa. Untuk itu, saya berharap agar semua unsur saling berkolaborasi. Para praktisi menceritakan bagaimana desa melaksanakan kenormalan baru di desa. Akademisi bisa mereformulasi dan meredesain bagaimana kebijakan yang adaptif bagi desa. Sebagai keterwakilan pemerintah, kami berharap ada perhatian khusus pascakongres agar lebih serius dan terelaborasi dengan kebijakan untuk kesejahteraan desa di Indonesia.

Terakhir, kami dari Kemendesa PDTT terus mencari dan mengidentifikasi narasi tentang desa, masyarakat desa, dan



dinamikanya mengikuti perkembangan zaman yang bisa kita formulasikan menjadi kebijakan. *Tagline* “Desa untuk Semua Warga atau Desa Surga” merupakan inti sari pemajuan kebudayaan desa, pemajuan masyarakat desa dengan memperhatikan kearifan lokal. Dana desa jangan hanya dirasakan elite desa, tetapi dirasakan kehadirannya oleh seluruh masyarakat desa, itu inti dari surga, desa untuk semua warga desa.

Terima kasih kepada Sanggar Inovasi Desa, pemerintah Desa Panggungharjo, dan Jaringan Kerja Kongres Kebudayaan Desa 2020 yang telah mempersiapkan dan melaksanakan kongres dengan segala risiko dan konsekuensinya. Semoga kongres dengan hasil rumusannya yang terbingkai dalam 21 judul buku ini menjadi momentum berarti bagi perubahan dan penguatan budaya desa di masa yang akan datang. Demikian sekapur sirih dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, salam budaya desa.[]

Jakarta, 5 Agustus 2020

**Abdul Halim Iskandar**

Menteri Desa, PDTT





## Pidato Kebudayaan

*Dirjen Kebudayaan, Kemendikbud*

*A*ssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, om swastyastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

**Revolusi perdesaan sejatinya adalah revolusi kebudayaan.**

Bapak, ibu, dan peserta kongres yang saya hormati. Terima kasih telah mengundang saya dan memberi kesempatan bicara di depan Kongres Kebudayaan Desa. Saya baca kerangka acuan dengan saksama, saya melihat kebudayaan tidak dipahami semata kesenian atau warisan budaya. Namun, juga sebagai keseluruhan cara hidup,

cara berpikir menyangkut kebiasaan kita, ritual, dan praktek yang terkait kebudayaan. Jadi kebudayaan dalam pengertian luas, sama seperti semangat dari UU No. 5/2017, tentang pemajuan kebudayaan Indonesia.

*Pertama*, kita paham bagaimana Pandemi Covid-19 mengubah cara hidup kita secara drastis. Kita membatasi pertemuan dengan orang lain, bersentuhan dengan orang lain, menjaga jarak, dan kita juga punya beberapa keseragaman. *Physical distancing*, *lockdown*, dan seterusnya, semua masih dalam bahas Inggris, bahasa asing. Ini menunjukkan respons kita pada situasi pandemi masih cenderung datang dari luar, belum sepenuhnya menjadi sesuatu yang berakar pada masyarakat kita, dari dalam. Padahal kita mempunyai khazanah pengetahuan luar biasa menghadapi situasi pandemi. Tidak sedikit orang mengatakan, situasi yang kita hadapi tidak ada bandingannya.

*Kedua*, pada situasi luar biasa, kita perlu langkah-langkah luar biasa juga. Pemikir Inggris mengatakan, untuk mengatasi situasi Covid-19, kita perlu sebuah revolusi perdesaan. Revolusi ini landasan kita untuk tatanan masa depan. Karena revolusi bukan sesuatu luar biasa. Dalam sejarah Indonesia, kita sering mendengar seruan revolusi, terakhir revolusi mental. Jadi, tidak ada yang luar biasa dengan gagasan revolusi. Yang luar biasa adalah ketika gagasannya diutarakan oleh seorang bankir. Orang terkaya kedua di desa.

Gagasan mengenai revolusi perdesaan bisa kita tengok dalam sebuah tulisan yang dimuat di situs *World Economic Forum*. Ini keluar dari kebiasaan lain, forum ekonomi dunia dikenal oleh kepala pemerintahan dunia sebagai kumpulan para pebisnis, ekonom, yang



membentuk sistem untuk mendominasi, jelas bukan forum untuk revolusi. Kita tidak mungkin kembali ke masa sebelum Covid-19, ke masa yang sebelum normal lama, dan kita perlu sebuah tantangan baru, tantangan yang lebih manusiawi, ramah lingkungan dan berkelanjutan. Karena kata kunci tatanan baru adalah keselamatan.

Bisa dibayangkan, ketika semua orang mendapat kesempatan mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas hidup. Kita akan mudah sekali bersepakat untuk hal tersebut. Namun, bagaimana caranya? Jawaban paling jujur kita berikan pada pertanyaan mendasar yang kita belum ketahui bersama. Belum ada yang mengetahui bagaimana caranya untuk bisa sampai ke sana, karena tidak ada atau tepatnya belum ada cetak biru siap pakai. Namun, coba kita pastikan titik tolaknya ada pada desa. Perjalanan kita sebagai masyarakat, sebagai bangsa, dimulai dari desa. Sekitar 1550 tahun lalu, asal mula pengelompokan masyarakat dalam jumlah besar yang kemudian membentuk bangsa Indonesia. Periode selanjutnya ketika kita ingin membangun negeri modern, tetapi desa dilupakan, diabaikan. Seluruh sumber daya kita keluarkan untuk membangun sektor modern yang oleh Covid-19, diingatkan untuk kembali ke asal usul, kembali ke dasar, kembali ke akar, kembali ke desa, itu alasan utama.

Alasan berikutnya, desa telah menyiapkan kebutuhan dasar untuk normal baru, terutama pangan dan kesehatan. Dua hal pokok ini tidak boleh diserahkan semua pada pasar. Ketika pembatasan sosial diberlakukan, kemudian ada orang panik memborong bahan pangan dan obat-obatan, termasuk yang tidak diperlukan. Sementara yang memerlukan tidak bisa membeli. Penyelesaian masalah seperti



ini tidak sesederhana menangani penyelewengan, tapi ada kelemahan dalam sistem yang harus diperbaiki. Ini semata bukan soal mafia impor beras maupun gas—yang memang harus disingkirkan. Namun, ada yang lebih penting, yaitu menata ulang sistem yang berpihak, yang bisa menegakkan kedaulatan di atas sistem itu sendiri sehingga mengembalikan kemampuan kita mengelola sumber daya yang ada. Fokus utamanya untuk pemenuhan kebutuhan kita semua, terutama kebutuhan di dalam negeri. Selebihnya, bolehlah berbagi dengan negara tetangga, negara sahabat.

Dan saya kira, yang berkumpul sekarang di kongres, adalah para pejuang akar rumput yang sudah lama menekuni masalah ketimpangan dan penyelewengan, yang bergerak mengurus memuliakan kembali benih-benih lokal. Ada yang terlibat praktik agro ekonomi, ada yang mengurus pasar lokal dan nasional untuk melayani kebutuhan masyarakat, penggerak koperasi usaha kecil, BUMDes, semua elemen yang diperlukan dalam tatanan mendatang. Saatnya, kita belajar kembali dari kearifan lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi baik lisan maupun tulisan. Hemat saya, ini kerja-kerja kebudayaan.

Pengetahuan tradisional di masa pandemi terlihat memiliki keunggulan. Kasus Covid-19 banyak sembuh karena obat tradisional. Balitbang pertanian sudah identifikasi 50 tanaman herbal untuk penangkal virus. Beberapa perusahaan jamu sudah memproduksi ramuan daya tahan tubuh untuk menghadapi Covid-19. Semua bukan sekadar romantisme, tapi pikiran rasional. Kita tidak mungkin diam menunggu vaksin datang. Sekarang, di banyak tempat, orang-orang mulai menggali pengetahuan dari naskah-naskah, tradisi lisan, dan



berbagai praktik lainnya untuk memperkuat daya tahan terhadap virus. Dan dalam prosesnya, kita menyadari betapa pengetahuan lokal yang selama ini diabaikan ternyata memiliki potensi pengembangan yang luar biasa.

Covid-19 telah memaksa kita melihat kembali jejak dan perjalanan kita. Covid-19 sudah mendesak kita memanfaatkan kekayaan budaya dan intelektual yang kita miliki. Memanfaatkan teknologi mutakhir, bermacam teknologi terbaru, temuan di berbagai bidang, kesehatan, pangan, energi terbarukan, dan pada akhirnya seluruhnya diharapkan bisa menghasilkan pengetahuan sebagai landasan untuk tatanan baru.

Kalau kita tengok lebih jauh, seluruh praktik baik tatanan baru, mempunyai nilai ekonomi yang sangat besar. Sebagai contoh, pengobatan berbasis pengetahuan lokal sekarang disebut pengobatan integratif dengan nilai total di dunia mencapai 360 Miliar Dolar. Padahal pengetahuan integratif hanya bagian kecil saja dari industri yang disebut *wellness industry* yang mencakup banyak hal: ada perawatan diri, makanan sehat, pariwisata, dan total nilainya diperkirakan sudah 4,2 Triliun Dolar. Itu data sebelum Covid-19. Dan menurut hemat saya, di masa Covid-19 justru industri berbasis pengetahuan lokal di bidang kesehatan, bidang keselamatan akan semakin berkembang. Seiring dengan meningkatnya kesadaran publik mengenai kesehatan.

Dalam sebuah studi dan riset, telah memperlihatkan bahwa 40% dari nilai total 4,2 Triliun Dolar atau 1,7 Triliun Dolar Amerika, sama besarnya dengan 25 Ribu Triliun Rupiah. Dan pada tahun 2023 kelak,



nilai tersebut akan berada di Asia Pasifik. Jadi, kue yang cukup besar dari industri *Wellness* tersebut akan ada di Asia Pasifik. Pertanyaannya kemudian, Indonesia sebagai sektor perekonomian terbesar keenam di Asia Pasifik apa rencananya? Padahal, relatif kita punya semua. Keanekaragaman hayati luar biasa, salah satu yang paling besar dan lengkap di dunia. Pengetahuan lokal mengelola alam juga luar biasa. Dan jangan lupa, banyak penemuan di bidang kesehatan modern pun dilakukan di Indonesia. Para peneliti dari berbagai belahan dunia datang ke Indonesia, berinteraksi dengan orang desa, mencatat kebiasaan mereka, kemudian menghasilkan temuan yang sampai sekarang masih punya pengaruh besar dalam kedokteran modern.

Itu semua kita punya, tapi pertanyaannya, apa rencana kita? Saya percaya bahwa fokus para pengembang *Wellness* di Indonesia akan membawa angka pertumbuhan kembali bergerak naik, tapi hendaknya harapan besar ini jangan sampai mengalihkan fokus kita. Kita membangun tatanan baru bukan untuk menjadi yang paling besar. Presiden Jokowi dalam sidang IMF mengingatkan dengan sebuah pertanyaan retoris, untuk apa menjadi yang paling besar di tengah dunia yang tenggelam?

Bapak, ibu, dan peserta kongres yang saya hormati. Tatanan baru yang kita rumuskan memang seharusnya mengutamakan keselamatan dan kebahagiaan, itu kata kuncinya. Bukan angka pertumbuhan, bukan uang. Covid-19 mengingatkan kita semua bahwa uang bukan segalanya. Punya uang tapi tidak ada yang bisa dibeli, itu pelajaran berharga di masa krisis pandemi. Semua tidak mudah. Kita terbiasa dengan peralatan modern, termasuk uang. Mengubah cara pandang



dan kebiasaan memerlukan perubahan mendasar, perubahan kebudayaan. Karena itu revolusi perdesaan sejatinya adalah revolusi kebudayaan.

Benih-benih kebiasaan baru, kebudayaan baru sudah mulai bertumbuhan. Di tengah pembatasan sosial, kita mulai melihat orang kembali ke alam, bercocok tanam. Kita menangkap ada kerinduan untuk kembali belajar sejarah, kembali belajar kebudayaan, tradisi spiritual dan praktik dalam bermasyarakat. Gerakan sosial juga bertumbuhan di mana-mana. Di Yogyakarta contohnya, ada gerakan Solidaritas Pangan Jogja: membangun dapur umum untuk membantu masyarakat kesusahan. Kita mencatat para seniman memproduksi alat kesehatan seperti Alat Pelindung Diri (APD) dan *face shield* yang terjangkau.

Revolusi perdesaan sudah dimulai. Tugas kita dan tugas kongres kita ini, untuk merajut inisiatif menjadi gerakan efektif. Merajut *science* mutakhir dengan pengetahuan tradisional. Kita merajut teknologi digital dengan pranata lokal. Gerakan ini adalah gerakan interdisipliner, karena tidak ada bidang ilmu atau sektor masyarakat yang bisa menjalankan tugas besar sendirian. Di sinilah semangat gotong royong akan mendapatkan wujud nyata.

Terakhir sebagai penutup, saya memohon bantuan para pegiat desa, para aktivis kepala desa, kepala daerah yang hadir dalam kesempatan kongres ini, untuk memperhatikan balai kebudayaan di desa. Sebagian dari kita punya padepokan, sanggar, dan seterusnya. Saya sangat memohon bantuan kita semua agar seluruh institusi ini bisa bertahan di masa sulit. Bagi yang belum punya padepokan,



sanggar, mohon bantuan agar kantor desa juga bisa berfungsi sebagai balai kebudayaan pusat pemajuan kebudayaan, bukan soal gedung fisik, tapi program dan kegiatannya. Di sinilah harapan saya kita bisa mulai melancarkan revolusi kebudayaan melalui musyawarah, lumbung pengetahuan. Di sinilah saya berharap kreativitas dan energi pembaruan bisa berkonsolidasi. Perangkat desa bisa menjadi agen pemajuan kebudayaan di wilayah setempat, kami siap kerja sama dengan seluruh unsur. Semoga setelah kongres, kita bisa menghasilkan agenda aksi konkret di tatanan baru. Terima kasih. Wassalam. []

Jakarta, 1 Juli, 2020

**Dr. Hilmar Farid**

Dirjen Kebudayaan, Kemendikbud





## DAFTAR ISI

**Pengantar Editor ..... v**

### **Sekapur Sirih**

**1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ..... xv**

Hamengku Buwono X

**2. Dirwktur Dikyanmas KPK ..... xx**

Giri Suprapdiono

**3. Menteri Desa, PD TT ..... xxv**

Abdul Halim Iskandar

**Pidato Kebudayaan Dirjen Kebudayaan,**

**Kemendikbud ..... xxix**

<b>Dr. Hilmar Farid Ekonomi Desa dan Taman Keadilan .....</b>	<b>1</b>
Prof. Ahmad Erani Yustika	
<b>Peta Jalan Revitalisasi BUMDes Menguatkan Lokalitas dan Membangun Ekonomi Berbasis Digital .....</b>	<b>14</b>
Rudy Suryanto	
<b>SONJO (Sambatan Jogja): Revitalisasi Gotong Royong Berbasis Daring .....</b>	<b>24</b>
Rimawan Pradipto, Ph.D. dan Luluk Lusiantoro, Ph.D.	
<b>Terobosan Model Bisnis untuk Petani Gurem di Pedesaan .....</b>	<b>46</b>
Dewi Hutabarat	
<b>BUMDes Sebagai Ikhtiar untuk Meretas Jalan Kemandirian Ekonomi Lokal .....</b>	<b>62</b>
Puji Qomariyah	
<b>Inovasi Akar Rumput untuk Ekonomi Berkelanjutan .....</b>	<b>81</b>
M. Laksmna S. Adi Wibawa, S.IP.	
<b>Epilog .....</b>	<b>101</b>
Ketua Panitia Kongres Kebudayaan Desa	
<b>Deklarasi Arah Tatatan Indonesia Baru dari Desa .....</b>	<b>131</b>
<b>Kerabat Kerja Kongres Kebudayaan Desa 2020 .....</b>	<b>134</b>





# Ekonomi Desa dan Taman Keadilan

*Prof. Ahmad Erani Yustika*

**P**andemi Covid-19 mendorong masyarakat perkotaan berbondong-bondong pulang ke desa. Sekaratnya ekonomi perkotaan yang terdampak Covid-19 tidak mengizinkan sesuap nasi dihidangkan di meja makan mereka. Akhirnya, pulang kampung dipandang menjadi solusinya. Dan di masa pandemi, desa memperlihatkan kedaulatannya. Di tengah resesi ekonomi besar karena ketergantungan ekonomi dalam negeri pada pasar

global, desa menjadi lini terakhir pertahanan ekonomi Indonesia. Bila direnungkan lebih mendalam, kejatuhan kota dan ketahanan desa adalah akibat dari berbagai banyak faktor. Salah satunya adalah sistem pembangunan ekonomi negeri ini.

Situasi yang dihadapi sekarang ini mengingatkan kita dengan tujuan dan maksud pembangunan nasional yang diutarakan oleh Soekarno sekitar enam puluh tahun lalu. Pada 28 Agustus 1959, Soekarno menyampaikan Amanat Presiden tentang Pembangunan Semesta Berencana kepada Depernas (Dewan Perantjang Nasional): *“..tudjuan dan maksud pembangunan semesta ialah membangun masyarakat jang adil dan makmur; adil dan makmur jaitu menurut tindjauan ajaran Pantjasila”* (Departemen Penerangan RI, 1959).

Setelah puluhan tahun merdeka, amanat ini menjadi agenda pokok yang mesti dijawab: apakah pembangunan sudah bersendikan ajaran Pancasila? Sulit menampik, pembangunan yang diselenggarakan selama ini telah banyak menghasilkan berbagai macam keberhasilan, baik yang dirasakan khalayak domestik maupun publik negara lain. Namun, ukuran keberhasilan tersebut lebih berpijak pada norma yang diterima umum sehingga parameter yang bersumber dari dasar negara tidak banyak mendapatkan ruang. Implikasinya, jarak antara pencapaian pembangunan dan ajaran Pancasila bisa berpungungan.

Di sinilah noktah terpenting untuk menjaga dan membela Pancasila dalam konteks pembangunan. Penegasan terhadap maksud dan tujuan pembangunan mesti diletakkan sebagai usaha untuk

menumbuhkembangkan Pancasila mulai dari akar, batang, sampai rantingnya agar kokoh pada setiap lini pembangunan nasional.

Sebuah petunjuk dalam pembangunan berdasarkan ajaran Pancasila sebetulnya sudah diutarakan oleh Bung Hatta. Dalam sebuah kesempatan, Bapak Koperasi tersebut menyatakan bahwa *“Indonesia tidak akan bercahaya karena obor besar di Jakarta, tetapi Indonesia baru akan bercahaya karena lilin-lilin di desa”*.

Desa menjadi pangkal harapan karena dua pertimbangan. Pertama, saat perumusan Pancasila kondisi sosio-ekonomi-politik nasional bisa merujuk kepada situasi desa hari ini meski tentu saja tidak sama persis. Perikehidupan manusia dan alam pada masa kemerdekaan adalah pantulan derap nadi desa masa kini. Dengan demikian, menempatkan desa sebagai alas penegakan isi dasar negara merupakan pembicaraan yang layak digelar secara serius.

Kedua, persentuhan desa dengan modernisasi (pembangunan) masih belum begitu jauh. Dengan demikian, eksperimen membentuk gugusan baru pembangunan dengan nilai dasar negara tersebut cenderung masih mudah dijalankan.

Di tengah pandemi yang meluluhlantakkan perekonomian pasar bebas, bangsa ini menghadapi sebuah momen penting dalam orientasi pembangunan ekonominya. Perubahan mendasar dalam sistem perekonomian dengan pembangunan desa sebagai pusatnya layak dikedepankan alih-alih menjadikan kota sebagai pusat pembangunan. Oleh karenanya, perhatian perlu dicurahkan karena



titik tumpu pembangunan ada di desa-desa. Sebuah pembangunan ekonomi kerakyatan yang bersesuaian dengan sistem nilai Pancasila.

### **Ketuhanan**

Sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah akar pembangunan. Peletakan aspek spiritual dalam pembangunan akan mengesampingkan hal-hal material yang selama ini selalu jadi pusat pembangunan. Semangat dasar sekaligus tujuan tertinggi dari sila ini berprinsip pada moralitas yang berwatak ilahiah. Desa sebagai sebuah lokus di mana moralitas masih dijunjung merupakan tempat yang tepat dalam eksperimen sekaligus percontohan prinsip. Kecenderungan desa sebagai tempat yang masih memiliki dan menghidupi nilai-nilai spiritualitas membuat imperatif moral jadi pandu bagi imperatif material.

Adam Smith dalam *The Theory Of Moral Sentiments* (1759) menulis “Promosi kaum kaya dan—sebaliknya—pengabaian terhadap kelompok melarat adalah korupsi terhadap moral.” Sayangnya, berkebalikan dengan pesan Smith, korupsi moral hari ini dapat dijumpai dalam setiap sendi pembangunan. Di kota, pusat-pusat pembangunan ekonomi, korupsi moral ini merajalela.

Pasalnya, aktivitas ekonomi yang berkeadilan mengutamakan kejujuran (individu) dan faedah (sosial) sebagai inti kegiatannya. Ekonomi berkeadilan pada akhirnya merupakan sebuah sistem yang mengandalkan melekatnya tanggung jawab di bumi dengan nilai yang ada di langit.



Tujuan akhir aktivitas ekonomi ini tidak lain dan tidak bukan adalah menuju langit itu sendiri. Dengan semangat sila pertama Pancasila, utopia kesejahteraan dalam ekonomi yang berkeadilan adalah bahwa kesejahteraan spiritual nantinya akan dicapai oleh masing-masing manusia manakala ia memiliki pencapaian berupa “daya beri” alih-alih sekadar “daya beli”. Sebagai konsekuensinya, patokan khusus imperatif moral yang memandu keseluruhan aktivitas ekonomi adalah mendorong terwujudnya kemampuan membagikan kesejahteraan kepada alam dan sesama manusia.

Apabila sila ini dijadikan dasar sebuah prognosis kebijakan, kita akan memiliki beberapa program yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, seperti larangan ekonomi ilegal, eksploitasi, penimbunan barang/jasa, dan lain sebagainya. Pelarangan semacam ini adalah usaha untuk tidak merugikan pihak lain. Di masa pandemi misalnya, penimbunan masker atau alat kesehatan lain tentu tidak sesuai dengan moral ketuhanan di samping tidak sesuai dengan perikemanusiaan. Tindakan yang mementingkan material ketimbang yang lain sudah merusak asas ketuhanan dalam pembangunan bangsa ini.

## **Kemanusiaan**

Refleksi pembangunan yang paling konkret selalu terkait dengan manusia dan hubungan antarmanusia. Dengan demikian, sila kedua “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” merupakan kunci utama dalam pembangunan ekonomi berkeadilan. Moda produksi



sebagai mata rantai pembangunan (ekonomi) selalu berurusan dengan modal, tanah, dan tenaga kerja (manusia). Hanya saja pada faktor produksi tenaga kerja terdapat kacamata sendiri dalam memandangnya.

Manusia sebagai makhluk kompleks memiliki dimensi sosial, budaya, politik, dan seterusnya. Kompleksitas manusia dengan ragam perasaan, keyakinan, pikiran, dan bukan hanya keterampilan produksi membuatnya tidak berada satu level dengan faktor produksi lain. Akerlof dan Kranton (2010) mengatakan bahwa tiap individu memiliki konsep hidup (keadilan ekonomi) sesuai konteks sosial dan budayanya sendiri.

Maknanya, hubungan antarmanusia dalam pembangunan tidak boleh mereduksi kemanusiaan. Di desa, hubungan antarmanusia (dalam bingkai ekonomi sekalipun) selalu menganggap persaudaraan sebagai penanda sikap. Persaudaraan merupakan inti kemanusiaan sehingga relasi pembangunan tidak menjadi isolasi antarkelas dan menjadi basis pertarungan antarsesama manusia. Oleh karena itu, sila ini menjadi pengingat bahwa pembangunan mesti menjadi pengungkit nilai kemanusiaan dan bukan malah menggerusnya.

Kata “Adil” yang dimaksudkan di pasal ini merupakan nisbah ekonomi yang setara dengan nilai kemanusiaannya. Sementara “Beradab” dimaknai penghormatan terhadap pikiran dan perasaan manusia lain, dan demikian sebagai larangan praktik eksploitasi.

Apabila sila ini diterjemahkan dalam kebijakan maka kesetaraan kepemilikan saham dalam badan usaha, keterlibatan pengambilan

keputusan, batasan jam kerja, dan hak dasar lainnya adalah usaha menghargaai kemanusiaan dengan adil dan beradab.

## Persatuan

Hasil pembangunan yang kerap dicemaskan adalah: pertumbuhan yang secara bersamaan menghasilkan peminggiran. Pelaku ekonomi yang satu tumbuh, sementara lainnya mati. Pembangunan bukan merangkul, melainkan memisahkan. Itulah gambaran dari pembangunan yang terjadi selama ini. Sila “Persatuan Indonesia” seolah jauh panggang dari api. Di desa, kosakata gotong royong masih menggaung meski mulai terkikis oleh sistem persaingan yang kian bengis. Sekurangnya, gotong royong masih menjadi bahasa relasi antarmanusia di desa.

Gotong royong inilah yang menjadi dasar bagi persatuan dalam aktivitas ekonomi. Desa masih merupakan tempat munculnya persatuan dalam menjalankan kegiatan ekonomi, seperti usaha bersama dan tindakan kolektif. Usaha bersama yang bertumpu pada asas kekeluargaan adalah kesadaran atas watak sosial manusia dan ekonomi ialah kegiatan bermasyarakat. Oleh karenanya, hubungan antarmanusia harus tetap dilihat selayaknya seperti kegiatan lainnya. Menurut Mancur Olson (1971): *“Tindakan kolektif meninggikan posisi tawar kelompok ekonomi yang lemah sekaligus memungkinkan distribusi ekonomi berjalan secara otomatis.”*

Dengan mengacu pada UUD 1945 Pasal 33, hak kepemilikan privat dibatasi dan berganti dengan kepemilikan kolektif khususnya



tanah dan sumber daya lainnya. Kebijakan yang bisa dibuat dari sini antara lain adalah membuat asosiasi-asosiasi ekonomi, seperti asosiasi petani atau nelayan, hak kepemilikan negara dan komunitas/kolektif, promosi koperasi, dan lain sebagainya.

## **Kerakyatan**

Persatuan itu masih terbungkus jejaknya pada saat mengonstruksi kedaulatan rakyat dalam panggung politik dengan sila yang memiliki bobot dahsyat: “Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”.

Kesahajaan hidup dan hasrat memajukan kebijakan/kesejahteraan publik merupakan napas dari kerakyatan. Kata ini memiliki penunjang berupa demokrasi politik dan demokrasi ekonomi yang merupakan dua sayap penyangga hidup negara. Demokrasi politik merupakan kebijaksanaan dalam proses pengambilan keputusan melalui permufakatan. Keputusan yang hanya berlatar kepada kuantitas suara kerap tidak berpijak kepada pengetahuan sehingga memungkinkan dikte mayoritas atas minoritas.

Sebaliknya, permusyawaratan mesti berbasis pengetahuan. Itulah sebabnya frasa “hikmat kebijaksanaan” muncul sebagai muara dari pengetahuan. Di desa, praktik semacam itu terus terjadi, misalnya di desa adat sehingga setiap pikiran warga terserap dalam sistem sosial yang dibangun. Musyawarah desa menjadi salah satu perwujudan sila keempat dan langgeng hingga kini.



Di sisi lain, demokrasi politik tidak bisa berdiri tanpa demokrasi ekonomi. Setidaknya untuk menciptakan sebuah tatanan yang adil. Demokrasi ekonomi yang dapat didefinisikan sebagai penguasaan rakyat atas alat produksi dan pengelolaannya adalah satu faktor penting. Demokrasi politik yang berdiri tanpa demokrasi ekonomi akan membawa ketimpangan dan segala kebijakan dikuasai oleh pihak tertentu saja.

Smith (2005) mengungkapkan bahwa pergeseran ketimpangan kekuasaan bisa terjadi apabila pengambilan keputusan berpindah dari pemegang saham kepada pemangku kepentingan publik (pekerja, pelanggan, dan yang lain).

Perpindahan pemangku pengambilan keputusan harus didukung dengan kemampuan literasi dan wacana yang baik. Setiap elemen pemegang kepentingan wajib mendapatkan fasilitas pendidikan dan keterampilan untuk mendukung permusyawaratan dalam sendi aktivitas ekonominya.

Selain itu, koperasi sebagai bentuk usaha yang keseluruhan kebijakannya ditentukan oleh anggota adalah organisasi kolektif yang perlu dibuat dan dikembangkan untuk menjadi arena ekonomi warga desa.

## **Keadilan sosial**

Akumulasi dari Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, dan Permusyawaratan bisa terpantul dari hasil keseluruhan



pembangunan. Terma “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” adalah keagungan dari empat dasar tersebut. Keadilan sosial memiliki makna yang amat mendalam, yakni kesejahteraan yang tidak kehilangan spiritualitas, manusia tidak dianggap sebagai semata faktor produksi, penguatan relasi dan distribusi sosial, dan pengejawantahan konsensus (kedaulatan).

John Rawls (1999) mengungkapkan bahwa dalam pemerataan akses/aset: (i) setiap orang memiliki hak yang sama terhadap skema kebebasan dasar; dan (ii) ketimpangan sosial/ekonomi harus ditangani dan didesain posisi yang terbuka bagi semua orang.

Kebijakan yang secara prosedur benar (misalnya akses yang sama untuk masuk ke arena ekonomi) belum tentu menghasilkan keadilan sosial karena tiap orang punya kapasitas dan kesempatan yang berbeda. Oleh karenanya, Amartya Sen (1999) mengatakan bahwa keadilan sosial tidak hanya diukur dari bentuk kelembagaan (aturan dan regulasi yang demokratis), tetapi juga praktik yang efektif.

Meskipun paket kebijakan kelembagaan sudah berlandaskan keempat sila, hampir pasti selalu terdapat satu-dua warga yang mengalami kesulitan ekonomi. Di sinilah tugas negara untuk meringankan beban kesulitan tersebut dan membuka kesempatan lebih lebar agar cita-cita keadilan sosial semakin dekat. Pajak progresif, pendapatan minimal, hak dasar (pangan-sandang-papan), pendidikan, kesehatan, asuransi sosial, pembatasan gaji (kepemilikan lahan), pemerataan modal, dan banyak lagi paket kebijakan yang mampu menjawab itu.



Perasaan kehidupan yang makin kering, meskipun kesejahteraan meningkat, tidak menggambarkan adanya spiritualitas, kemanusiaan, persatuan, dan permusyawaratan tersebut. Tentu saja keadilan sosial menjadi tidak bisa digapai. Oleh karena itu, puncak pembangunan yang dimaknai sebagai adil dan makmur, seperti diucapkan oleh pendiri negara di atas, sebetulnya merupakan agregasi dari praktik perikehidupan atas implementasi empat sila sebelumnya.

## **Karakter Ekonomi Desa**

Pancasila selama ini adalah jiwa ekonomi desa. Ekonomi kolektif yang dilaksanakan di desa membuat desa sebagai tempat lahir dan besarnya koperasi sebagai organisasi. Selain itu, menggunakan lembaga koperasi membuat warga desa memiliki kepemilikan atas usaha dan jerih payahnya. Mereka bukan sekedar menerima upah atas kerja yang dilakukannya, tetapi juga memiliki dan menentukan arah kerja badan ekonomi kolektif tersebut. Perasaan kolektif ini membuat motif ekonomi tidak lagi profit perorangan, melainkan kesejahteraan bersama.

Ekonomi kolektif ini memungkinkan ada dan berkembangnya demokrasi ekonomi di desa. Keikutsertaan dalam gerakan kolektif memungkinkan adanya pemerataan akses dan aset oleharganya. Institusi pemerintah haruslah mewedahi adanya demokrasi ekonomi dan politik sekaligus. Peran institusi negara yang aktif mampu memberikan penciptaan pekerjaan yang layak, kecukupan pangan-



sandang-papan, pendidikan, kesehatan, bantuan fakir-miskin, dan lain sebagainya.

Keaktifan institusi negara yang dalam hal ini ada di desa adalah pada pengelolaan alat produksi dan distribusi ekonomi. Selain itu, pemerintah desa perlu menyerap nilai-nilai lokal dalam pembangunan ekonomi. Budaya lumbung, jimpitan, dan lain-lain merupakan strategi informal yang sudah tertanam di berbagai daerah di Indonesia.

Dalam situasi seperti sekarang, ketika pandemi Covid-19 meluluhlantakkan ekonomi bangsa ini yang sebagian besar berpusat di perkotaan, sistem ekonomi desa yang berasas Pancasila kini sedang jadi sandaran banyak orang Indonesia. Kegagalan ekonomi pasar bebas kali ini kiranya membuat banyak yang sadar bahwa bangsa ini sudah cara untuk menyejahterakan semua, bukan segelintir saja. []



## Profil Penulis

Pria kelahiran Ponorogo ini meraih gelar sarjana dari Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, tahun 1996. Setahun kemudian, ia menjadi dosen di sana. Lalu melanjutkan studi magister dan doktoral di University of Goettingen, Jerman, atas beasiswa GTZ dan DAAD. Sepanjang mengabdikan pada almamaternya, ia dipercaya sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi (2007-2009) dan Pembantu Dekan I (2009-2010).

Ia merupakan Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi (2018-2019). Pernah menjabat di lingkup Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, yaitu sebagai Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa pada tahun 2017 dan Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan pada 2017-2018. Di lingkup lain, ia anggota Dewan Nasional FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) dan BSBI (Badan Supervisi Bank Indonesia). Lalu sebagai Direktur Eksekutif INDEF (Institute for Development of Economics and Finance), Jakarta (2008-2015) dan Ketua Focus Group Ekonomi Kreatif PP ISEI (2016-2019).





# Peta Jalan Revitalisasi BUMDes<sup>1</sup> Menguatkan Lokalitas dan Membangun Ekonomi Berbasis Digital

*Rudy Suryanto*

**D**alam memandang desa, banyak dari kita sering memakai cara pandang bias kota. Saya sendiri lebih menyebutnya bias Jakarta, sebab dari Jakarta-lah terutama cara pandang yang

---

1. Disarikan oleh Ageng Indra

cenderung melihat desa sebagai terbelakang ini dipercaya dan dianggap pas oleh banyak kalangan.

Berdasarkan teori *black swan*, dahulu orang percaya bahwa semua angsa berwarna putih, sampai kemudian pelayar dari Inggris menemukan satu angsa berwarna hitam ketika berlabuh di Australia. Fenomena angsa hitam ini memperlihatkan bahwa keganjilan bisa menjadi momentum untuk memeriksa kembali keyakinan kita yang selama ini hanya berdasarkan pada apa yang kita lihat.

Masa pandemi ini sebetulnya suatu momentum untuk melihat dengan kacamata lain. Bagi saya, kondisi sangat tidak biasa ini telah menampakkan keganjilan-keganjilan yang memperlihatkan bahwa masa sebelum kenormalan baru ini sebetulnya juga adalah masa yang tidak normal.

## **Ketidaknormalan Desa Sebelum Pandemi**

Sebelum Indonesia sebagai negara atau kerajaan-kerajaan nusantara berdiri, desa sudah lebih dulu ada. Sedari dulu setidaknya selalu ada dua karakteristik yang menentukan jati diri desa, yaitu *desa mencukupi kebutuhan sendiri* dan *desa mengatur urusannya sendiri*. Maka semisal ada kasus pencurian ayam, masalah akan diselesaikan secara adat. Kalau masalah tidak bisa selesai di tingkat desa, baru diselesaikan ke tingkat yang lebih tinggi.

Karakteristik ini masih bertahan bahkan pada zaman penjajahan Belanda: selama membayar pajak, desa boleh memilih kepala desa



sendiri dan membuat hukum adat sendiri. Setelah Indonesia merdeka pun pemerintah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 mengakui bahwa desa mempunyai kewenangan sendiri. Normal bagi desa adalah mengurus dirinya sendiri.

Namun, kenormalan ini tidak banyak kita lihat sebelum pandemi karena selama 30 tahun lebih desa memang tidak berada dalam kenormalan. Memasuki zaman Orde Baru, desa sekadar dijadikan administratif yang hanya diharuskan mengikuti arahan pusat atau yang di atasnya, termasuk dalam urusan yang sebenarnya bisa ditangani sendiri. Dengan dicabutnya kemandirian desa, banyak inisiatif atau potensi tak mendapat tempat untuk berkembang di desa.

Ketidaknormalan seperti dalam hal pangan, misalnya, bisa kita temukan contohnya pada warung-warung tradisional di desa yang 90 persen dagangannya kini berupa barang pabrikan. Dalam kasus desa penghasil singkong, misalnya, satu truk singkong dibawa ke pabrik untuk diolah jadi makanan *snack*. Singkong satu truk itu hanya akan kembali ke warung-warung desa sebagai beberapa bungkus keripik yang kemudian dibeli anak-anak petani singkong juga. Kapan desa akan kaya kalau 90 persen uangnya keluar dari desa? Kalau uang yang keluar dari desa lebih sedikit dari yang masuk?

Normal baru desa, dengan demikian, adalah mengembalikan kenormalan desa, yaitu desa mencukupi diri sendiri dengan memakan yang ditanam warganya sendiri. Jadi, kalau orang Papua makan sagu, yang mereka tanam adalah sagu; kalau orang Gorontalo



makan jagung, yang mereka tanam adalah jagung. Jangan semua disuruh makan nasi. Itu tidak normal.

Oleh karena itu, amanah terpenting Undang-Undang Desa bukanlah negara memberikan 1 miliar kepada desa, melainkan asas rekognisi (negara mengembalikan pengakuan bahwa desa sudah ada dan mampu) dan asas subsidialitas (apa yang desa mampu seharusnya tidak diatur pemerintah di atasnya). Semangat Undang-Undang Desa adalah mengembalikan jati diri desa sebagai *self governing community* atau komunitas yang mengurus dirinya sendiri.

## **BUMDes sebagai Instrumen Kemerdekaan Desa**

Badan Usaha Milik Desa (atau diakronimkan menjadi BUMDes) adalah salah satu instrumen desa yang secara konsep bisa diandalkan untuk mewadahi semangat tersebut. Sebagai wadah, isi BUMDes adalah kegiatan usaha kolektif yang dilakukan masyarakat. Kepengurusan BUMDes dijalankan oleh pemerintah dan masyarakat setempat dan produknya menyesuaikan potensi dan kebutuhan desa. Dengan demikian, prinsip BUMDes sesuai dengan UU Desa No.6 2014 bahwa desa berhak memiliki kewenangan mengatur wilayahnya, potensinya, dan penduduknya untuk kesejahteraan warganya.

Proporsi pengurus BUMDes—60 persen pemerintah desa dan 40 persen masyarakat—menurut saya juga merupakan kondisi yang ideal, terutama di daerah yang skala produksi masyarakatnya belum



tinggi dan modalnya kecil sehingga perlu dorongan pemerintah. Bila mengacu konsep *third space* yang muncul di Eropa (sektor privat, sektor publik, dan sektor ketiga yang jadi ruang tengah) maka bisa dikatakan BUMDes adalah ruang tengah.

Problemnya, desa sudah begitu lama disudutkan dan dijadikan tidak mampu untuk mengatur dan menentukan hidupnya sendiri. Ketika desa diberi kedaulatan, wewenang, dan kelonggaran, ada banyak ketakutan baik secara internal maupun eksternal kalau hal-hal tersebut tidak dimanfaatkan. Saya menyebut ketakutan itu sebagai kerangkeng besi, dari istilah *irongates* pada teori institusionalisasi. Kerangkeng itu mesti dibongkar. Dan salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan teknologi digital.

*Bumdes.id* adalah sebuah *platform* digital yang mencoba membantu menumbuhkan, menguatkan, dan mengembangkan BUMDes di seluruh Indonesia. *Platform* ini bisa dikatakan lahir dari Kampung Mataraman sebagai tindak lanjut dari Rembuk Desa Nasional tahun 2017 yang mengundang 60.000 kepala desa. Dalam pertemuan tersebut tercetus Piagam Panggunharjo yang salah satu poinnya ialah mengembangkan ekonomi desa melalui BUMDes. *Bumdes.id* diinisiasi dan dikelola oleh Syncore Indonesia bekerja sama dan didukung komunitas ABCGFM (Acamedics, BUMDes, Community Government, Financial/Business, Media).

Sebelum menjadi Founder *Bumdes.id*, saya sendiri berkecimpung di dunia yang sangat lain. Saya juga berasal dari desa, tetapi sebelumnya saya seorang auditor di beberapa *public accounting*



*firm*. Saya mulai masuk dalam “wilayah” ini ketika suatu hari, guru saya, Prof. Gunawan Sumodiningrat, mengajak saya keliling desa. Karena sama-sama memiliki latar belakang keilmuan teknologi informasi, kami membayangkan bagaimana bisnis digital dan desa bisa terkoneksi. Kami menyebut ini sebagai *social enterprise*: menyelesaikan masalah-masalah sosial dengan pendekatan bisnis dan teknologi digital. Kami percaya BUMDes sesuai dengan amanat dari pasal 33, yaitu dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat.

Fokus kami adalah revitalisasi BUMDes. Oleh karena itu, pendekatan pertama adalah melakukan cek kesehatan usaha BUMDes. Fase berikutnya meliputi membangun kesadaran, memetakan potensi lokal, menyusun rencana usaha, dan yang terpenting membangun kepercayaan transparansi publik dengan adanya perangkat lunak akuntansi yang mudah digunakan dan diakses. Ini memerlukan usaha kolektif dan usaha kolektif memerlukan wadah yang kuat agar berjalan.

## **Desa-Desa Angsa Hitam di Masa Pandemi**

Seperti saya sebut sebelumnya, masa pandemi telah memperlihatkan keganjilan-keganjilan yang tidak sesuai dengan cara pandang bias kota. Di Panggunharjo, contohnya, sebuah desa membuat Panggung Tanggap Covid-19 dan cepat mengkonsolidasi membuat *pasardesa.id*. Kenapa desa dengan keterbatasan sumber daya bisa merespons lebih baik dari kota? Memakai perspektif angsa



hitam, kami bertanya: kalau Panggunharjo ini bisa, kenapa 74.452 desa yang lain tidak bisa?

Maka kami mencari angsa-angsa hitam lain dan bersyukur menemukan banyak desa yang mampu merespons Covid-19 dengan sangat baik, seperti di Ende, Tebara, dan Papua Barat. Di Ende, misalnya, suatu unit usaha hanya mengandalkan *WhatsApp* untuk menjual sayur dan pendapatan mengalir sampai 39 juta. Mereka pun kemudian menjangkau kabupaten lain dengan bantuan *reseller*. Ini lompatan yang sebelumnya tidak akan bisa ditemui bila orang tidak memakai teknologi.

Sayangnya mereka tenggelam oleh berita lain tentang desa, seperti tertangkapnya kepala desa, *money politic*, dan sebagainya. Padahal, temuan semacam ini penting untuk diangkat karena bisa menentukan arah tatanan baru nantinya.

Salah satu temuan menarik adalah tidak semua desa terkena dampak negatif pandemi. Desa yang fokus pada basis produksi pangan justru untung. BUMDes yang fokus menjual barang pokok justru untung. Mereka yang mendapat berkah dari kondisi ini adalah mereka yang fokus menyediakan bahan pokok dan bisa melakukan penjualan secara digital.

Pariwisata di desa punya potensi besar, tetapi tidak untuk dikembangkan dalam dua tahun ini. Virus ini akan lama dan akan bermutasi. Bahkan ketika nanti ditemukan vaksinnnya, kalau *stream*-nya berubah, vaksin pun berubah. Artinya, kita perlu menyiapkan diri untuk jangka waktu lama. Dalam jangka waktu lama, yang pasti



adalah pangan. Untuk beras, misalnya, Thailand dan Vietnam tidak akan mengekspor produksi beras mereka akhir tahun ini. Artinya, kita punya waktu 6 bulan untuk memobilisasi semua sumber daya agar kebutuhan pangan terus terjaga.

Oleh karena itu, saran saya untuk BUMDes ialah *back to basic*: kembali ke tanam apa yang kita makan, makan apa yang kita tanam, sedang unit usaha lain jadi pendukung. Fokusnya adalah mengamankan pangan. Itu jelas akan menjadi bisnis yang bertahan lama.

## **Fakta di Lapangan dan Momentum untuk Melampauinya**

Saat tulisan ini dibuat, *bumdes.id* telah bersepakat dengan 635 BUMDes melatih 2635 alumni dan mentoring 45 MoU kerja sama. Di *bumdes.id* juga udah mulai terpeta akumulasi keuntungan mencapai 169 miliar. Dan ini luar biasa karena faktanya baru sekira 10 persen BUMDes yang beroperasi dengan lancar di Indonesia.

Ada sejumlah faktor yang menyebabkan tidak berjalannya 90 persen BUMDes. Pertama, BUMDes tidak didukung Kepala Desa. Kenapa? Karena beberapa curiga ketua BUMDes mengincar posisi kepala desa. Kecurigaan ini didukung banyaknya ketua BUMDes mencalonkan diri menjadi kepala desa dan menang—saya tidak tahu harus senang atau sedih soal ini. Kedua, ketika BUMDes berdiri, aliran dana yang masuk ke kantong kepala desa dan lini lainnya



berkurang. Sebagai orang berlatar bisnis, bagi saya ini hanya masalah matematika pembagian saja sehingga sebetulnya bukan masalah pelik—tinggal bagaimana masing-masing dapat bagian karena fakta di lapangan aktor-aktor ini sudah ada dulu. Ketiga, mayoritas BUMDes dibentuk hanya untuk memenuhi aturan atau karena titipan. Sehingga tidak heran pemetaan profesinya kurang kuat dan BUMDes tidak bertahan.

Faktor-faktor tersebut mestinya bisa diatasi karena bukan saja BUMDes sekarang menjadi kebutuhan, tetapi juga desa memperoleh momentum karena negara tengah membutuhkan pangan. Tentu desa masih harus menghadapi kerangkeng besi lain, yaitu birokratisasi. Ini cukup menghambat karena sekalipun mendapat dana desa, tetap ada pesanan dari atas yang bisa membuat mendadak rugi. Perencanaan yang matang, misalnya, bisa gagal karena ada tuntutan BLT.

Maka usul saya: *Pertama*, 60 persen anggaran dikunci untuk kebutuhan struktural, sedang 40 persen dibiarkan fleksibel untuk desa. *Kedua*, digital hanya cara. Kalau desa tidak punya produk dan basis produksi, dia hanya akan jadi pasar begitu terkoneksi dengan digital. *Ketiga*, tidak bisa tanpa pendampingan terus-menerus. Esensi pembangunan adalah membangun manusia. Pembangunan kita sangat sering membangun bangunan maupun lembaga, tetapi jarang membangun manusia itu sendiri.[]

## **Profil Penulis**

Ia menyelesaikan S-2 di Universitas Melbourne. Staf pengajar di UMY yang pernah menjadi senior auditor di Price Waterhouse Cooper dan Ernst & Young ini juga menjadi Kepala Business and Accounting Innovation Center (BAIC), Sekretaris Asosiasi Konsultan Keuangan Mitra Bank DIY, dan Senior Partner di Syncore Consulting & System. Ia adalah penggagas *bumdes.id* dan Sekolah Manajemen BUMDes & KEJARUMKM.





# SONJO (Sambatan Jogja): Revitalisasi Gotong Royong Berbasis Daring<sup>1</sup>

*Rimawan Pradiptyo, Ph.D. dan Luluk Lusiantoro, Ph.D.*

## Pendahuluan

**B**erbagai rutinitas dan kebiasaan yang kita jalani semenjak kita lahir mendadak tercerabut dengan cepat akibat pandemi Covid-19. Kebiasaan bersalaman ketika bertemu teman/kolega,

1. Penulis ucapkan terima kasih yang tidak berhingga kepada semua anggota SONJO yang tetap semangat bergerak bersama di SONJO. Tulisan ini tentu tidak akan pernah ada tanpa kontribusi aktif dari semua anggota SONJO terhadap berbagai program di SONJO. Semua kesalahan dan ketidakkakuratan di artikel ini adalah tanggung jawab pengarang.

rapat-rapat koordinasi di kantor-kantor, tradisi perhelatan pernikahan dengan ratusan bahkan ribuan tamu, dan penumpang yang berdesak-desakan di moda transportasi umum seketika hilang. Jalanan lengang, sekolah, kampus dan kantor tutup, bioskop-bioskop tutup, sebagian mal tutup dan walaupun buka mereka sepi dari pengunjung.

Pandemi Covid-19 seketika mengubah lanskap perekonomian dunia dan bagaimana orang sedunia dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Perdagangan antarnegara dan mobilitas manusia antarnegara mengalami penurunan drastis karena tiap negara cenderung untuk menutup diri dari lalu lintas barang dan manusia dari negara lain. Mobilitas barang dan manusia antarwilayah pun mengalami gangguan, terlebih di negara kepulauan yang luas, seperti Indonesia. Perekonomian dunia cenderung menjadi autarki (tiap negara menutup diri), baik bagi arus barang dan jasa maupun mobilitas manusia.

Kini kita semua terpaksa melakukan aktivitas dari rumah atau *working from home* (WFH). Di masa pandemi adalah kebutuhan bagi kita bersama untuk menerapkan protokol Covid-19 ini. Bahwa tidak ada yang suka melakukan protokol Covid-19, terlebih harus melakukan WFH itu adalah hal yang wajar. Namun demikian, kita tidak memiliki alternatif selain melakukan WFH, kecuali kita siap dengan konsekuensi terjangkit Covid-19 yang bahkan berisiko membawa kematian. Tentu saja tidak ada seorang pun yang siap dengan konsekuensi berat tersebut, dan kita pun bersama-sama



melakukan WFH, meskipun skema yang kita lakukan jauh lebih longgar dibandingkan apa yang dilakukan di negara-negara lain.

Perubahan mendadak di atas bukan diakibatkan oleh perang dunia ataupun krisis ekonomi yang melanda dunia. Pandemi adalah *public enemy* atau beban bagi kita semua tanpa kecuali. Sebagai *public enemy* atau musuh bersama masyarakat, pandemi bersifat seperti barang publik, yaitu *nonrival* dan *nonexcludable*. Pandemi beserta seluruh dampaknya membebani masyarakat tanpa kecuali dan perilaku masyarakat yang tidak mengindahkan protokol Covid-19 akan menciptakan eksternalitas negatif bagi anggota masyarakat yang lain.

Semua perubahan di atas adalah dampak dari pandemi Covid-19, lawan yang tidak bisa dilihat oleh mata karena ukurannya sangat kecil. Namun demikian, ketika Covid-19 menjangkiti warga, intervensi kesehatan untuk menangani warga yang sakit membutuhkan sumber daya yang demikian besar. Hingga saat ini belum ada obat anti-Covid-19 yang ditemukan, demikian pula dengan vaksin. Para epidemiolog sepakat bahwa walaupun vaksin berhasil ditemukan, diperlukan minimal waktu 2 tahun ke depan untuk mengembangkan vaksin hingga aman digunakan oleh manusia.

Pertanyaan yang mengemuka kemudian adalah bagaimana kita mampu bertahan dalam kondisi seperti ini untuk 2-3 tahun mendatang? Tentu saja beban ini tidak dapat sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah. Pemerintah negara manapun akan



berat menanggung beban penanggulangan Covid-19 beserta dampaknya. Tidak ada keuangan pemerintah di negara yang akan sanggup menanggung beban dampak pandemi ini selama 2-3 tahun ke depan.

Membangun modal sosial dan merangkul masyarakat agar memobilisasi sumber daya untuk bersama-sama pemerintah menanggulangi Covid-19 beserta dampaknya adalah satu-satunya opsi yang mungkin ditempuh dalam 2-3 tahun ke depan. Sebagian masyarakat mengira bahwa strategi dominan bagi masyarakat adalah menunggu uluran tangan pemerintah. Namun demikian, perlu disadari bahwa pemerintah, dari pusat hingga daerah, memiliki cakupan pekerjaan yang luas. Di sisi lain, berbagai aspek administratif birokrasi menyebabkan pergerakan dari pemerintah tidak secepat yang diinginkan oleh warga. Pada titik inilah penting dipikirkan membentuk *self-help group* atau gerakan kemanusiaan mandiri untuk saling tolong-menolong di antara warga masyarakat.

## **Benarkah Kita Menghadapi Badai di Tengah Laut?**

Konsekuensi dari WFH panjang dan belum pernah terpikirkan sebelumnya. Seorang selebritas di Indonesia melalui akun medsosnya membacakan surat yang beliau terima dari rekannya di Hongkong. Warga di Hongkong melukiskan kondisi di masa pandemi ini seperti kapal-kapal di tengah laut yang terombang-ambing badai. Kapal-kapal mengalami badai yang sama, tetapi ukuran dan kemampuan kapal dalam menghadapi badai tentu berbeda. Karena metaforanya



adalah badai di tengah laut, tidak mungkin bagi kapal-kapal tersebut bekerja sama. Kapal yang kecil akan karam terlebih dahulu diterjang ombak dan hanya kapal-kapal sedang dan besar saja yang akan bertahan. Inti pesan dari surat tersebut adalah perbedaan kemampuan bertahan terhadap badai antarwarga.

Pesan tersebut menjadi viral di media sosial dan bahkan ada yang membuat posternya. Poster badai di tengah laut itu membuat saya tercenung. Benak saya berpikir: kita menghadapi badai mungkin adalah benar, tetapi apakah kita menghadapi badai tersebut di tengah laut? Bagaimana kalau kita ganti kapal dengan rumah dan kita ganti laut dengan daratan, lingkungan tempat tinggal kita sehari-hari? Mengapa saya mempertanyakan untuk mengganti laut dengan darat dan mengganti kapal dengan rumah? Bukankah faktanya kita hidup di daratan dan tidak di kapal? Ketika terjadi badai di tengah laut, mustahil ada kapal mau saling membantu meski berdekatan. Namun, jika badai terjadi di darat, dua atau lebih rumah tangga mungkin akan dapat saling membantu.

Kondisi saat WFH menunjukkan bahwa masing-masing dari kita terpaksa tidak melakukan aktivitas di luar rumah. Itu artinya tiap rumah tangga terkungkung di rumah masing-masing, meskipun ada badai pandemi yang menyerang aspek kesehatan dan mengubah seluruh tatanan sosial-ekonomi masyarakat. Tentu saja seluruh kegiatan ekonomi konvensional yang berbasis transaksi secara fisik terganggu. Hubungan sosial pun yang sebelum pandemi mengandalkan komunikasi secara langsung sekarang harus dilakukan



melalui gadget—WhatsApp (WA), medsos, maupun komunikasi daring.

Pandemi menciptakan kontraksi ekonomi yang hebat dan di saat yang bersamaan terjadi tekanan yang demikian besar ke sistem kesehatan. Pola kerja sama dan gotong royong yang selama ini kita kenal berbasis pada aktivitas fisik tentu tidak dapat dilakukan karena tidak sesuai dengan protokol Covid-19. Tantangan yang mengemuka adalah penurunan pendapatan atau bahkan hilangnya pendapatan akibat WFH, terutama dari para pekerja informal. Tantangan lain adalah ketidakcukupan APD dan alkes bagi para pekerja medis yang berada di garda depan. Tantangan di sektor pendidikan tidak kalah kompleks terutama bagi pendidikan dasar dan menengah yang terpaksa harus menyelenggarakan pendidikan daring.

## **Sambatan Berbasis Daring**

Hampir semua elemen masyarakat sipil menyadari perlunya bekerja sama di masa sulit seperti ini. Namun, ketika kerja sama dan gotong royong secara fisik tidak dimungkinkan, meskipun sangat diperlukan, lalu bagaimana cara melakukan gotong royog secara daring? Media apa yang tepat digunakan untuk bekerja sama?

Di sinilah kita perlu melihat perilaku masyarakat dalam memanfaatkan teknologi komunikasi dan relasinya dengan pemahaman tentang hasrat masyarakat untuk saling menolong. Bahwa masyarakat Indonesia suka menolong orang lain, itu tidak



dapat dimungkiri. World Giving Index (WGI) 2019 menempatkan Indonesia sebagai negara peringkat pertama dalam hal masyarakatnya suka saling menolong. Meski demikian, tidak berarti bahwa di ketiga elemen indeks tersebut Indonesia menempati tingkat pertama. Tercatat di elemen donasi uang Indonesia berada di peringkat keenam dan elemen bekerja sukarela Indonesia menempati peringkat ketujuh. Namun demikian, elemen membantu orang yang tidak dikenal, Indonesia bahkan tidak termasuk di peringkat 20 besar dunia. Hal ini konsisten dengan hasil eksperimen yang kami lakukan untuk mengukur *tacit cooperation* (Pradipto, Sasmita dan Sahadewo, 2010) dan keinginan berkontribusi di *public goods game* dengan pengenalan wajah (Pradipto dan Wibisana, 2017).

Fakta lain menunjukkan bahwa orang Indonesia cenderung mengalokasikan waktu yang cukup panjang dalam berkomunikasi secara daring. Laporan Digital Indonesia 2019 menunjukkan bahwa rata-rata penggunaan internet melalui berbagai alat rata-rata adalah 8 jam 36 menit/hari dan rata-rata penggunaan medsos adalah 3 jam 26 menit/hari. Pengamatan pribadi menunjukkan bahwa orang Indonesia cenderung menggunakan WA sebagai alat komunikasi. Benar sudah ada aplikasi lain selain WA, seperti Telegram/ Signal/ Vibes, tetapi fakta menunjukkan WA adalah *platform* komunikasi paling favorit yang digunakan oleh masyarakat Indonesia. Terdapat kecenderungan pula masyarakat Indonesia cenderung responsif membalas pesan WA. Ini berbeda, misalnya, dibandingkan dengan masyarakat di Eropa. Pengamatan pribadi penulis menunjukkan



orang-orang di Eropa cenderung lama dalam membalas WA dibandingkan dengan orang-orang di Indonesia.

## Gotong Royong Daring

Didasarkan pada fakta di atas, SONJO (Sambatan Jogja) dibentuk pada 24 Maret 2020 dengan WAG sebagai media komunikasi utama. SONJO adalah gerakan kemanusiaan yang dibentuk oleh elemen masyarakat sipil di DIY yang berupaya membantu anggota masyarakat yang rentan dan berisiko terdampak pandemi Covid-19 di DIY. Meski menjadi gerakan kemanusiaan yang bersifat informal, tetapi SONJO tetaplah sebuah organisasi. Misi SONJO dalam hal ini adalah membantu masyarakat rentan dan berisiko terdampak pandemi Covid-19 di DIY.

Sebagai gerakan kemanusiaan yang didasarkan pada semangat gotong royong anggotanya, prinsip yang dikembangkan di SONJO adalah transparansi, empati, solidaritas, dan gotong royong. Gerakan kemanusiaan seperti SONJO adalah gerakan yang didasarkan pada kepercayaan. Untuk mendapatkan kepercayaan dari anggota dan masyarakat, seluruh kegiatan di SONJO didasarkan pada transparansi, integritas, dan fokus pada pencapaian *outcome*. Hanya dengan secara konsisten menjunjung tinggi transparansi, integritas, dan fokus ke pencapaian *outcome*, kepercayaan terhadap SONJO akan dapat dijaga sehingga partisipasi anggota diharapkan akan optimum.



SONJO pada dasarnya hanyalah media untuk berkomunikasi dan berkoordinasi antar elemen masyarakat sipil untuk saling membantu. Pada awal pendiriannya SONJO hanya terdiri dari 1 WAG, tetapi hingga 17 April 2020 telah terbentuk 7 WAG di SONJO. Pada tanggal 22 Juni 2020, terbentuklah WAG SONJO Pendidikan yang merupakan WAG ke-9 yang terbentuk di SONJO. Tercatat lebih dari 500 anggota yang tergabung dalam WAG SONJO dan mereka berasal dari berbagai kalangan masyarakat sipil, tidak terkecuali para birokrat dan anggota DPRD.

Mengapa SONJO didasarkan pada konsep sambatan? Sambatan adalah bentuk gotong royong yang tumbuh di daerah pedesaan di Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur yang marak hingga akhir 1990-an. Sambatan umumnya dilakukan untuk membangun rumah warga dan dilakukan secara bergiliran, meski tidak ada jadwal tertentu. Orang yang ingin memperbaiki/ membangun rumah, mengumpulkan material bangunan, mengundang para tetangga untuk membantu memperbaiki/ membangun rumah. Selama dua-tiga hari, para tetangga meninggalkan pekerjaan utamanya dan mendedikasikan waktu tersebut untuk bekerja bakti membangun rumah tadi. Sebagai kompensasi si empunya rumah menyediakan kopi/teh, makanan kecil, makan siang, dan rokok. Pola ini kemudian dapat dilakukan kepada tetangga yang lain secara bergiliran.

Sambatan ataupun bentuk gotong royong lain adalah salah satu upaya untuk mengatasi kelangkaan modal di masyarakat. Masyarakat memiliki waktu dan tenaga, sementara bahan bangunan sederhana

sebagian disediakan oleh alam di lingkungan sekitar. Sambatan dilakukan untuk mentransformasi tenaga kerja dan waktu menjadi modal. Konsep ini pulalah yang kemudian digunakan di SONJO. Perbedaannya dengan konsep sambatan konvensional adalah pada pemanfaatan *platform* media sosial sebagai media koordinasi dan bergotong royong.

Mengapa gerakan ini diberi nama *sonjo*? Dalam Bahasa Jawa *sonjo* berarti adalah silaturahmi atau bertamu ke rumah tetangga/kerabat. Semangat silaturahmi dan interaksi informal berusaha tetap dijaga di SONJO karena justru dengan sifat gerakan yang informal itulah SONJO mampu bergerak secara lincah dan fokus ke pencapaian *outcomes*. Tidak diperlukan berbagai keperluan administrasi di SONJO sehingga berbagai program kerja yang dibangun dapat difokuskan langsung untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Pembelajaran dari laboratorium eksperimen tentang *double auction* menunjukkan bahwa ketika banyak orang berkumpul dalam suatu media maka setiap orang pasti memiliki banyak kebutuhan, tetapi di saat bersamaan memiliki hal yang dibutuhkan orang lain. Mekanisme tersebut akan menciptakan permintaan dan penawaran untuk berbagai macam hal. Jika di pasar fisik pertemuan permintaan dan penawaran di pasar fisik luluh lantak akibat Covid-19 maka pasar daring dapat dibuat untuk mengalihkan interaksi permintaan dan penawaran tersebut.



Dalam interaksi antarelemen masyarakat di WAG SONJO, di satu sisi akan memunculkan berbagai problem yang dihadapi oleh para anggota. Namun disisi lain, silaturahmi tersebut juga akan menghadirkan potensi pemecahan masalah atas berbagai problem yang dihadapi oleh para anggota tersebut. Selama sebulan lebih di awal pendirian SONJO, penulis membuat notulensi dari hasil diskusi di WAG setiap malam. Pada jam 23.00 notulensi diskusi disebarkan di WAG dengan konsensus penggunaan *font* merah untuk masalah yang teridentifikasi, tetapi belum terselesaikan, *font* hijau untuk masalah yang muncul dan sudah ada tanggapan dari anggota lain untuk diselesaikan, dan *font* biru untuk masalah yang telah terselesaikan bersama. Di minggu pertama, notulensi didominasi warna merah, yang artinya begitu banyak masalah yang diungkapkan para anggota. Namun, menginjak akhir minggu kedua, *font* hijau mulai meningkat dan tercatat ada 1-2 masalah yang telah tertulis dengan *font* biru. Di akhir minggu keempat, mayoritas notulensi hanyalah *font* hitam dan *font* biru, yang artinya banyak masalah telah terselesaikan.

## **Pengelolaan Program di SONJO**

Meskipun SONJO adalah organisasi informal, tetapi penting untuk mengelola organisasi seperti SONJO sesuai dengan tata kelola lembaga yang baik. Pembagian kerja di SONJO didasarkan pada WAG. Terdapat 9 WAG di SONJO, dengan 1 WAG berperan sebagai pusat koordinasi (SONJO HQ) dan 5 WAG teknis di bidang



pangan/UMK (2 WAG), kesehatan (SONJO Legawa), pendidikan (SONJO Pendidikan), inovasi (SONJO Inovasi) dan jejaring (SONJO Pembelajaran). Terdapat 2 WAG lain sebagai pendukung, yaitu SONJO Media dan SONJO Database.

Deskripsi singkat terkait dengan ke-9 WAG di SONJO adalah sebagai berikut:

- SONJO HQ (pusat koordinasi) adalah WAG pertama sejak ketika SONJO terbentuk;
- SONJO Pangan I; WAG ini terbentuk sejak 27 Maret 2020 dan fokus pada upaya mengatasi masalah ketahanan pangan di DIY;
- SONJO Pangan II; WAG ini adalah perluasan dari WAG SONJO Pangan I karena jumlah peserta di SONJO Pangan I telah mencapai maksimal (256 orang) dan WAG ini dibentuk sejak 20 Juni 2020.
- SONJO Legawa fokus pada penyaluran bantuan logistik kepada kelompok rentan dan berisiko (tenaga medis dan pasien). SONJO Legawa terbentuk sejak 29 Maret 2020 dan mempertemukan pihak RS/Puskesmas, lembaga-lembaga kemanusiaan (ZIS UGM, LazisNU, LazisMU, dan lain-lain), produsen APD/Alkes, donatur, dan juga inovator alkes.
- SONJO Inovasi. WAG ini dibentuk sejak 28 Maret 2020 dan terdiri dari para inovator pembuat alkes/APD ke dalam satu media. Para inovator tersebut membuat berbagai alat yang diperlukan untuk mengatasi penyebaran Covid-19.



- SONJO Media. WAG ini berisi para aktivis SONJO dan wartawan media massa. WAG yang dibentuk sejak 31 Maret 2020 ini digunakan sebagai media diseminasi informasi kepada para wartawan terkait dengan penanggulangan Covid-19 serta capaian yang telah dibuat oleh SONJO.
- SONJO Database. WAG ini adalah pusat informasi dan *database* SONJO. Di sini *database* dan poster-poster SONJO untuk keperluan diseminasi disusun dan didiskusikan sebelum kemudian disebar ke publik.

SONJO Pembelajaran. WAG ini dibentuk sejak 17 April 2020 dan mengakomodasi rekan-rekan dari luar DIY yang ingin membangun gerakan kemanusiaan serupa dengan SONJO di daerah mereka masing-masing. Hingga saat ini beberapa alumni SONJO Observer telah berhasil membangun gerakan kemanusiaan di daerah masing-masing, antara lain adalah:

Support System (Medan, Sumatra Utara)

NganTA (Tulung Agung, Jawa Timur)

GHS Bergerak (Magelang, Jawa Tengah)

SONGGO (Magelang, Jawa Tengah)

Lambung Amal Covid-19 (Jakarta)

- SONJO Pendidikan. WAG ini baru terbentuk sejak 22 Juni 2020 setelah SONJO Angkringan #10 yang mengangkat tema kompleksitas pengajaran daring di pendidikan dasar dan menengah. WAG ini fokus pada upaya mencari solusi bagi

menghadapi kendala pengajaran akibat pandemi Covid-19 khusus untuk pendidikan dasar dan menengah.

Untuk setiap WAG ditunjuk 3-5 orang koordinator yang bertugas untuk mengelola WAG serta mengawal beberapa program yang ada di tiap WAG. Keberadaan koordinator diperlukan untuk menjaga agar diskusi di WAG tetap fokus pada misi SONJO, yaitu membantu masyarakat rentan dan berisiko akibat Covid-19.

Hingga saat ini terdapat 8 program yang telah dan sedang dilakukan di SONJO. Program-program tersebut terdistribusi di beberapa WAG di SONJO. Program-program tersebut adalah sebagai berikut:

- *Database* SONJO Pangan berusaha mempertemukan antara permintaan dan penawaran di bidang pangan dan transaksi dialihkan ke media daring. *Database* ini terdiri dari: 726 UMK makanan/bahan pangan, 37 swalayan/toko daring, dan 216 pasar dan taman kuliner;
- SONJO Ngabuburit. Selama Ramadan para UMK di SONJO Pangan dipersilakan mengiklankan produknya dari jam 15.00-Maghrib. Iklan tersebut disebar oleh administrator ke WAG lain di SONJO. 10 hari menjelang Ramadan, iklan disebar di Twitter, dan tautan disebar ke FB dan IG SONJO.



- Etalase Pasar SONJO, kelanjutan dan perluasan dari SONJO Ngabuburit dan berbasis *progressive web app* [s.id/pasarsonjo](https://s.id/pasarsonjo) dan terbuka bagi UMK di bidang apa pun dan tidak ada biaya keikutsertaan;
- SONJO Migunani adalah program diseminasi keterampilan dalam memproduksi melalui video-video singkat dari, oleh, dan untuk anggota SONJO, terutama bagi UMK di SONJO pangan.
- SONJO Husada fokus pada upaya pemenuhan alkes dan logistik tenaga medis, pasien, dan keluarganya. Lembaga-lembaga kemanusiaan yang tergabung di program ini menerima donasi dari masyarakat. Kebutuhan alkes/APD dari RS/Puskesmas mengisi kebutuhan logistik di *website pedulicovid.site*. Program SONJO Husada ini menghubungkan antara donatur, lembaga kemanusiaan, RS/Puskesmas, dan pengusaha APD/alkes untuk memenuhi kebutuhan logistik di RS/Puskesmas.
- SONJO Angkringan adalah diskusi daring rutin setiap Minggu malam dan mengangkat tema-tema yang dihadapi para anggota SONJO.
- Pembuatan poster-poster untuk diseminasi informasi terkait dengan pencegahan penyebaran Covid-19 serta berbagai hasil-hasil inovasi alkes yang dihasilkan oleh para inovator.
- Mendukung inovasi produksi alat-alat kesehatan yang dilakukan oleh para inovator.

Seluruh capaian dari tiap-tiap program dicatat secara berkala sebagai bagian dari proses *monitoring. Living document* dalam bentuk PPT dibuat untuk mencatat perkembangan program-program di SONJO. Dokumen ini di-*update* setiap dua minggu sekali untuk memastikan berbagai perkembangan di SONJO tercatat dengan baik. *Website* SONJO yang semula menumpang di *gamabox.id/sonjo/* sedang dalam proses migrasi ke *SONJO.id*. Situs *SONJO.id* juga berfungsi sebagai media pencatatan berbagai capaian yang telah berhasil dilakukan SONJO.

Terlepas dari fakta bahwa SONJO apakah suatu organisasi bersifat formal maupun informal, ketika organisasi tersebut berkembang potensi *free riding, moral hazard, dan misinformation* sering kali terjadi. Untuk memitigasi risiko tersebut, SONJO membentuk Komite Kepatuhan untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan SONJO patuh terhadap semua ketentuan yang berlaku. Komite Kepatuhan terdiri dari lima anggota yang telah memiliki kompetensi dan reputasi panjang di bidang antikorupsi dan manajemen risiko, yaitu:

Prof. Sigit Riyanto, Ph.D. (FH-UGM)

Prof. Ova Emilia, Ph.D. (FK-KMK, UGM)

Wahyudi Anggoro Hadi, S.Farm. Apt. (Lurah Panggunharjo, Bantul)

BM Purwanto, Ph.D. (FEB, UGM)

Dr. Oce Madril (Pukat-FH-UGM)



Salah satu perhatian utama SONJO adalah aspek tata kelolanya. Meski SONJO merupakan gerakan informal, kepatuhan pada berbagai peraturan yang berlaku penting menjadi hal yang penting. Aspek kehati-hatian diterapkan dalam pengelolaan SONJO. SONJO tidak menerima donasi berupa uang mengingat SONJO bukanlah lembaga formal. Program SONJO Husada menerima donasi, tetapi demikian dana donasi langsung diterima oleh lembaga-lembaga kemanusiaan yang sudah resmi beroperasi. Semua program SONJO tidak berbayar, termasuk EPS dan juga *database* SONJO Pangan.

Perlu dicatat bahwa keberadaan SONJO tidak dapat dipisahkan dari konteks pandemi. Persoalan interaksi permintaan dan penawaran di pasar fisik akibat pandemi dan keinginan untuk mengalihkan pasar fisik ke pasar daring yang lebih sesuai dengan protokol Covid-19 akan terselesaikan jika biaya transaksi perpindahan dari pasar fisik ke pasar daring 0 rupiah. Proses perpindahan pasar bukanlah hal yang mudah mengingat para pelaku UMK di SONJO sebagian besar terbiasa melakukan transaksi secara fisik. Diperlukan proses pembelajaran agar mereka beralih dari transaksi fisik ke transaksi daring. SONJO menyediakan media pembelajaran bagi para pengusaha tersebut, mulai dari pembuatan poster digital, pemasaran di media social (WA/FB/IG/Twitter), hingga memfasilitasi iklan gratis di EPS. Diharapkan setelah para pengusaha sukses berkiprah di EPS, mereka bisa mulai menapaki jenjang ke *marketplace* yang lebih kompleks dengan jangkauan pasar yang lebih luas.

## Revitalisasi Gotong Royong

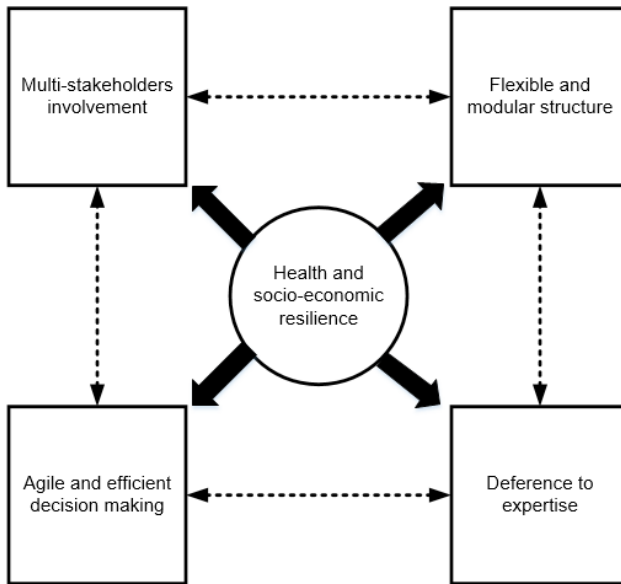
Kondisi yang tidak pasti dan berubah secara dinamis menuntut sebuah organisasi untuk melakukan inovasi dengan sangat cepat (*rapid innovation*). Menurut Kodama (2005), akselerasi proses inovasi dalam kondisi seperti ini dapat dilakukan dengan membangun dan mengaktifkan *strategic community*, di mana para anggotanya dapat saling belajar dan memahami nilai-nilai serta misi komunitas, menerapkan pengetahuan yang dibagikan di dalamnya, serta membangun jaringan dengan berbagai pihak eksternal. Dalam konteks pandemi dan organisasi *non-for-profit* yang independen seperti SONJO, *rapid innovation* terjadi secara lebih kompleks dan komprehensif.

SONJO menawarkan model *Rapid Social Innovation* (RSI) yang terdiri dari empat pilar yang saling mendukung dan berkaitan demi terciptanya masyarakat yang tangguh dalam menghadapi pandemi baik dari segi kesehatan maupun sosial ekonomi (lihat Gambar 1). Berikut penjelasan singkat dari empat pilar RSI tersebut.

*Multi-stakeholders Involvement.* SONJO bergerak bersama orang-orang dari berbagai macam kalangan yang memberikan sumbangsih informasi, pengetahuan, jaringan, maupun sumber daya lain yang dibutuhkan oleh masyarakat.

*Flexible and modular structure.* SONJO terdiri dari beberapa WAG yang mengikuti struktur modular sehingga mobilisasi pengetahuan sumber daya dapat dilakukan dengan fleksibel.





Gambar 1. Model *Rapid Social Innovation* SONJO dalam Merespons Pandemi Covid-19

*Agile and efficient decision making.* Dalam kondisi pandemi banyak keputusan yang harus segera diambil dengan mempertimbangkan urgensi dan *emergency* yang terjadi di lapangan. Moda komunikasi yang selama ini dilakukan SONJO memfasilitasi kebutuhan tersebut.

*Deference to expertise.* SONJO menghargai keahlian yang dimiliki oleh para anggota WAG. Berbagai macam masalah dipecahkan melalui konsultasi kepada para ahli yang mempunyai kompetensi untuk mendukung proses pengambilan keputusan.

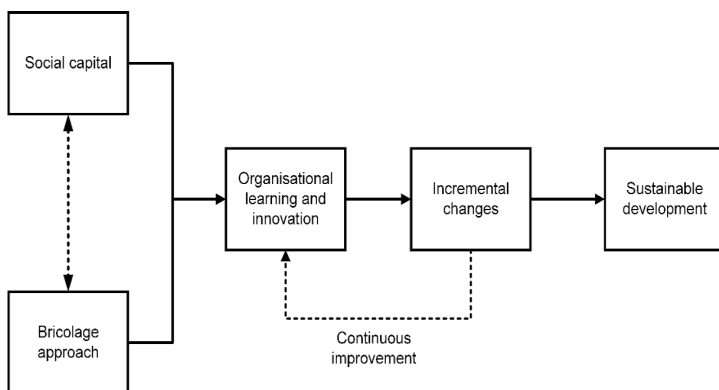
Hasil inovasi melalui pilar-pilar di atas diharapkan menjadi:

*Self-help group* bagi elemen masyarakat sipil di DIY untuk meminimalisasi dampak Covid-19 terhadap kelompok rentan dan berisiko terhadap Covid-19.

Model percontohan untuk gerakan kemanusiaan di daerah lain selama pandemi.

Model untuk meningkatkan keuletan masyarakat dalam menghadapi berbagai bencana yang timbul di masa datang.

## Aspek Keberlanjutan



Gambar 2. Model Keberlanjutan Pengembangan Organisasi SONJO

Sebagai gerakan sosial di masa pandemi yang belum pasti kapan berakhir, keberlanjutan organisasi menjadi salah satu kunci untuk menjaga kontribusi dan inovasi terus bergulir di tengah masyarakat

rentan yang membutuhkan bantuan. Keberlanjutan SONJO sebagai organisasi sosial tidak terlepas dari beberapa aspek penting yang membuat SONJO berbeda dengan organisasi sosial yang lainnya (lihat Gambar 2).

Dengan memegang prinsip bahwa kontribusi tidak boleh menjadi beban bagi orang yang mau berkontribusi, SONJO adalah modal sosial (*social capital*) dengan cara berpikir *bricolage* (lihat Hisrich *et al.*, 2013). Ini berarti bahwa setiap anggota WAG dapat berkontribusi dengan apa yang mereka punya dan/atau mereka bisa lakukan, menggunakan apa pun sumber daya yang tersedia di sekitar mereka (misalnya waktu, informasi, keahlian, keterampilan, jaringan, pendanaan pribadi, dan sebagainya).

Dengan cara berpikir ini, SONJO berhasil mengubah modal sosial dan berbagai sumber daya yang melekat di dalamnya menjadi bahan pembelajaran dan inovasi antarsesama anggota WAG. Melalui berbagai aktivitas yang terkoordinasi dan perbaikan secara berkelanjutan, proses pembelajaran dan inovasi tersebut telah mampu menciptakan berbagai macam perubahan kecil (lihat Smith, 2012; Newman, 2007) yang terakumulasi menjadi solusi-solusi yang bermanfaat untuk para anggota WAG dan masyarakat yang membutuhkan. Hal inilah yang menjadikan anggota-anggota SONJO *engaged* dan aktif berkontribusi menjaga keberlanjutan organisasi hingga saat ini.[]



## Profil Penulis

**Rimawan Pradipto, Ph.D.** meraih gelar sarjananya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Lalu, melanjutkan S-2 dan S-3 di University of York, Inggris. Sejak 1994 ia menjadi dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Selain mengajar, Rimawan bergabung di organisasi profesional Indonesian Economist Association (ISEI) dan Game Theory Association. Ia juga aktif menulis buku dan jurnal seputar topik korupsi sumber daya alam, asuransi, hingga Corporate Social Responsibility (CSR).

Selain itu, ia pernah menduduki berbagai jabatan di lembaga swasta maupun pemerintah. Seperti Komisioner PT Asuransi Jasa Indonesia Persero dan Ketua Komite Transparansi Bisnis Kementerian BUMN (2017-2020). Lalu, sebagai narasumber Gugus Tugas Pencegahan Penangkapan Ikan Ilegal Kementerian Kelautan dan Perikanan (2016-2018) dan Komisioner PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko sejak 2015 hingga sekarang.

**Luluk Lusiantoro, Ph.D.** mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM pada 2012, ia menyelesaikan studi S-2 di Cranfield School of Management pada 2015 dan menuntaskan studi doktoralnya di kampus yang sama. Kini ia mengajar di jurusan Manajemen UGM.





## **Terobosan Model Bisnis untuk Petani Gurem di Pedesaan**

*Dewi Hutabarat*

**D**alam beberapa kesempatan berbicara tentang pertanian dan pangan, Presiden Joko Widodo menyampaikan keprihatinannya terhadap alat-alat pertanian dan proses pascapanen yang masih ketinggalan dan jauh dari modern. Kedua hal itu yang menyebabkan rendahnya produktivitas petani sehingga mereka masih tidak kunjung sejahtera hingga hari ini. Ada 93 persen petani kita yang berstatus

petani gurem atau sekitar 40-an juta orang di mana mereka menyuplai 90 persen dari kebutuhan pangan kita.

Menurut Presiden Joko Widodo, kita perlu “memodernisasi agrikultur Indonesia,” mulai dari proses produksi sampai pengemasan dan *branding*. Modernisasi (teknologi) pertanian diyakini akan membantu mengejar ketertinggalan kita dengan negara-negara lain dalam pembangunan industri agrikultur. Presiden menjanjikan akan membicarakannya dengan para pengusaha pertanian, perbankan, dan Kementerian Pertanian dalam rangka mencari cara menjembatani kebutuhan modal finansial untuk penyediaan teknologi bagi para petani.

Namun, apakah betul modernisasi teknologi pertanian dapat secara efektif meningkatkan kesejahteraan petani gurem kita? Atau jangan-jangan pertanian modern yang padat modal itu hanya akan lagi-lagi menguntungkan para pemilik modal sebagaimana *business as usual*?

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas kita perlu melihat lebih dekat bagaimana biasanya usaha di bidang produksi pertanian pangan ini berlangsung. Di mana posisi sebagian besar petani dalam rantai usaha pertanian, dan apakah mereka memiliki posisi tawar untuk mendapatkan porsi pembagian nilai yang proporsional dalam rantai nilai produk yang mereka panen?

## **Petani Kecil dan Bisnis Pertanian**

Petani kecil kita rata-rata kepemilikan lahannya hanya 0,6 hektare dan makin menurun dari tahun ke tahun. Hampir seluruh



petani gurem tersebut tinggal di desa. Sebagai 30 persen dari keseluruhan tenaga kerja di Indonesia, pendapatan mereka sangat rendah dan tidak pasti, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup berkualitas. Bahkan banyak di antaranya yang tergolong sebagai sangat miskin (FAO, 2019).

Dengan asumsi bahwa meningkatnya produktivitas petani adalah kunci dalam meningkatkan kesejahteraan mereka, Indonesia sepertinya telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan produktivitas petani selama puluhan tahun terakhir untuk tujuan swasembada pangan terutama beras. Sebagai makanan pokok di Indonesia dengan jumlah konsumsi tertinggi di dunia (115 kilogram per kapita per tahun), Indonesia pernah berhasil swasembada beras selama beberapa tahun. Sesudah beberapa tahun masa swasembada pangan tersebut, Indonesia kembali mengimpor bahan pangan dari luar. Sampai hari ini Indonesia masih impor beras sekitar 3 juta ton per tahun walaupun produksi beras Indonesia naik dari tahun ke tahun. Tahun 2014-2017 produksi beras meningkat sebagai dampak dari kebijakan pemerintah yang menggeser alokasi subsidi minyak untuk membangun infrastruktur pertanian, antara lain irigasi. Pemerintah juga sudah mendistribusikan lebih dari 160 ribu mesin-mesin pertanian di seluruh Indonesia hanya dalam kurun tahun 2016. Termasuk di dalamnya peralatan untuk penggilingan dan pengeringan gabah, sebagaimana yang dimaksudkan Presiden Jokowi sebagai teknologi modern yang seharusnya dimiliki petani. Hampir semua infrastruktur ini memang digunakan oleh sebagian



besar petani kecil kita yang memproduksi 90 persen dari beras di Indonesia.

Dalam kondisi produksi meningkat dan pasar tidak pernah kurang, mestinya kesejahteraan petani (padi) meningkat. Namun, kenyataannya pendapatan petani pada tahun 2016 justru menurun 3 persen dari periode 3 tahun sebelumnya—hanya kurang dari 2 juta rupiah per bulan—, itu pun sebagian dari pendapatan tersebut diperoleh bukan dari kegiatan pertanian. Sementara itu setiap tahun masa panen raya tanaman pangan hampir selalu menyebabkan hal yang sama: anjloknya harga. Harga gabah, misalnya, bisa anjlok sampai jauh di bawah 4.000 rupiah. Tak jarang hasil panen menumpuk, bahkan tengkulak hanya mau membeli panen petani dengan sistem utang. BULOG yang punya jatah membeli gabah petani sering kali malah lambat menyerap karena stok impor beras tahun sebelumnya masih melimpah. Akibatnya bisa dipastikan: petani terjepit, harus menerima harga di bawah ongkos produksi, atau membiarkan panen tak terjual dan membusuk. Utang produksi tak terbayar, kebutuhan hidup tak terpenuhi. Siklus semacam ini sudah menjadi nasib petani dan produsen gurem kecil lainnya di banyak desa Indonesia.

Jadi apa yang sesungguhnya terjadi di dalam model usaha agrikultur Indonesia dan di mana posisi petani produsen di dalam model usaha itu sehingga apa pun yang sudah dilakukan untuk meningkatkan produktivitas tidak serta-merta meningkatkan kesejahteraan petani?



Petani berada di hulu dari rantai produksi pangan. Hasil produksi yang mereka panen kemudian mengalir ke rangkaian rantai produksi mulai dari pascapanen hingga jadi produk siap jual, kemudian masuk ke rangkaian rantai tengah dan hilir (distribusi dan pemasaran), sampai akhirnya ada di tangan pengguna akhir (*end user*) atau konsumen. Sekalipun hasil panen petani sangat dibutuhkan oleh semua orang dan juga menjadi bahan baku dari aneka industri, tetapi para petani tidak memiliki sedikit pun persentase kepemilikan di dalam rangkaian rantai suplai produk-produk pertanian pangan ini. Mereka hanya bertani, lalu menjual hasil pertaniannya langsung begitu masa panen tiba. Bahkan sering terjadi hasil panen sudah “dibeli” jauh sebelum waktu panen akibat mereka berutang untuk kebutuhan memproduksi. Dalam kondisi seperti ini, mereka tidak punya posisi tawar untuk ikut menentukan harga panennya dan sering kali (atau selalu?) dihadapkan pada harga beli yang tidak menguntungkan.

Ketika petani “terjebak” pada kondisi di mana mereka tidak dapat ikut menentukan harga pembelian hasil panen mereka, kemudian akses petani ke pasar juga terbatas pada mekanisme “tengkulak” maka ironi yang selalu terjadi: semakin tinggi produksi hasil pertanian mereka (semakin banyaknya suplai barang yang tersedia), semakin anjlok harga beli yang ditentukan oleh para tengkulak.

Situasi seperti ini seperti lingkaran setan dalam kehidupan semua petani gurem di Indonesia. Tidak mengherankan bila

intervensi dalam bentuk modernisasi pertanian tidak akan serta-merta meningkatkan kesejahteraan petani kecil, sebab inti persoalan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani terletak pada model bisnis dari bisnis agrikultur yang menempatkan petani kecil pada posisi yang tidak adil, hampir sepenuhnya tidak memiliki daya tawar di seluruh model bisnis dalam rantai pasok pertanian pangan.

## **Terobosan Model Bisnis yang Diperlukan Petani Kecil**

Yang pertama-tama harus disadari adalah bahwa usaha pertanian sebagaimana usaha yang lainnya harus memiliki skala produksi tertentu untuk mencapai kondisi “ideal”nya: produktivitas maksimum, ongkos produksi yang paling efisien, penetapan harga paling efisien bagi pembeli sembari memberi keuntungan terbaik bagi produsennya. Agar petani mikro kecil memiliki “skala ekonomi”nya maka modal dan hasil produksi mereka yang terbatas perlu dikonsolidasikan dalam sebuah “model usaha bersama”. Model “kepemilikan usaha dan manajemen bersama” yang sudah lama kita kenal dan berkembang di seluruh dunia adalah KOPERASI. Untuk dasar alasan utama inilah sangat penting bagi petani kecil untuk dikonsolidasikan dalam Koperasi Petani atau Koperasi Pertanian Pangan.

Alasan penting lain yang perlu digarisbawahi dari mendesaknya Koperasi Petani adalah bahwa karena petani kecil berada di



hulu rantai bisnis pertanian pangan maka mereka perlu terkoneksi dengan rantai pasok yang akan menyerap produk mereka untuk kemudian dibawa ke rantai selanjutnya. Idealnya, para petani sebagai produsen memiliki posisi tawar yang setara dengan pihak-pihak lain yang ada di dalam rantai pasok yang menjadi mitra bisnisnya. Posisi tawar petani kecil tidak akan pernah setara bila skala produksi mereka kecil sehingga menciptakan ketergantungan pada pembelian pengepul atau tengkulak. Apalagi skala yang kecil dan tidak terkonsolidasi menyebabkan ongkos produksinya tidak efisien dan makin menyulitkan petani untuk mendapatkan keuntungan yang layak. “Koperasi Petani” atau “Koperasi Pertanian Pangan” yang beranggotakan para petani produsen adalah model yang terbaik untuk mengkonsolidasikan modal dan hasil yang terbatas dari para petani kecil sehingga mereka menjadi sebuah kekuatan produksi yang lebih besar dengan biaya produksi yang lebih efisien dan posisi tawar yang lebih baik.

Di aras yang lain, selama puluhan tahun terakhir ini “malpraktik” banyak terjadi di dunia perkoperasian di Indonesia, termasuk pada koperasi petani atau koperasi pertanian. Keadaan ini menyebabkan meluasnya persepsi yang keliru terhadap koperasi secara umum sehingga petani enggan berurusan dengan “koperasi”. Petani kecil, sekecil apa pun mereka, lebih suka bekerja sendiri walaupun harus berada dalam posisi ketergantungan penuh dan memiliki daya tawar rendah pada pihak-pihak lain untuk memenuhi kebutuhan produksi dan menjual hasil produksi mereka.



Persepsi keliru pada koperasi menyulitkan usaha untuk mengkonsolidasikan petani kecil menjadi kelompok besar yang memiliki kekuatan ekonomi. Dibutuhkan kerja pengorganisasian yang tidak sedikit dan lama untuk membangun kepercayaan semua pihak, belum lagi membangun model bisnisnya yang cocok dengan kondisi dan ekosistem usaha setempat. Oleh karena itu, dibutuhkan elemen lain dalam masyarakat, terutama di desa yang bisa mendorong terciptanya terobosan model bisnis pertanian pangan dengan koperasi petani atau koperasi pertanian pangan sebagai bagian penting yang memastikan manfaat kesejahteraan bagi para petani.

## **BUMDes sebagai Elemen Masyarakat (Pelaku Ekonomi) Baru di Desa**

Di masa Orde Baru Koperasi Unit Desa (KUD) adalah wujud dari koperasi petani atau koperasi pertanian dibentuk oleh pemerintah pusat di desa-desa di Indonesia. Fungsi KUD di desa terutama adalah sebagai agen penyalur pupuk dan benih untuk para petani, terutama petani padi untuk produksi beras dalam rangka swasembada beras. Dengan demikian, sebagai “koperasi” KUD lebih berfungsi sebagai “alat pemerintah” ketimbang alat konsolidasi para petani. Pelaksanaan yang keliru dari prinsip-prinsip dan nilai-nilai koperasi dalam praktik KUD menjadi salah satu penyebab utama keengganan petani dan masyarakat desa terhadap “koperasi”.



Lenyapnya peran KUD seiring runtuhnya Orde Baru membuka ruang untuk mendorong munculnya berbagai macam terobosan untuk mengatasi situasi dari dalam desa. BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) adalah elemen “baru” di desa yang dapat secara strategis dielaborasi untuk menjadi agen pengubah ini. Sebagaimana dimandatkan oleh Undang-undang Desa nomor 6 tahun 2014 BUMDes adalah “alat ekonomi pemerintah desa” yang pembentukannya di desa harus mengkombinasikan tujuan sosial dan ekonomi, termasuk untuk mendukung kegiatan ekonomi yang telah ada dan dilaksanakan oleh masyarakat desa. Di desa-desa yang menjadi tempat tinggal sebagian besar petani gurem, BUMDes seharusnya dapat menjadi pihak yang menginisiasi pembentukan koperasi petani atau koperasi pertanian pangan dan mengembangkan model bisnis kolaboratif yang strategis “BUMDes-Koperasi Petani”. Untuk mengkonsolidasikan skala produksi yang lebih besar, model ekonomi kolaboratif ini dapat dikembangkan di kawasan perdesaan yang lebih luas, meliputi sejumlah desa di satu kawasan. Dengan kolaborasi semacam ini entitas usaha kolaboratif “BUMDes-Koperasi Petani” dapat merancang perencanaan usaha yang lebih baik dan efisien, mulai dari proses produksi, distribusi, dan pemasarannya.

Ada dua aspek penting yang harus dicermati dalam model kolaborasi “BUMDes-Koperasi Petani” ini, yaitu aspek kepemilikan dan aspek manajemen. Dalam aspek kepemilikan, model kolaboratif “BUMDes-Koperasi Petani” akan menjadikan para petani kecil sebagai “pemilik bersama” dari usaha yang dibangun tersebut.



Melalui Koperasi Petani para petani kecil dapat “mengumpulkan” modal yang terbatas secara individual menjadi kekuatan modal bersama, berbagi risiko, dan berbagi keuntungan dari usaha bersama tersebut. Di sisi lain, BUMDes sebagai alat ekonomi pemerintah desa dapat memberi penguatan modal dengan memberikan “modal penyertaan” ke dalam Koperasi. BUMDes nantinya akan juga ikut berbagi risiko dan keuntungan, yang mana akan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan desa. Dengan demikian, “BUMDes-Koperasi Petani” menjadi entitas usaha yang dimiliki bersama oleh warga dan pemerintah desa.

Pada aspek manajemen, model kolaboratif “BUMDes-Koperasi Petani” akan mendorong dibuatnya perencanaan usaha yang lebih baik dan keterbukaan manajemen usaha. Konsolidasi para petani dan kolaborasi dengan BUMDes adalah bentuk kerja sama dan kerja bersama dari warga masyarakat desa dengan pemerintah desa sebagai ekosistem pendukung ekonomi desa. Secara bersama-sama kedua elemen desa tersebut dapat merencanakan dari mulai giliran waktu tanam, mengupayakan efisiensi biaya produksi dengan pengadaan pupuk benih pengendalian hama bersama, pengendalian hama, hingga peningkatan pengetahuan bersama untuk panen yang lebih berkualitas.

Kolaborasi strategis antara Koperasi Petani dengan BUMDes (atau BUMDes Bersama dalam satu kawasan) lebih jauh lagi dapat mengupayakan mekanisme penjaminan untuk kegagalan panen dan dukungan permodalan. Hal ini dilakukan untuk mencegah semakin



lemah kondisi ekonomi petani kecil atau terjerumus utang lebih dalam akibat kegagalan panen. Melalui model kolaborasi ini pula modernisasi pertanian dapat dilaksanakan secara lebih menyeluruh, bukan hanya dalam aspek teknologinya, tetapi juga dalam aspek model bisnis dan manajemen yang melibatkan elemen sumber daya manusia warga desa, terutama petani mikro kecil yang selama ini justru paling sering terpinggirkan dalam proses pembangunan.

Model kolaboratif BUMDes-Koperasi Petani ini bisa mencegah BUMDes dari memilih bisnis yang “salah” sehingga malah menjadikan BUMDes sebagai kompetitor atau malah predator bagi usaha yang telah dijalankan oleh warganya jauh sebelum BUMDes ada. Fenomena semacam ini sudah banyak terjadi karena BUMDes “diharuskan” dibentuk, tetapi pemerintah desa kebingungan menentukan jenis usaha apa yang hendak dijalankan.

## **Perluasan Implementasi Model Bisnis Kolaboratif BUMDes-Koperasi Petani**

Sebagai terobosan model bisnis dari ekonomi kerakyatan yang bisa meningkatkan kesejahteraan baik bagi petani kecil, mengurangi kemiskinan, dan kesenjangan di antara warga desa pemerintah Indonesia perlu membuat perencanaan yang melibatkan berbagai pihak untuk mendorong pelaksanaan model bisnis kolaboratif BUMDes-Koperasi Petani ini secara lebih luas. Pelaksanaannya dapat dimulai dari prototipe di tahun pertama di wilayah desa tertentu

yang lebih memiliki kesiapan infrastruktur sosial dan ekonominya. Misalnya, di wilayah yang petaninya telah memiliki izin Perhutanan Sosial, dan lebih baik lagi bila telah terbentuk Koperasi Petani Perhutanan Sosial. Setelah dilaksanakan model percontohnya, regulasi dan kebijakan pendukung dapat dipetakan dan dibuat berdasarkan pengalaman prototipe maka di tahun kedua atau ketiga pelaksanaan model bisnis kolaboratif BUMDes-Koperasi Petani dapat diperluas di berbagai wilayah lainnya.

Model kolaboratif sejenis dapat dilaksanakan untuk semua jenis usaha pangan maupun nonpangan yang memiliki kesamaan kebutuhan untuk mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi rakyat yang berskala mikro dan kecil. Pada gilirannya kolaborasi BUMDes-Koperasi Petani (atau nelayan, atau peternak, atau jenis usaha produksi lainnya) juga memungkinkan petani-petani kecil dapat ikut menjadi “pemilik-bersama” dari usaha yang bermitra dengan entitas usaha berskala menengah hingga besar, baik domestik maupun pasar ekspor.

Untuk mendampingi proses implementasi model kolaboratif ini pemerintah desa atau pemerintah kabupaten dapat bekerja sama dengan ahli dari kalangan praktisi koperasi dan pengusaha pertanian di sekitar wilayahnya masing-masing. Bentuk pendampingan yang diperlukan misalnya bantuan untuk membangun perencanaan usaha, membangun kemitraan, manajemen pengelolaan usaha, dan memetakan regulasi atau kebijakan pendukung. Agar pendampingan terlaksana secara terstruktur selama proses pengembangan kelembagaan usaha BUMDes-Koperasi Petani perlu dibentuk



semacam lembaga konsultasi bisnis sampai usaha berjalan dengan baik. Konsultan Bisnis ini dapat dibentuk oleh pemerintah desa bersama pemerintah kabupaten atau provinsi.

Kementerian Desa PDTT, Kementerian Koperasi dan UMKM, dan Kementerian Pertanian maupun sektor lainnya dapat saling bekerja sama untuk menyediakan pendampingan dan regulasi pendukung yang diperlukan di tingkat pemerintahan pusat. Selain itu, mereka bisa membantu menyediakan terobosan-terobosan lain yang membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, misalnya dukungan permodalan dari perbankan atau lembaga keuangan lainnya untuk model usaha kolaboratif ini. Dengan demikian, pendekatan pemberian dukungan permodalan hanya untuk usaha yang sudah berjalan lama tidak berlaku untuk model kolaboratif yang sengaja dibentuk antara BUMDes-Koperasi Produsen mikro kecil ini. Tentu saja dengan model pengawasan yang memungkinkan akuntabilitas tetap terjaga dan justru menjadi pendorong bagi pemerintah untuk membantu memfasilitasi terbentuknya kemitraan usaha yang mengamankan kolaborasi BUMDes-Koperasi Petani agar risiko kerugian yang fatal bisa dihindari.

Dalam sebuah entitas usaha yang dioperasikan secara kolaboratif antara warga desa dengan pemerintah desa dapat diupayakan mekanisme yang memungkinkan tingkat keamanan yang lebih tinggi. Potensi korupsi atau penyelewengan dapat diminimalisasi dengan model manajemen terbuka yang harus dilaksanakan dalam manajemen model kolaboratif ini. BUMDes-Koperasi Petani juga

bisa menjadi agen penyaluran berbagai bentuk dukungan, seperti alat produksi berteknologi modern, kredit modal, asuransi, dan lainnya. Bahkan kredit bernilai cukup besar untuk membangun infrastruktur produksi bagi kepentingan konsolidasi petani (atau produsen mikro kecil lainnya) di sebuah kawasan perdesaan juga dapat diberikan.

Salah satu bentuk kebijakan afirmatif yang dapat dibuat oleh pemerintah kabupaten, provinsi, ataupun pusat, misalnya, adalah dengan memberlakukan pembatasan terhadap jenis usaha atau produksi tertentu yang hanya boleh dilaksanakan oleh entitas usaha bermodel kolaboratif dari elemen ekonomi rakyat dan melarang pelaku usaha berskala menengah besar untuk berkompetisi di jenis usaha yang sama. Hal ini dilakukan sembari mendorong usaha berskala menengah dan besar berkiprah dalam jenis-jenis usaha yang ada dalam rantai tengah dan hilir dari rantai pasok pertanian pangan untuk kemudian menjalin kemitraan yang setara dengan BUMDes-Koperasi Petani sebagai pemasok bahan baku di hulunya. Kemitraan setara mensyaratkan adanya kondisi sama-sama mendapatkan manfaat dan keuntungan yang proporsional dan saling menjaga agar pihak lain terhindar dari kerugian. Dengan membangun model kemitraan setara antara entitas kolaboratif BUMDes-Koperasi Petani dengan usaha menengah dan besar, kita bisa berharap terpengkasnya kesenjangan ekonomi yang begitu besar antara 1 persen pengusaha menengah besar, tetapi menguasai lebih dari 70 persen aset dan 99 persen usaha mikro kecil secara bersama-sama hanya menguasai kurang dari 30 persen aset di seluruh Indonesia.



Model kolaboratif untuk berbagai produksi pertanian pangan akan menjadi model di mana warga desa dan pemerintah desa bersama-sama memastikan produksi pangan oleh petani gurem (atau nelayan, peternak, atau produsen mikro kecil lainnya) dapat terus berlangsung secara berkelanjutan, bertumbuh, berkembang menjadi modern, dan membawa kesejahteraan bagi ratusan juta warga desa di seluruh Indonesia. Kolaborasi ini juga akan membawa dampak pada keseluruhan rantai pasok pangan di mana petani mikro kecil sebagai produsen diposisikan sebagai bagian yang penting, setara pentingnya dengan industri pangan berskala besar dan para pelaku usaha menengah besar lainnya di rantai tengah dan hilir. Manfaat berupa harga retail yang efisien dan stabil juga akan dinikmati oleh konsumen.

Terobosan ini akan menjadikan desa sungguh-sungguh berdaya sebagai pusat produksi pertanian dan pangan. Pembangunan ekonomi perdesaan akan menjadi bagian yang inheren dari pembangunan modal sosial komunitas masyarakat perdesaan. BUMDes di desa dibentuk melalui proses demokratis melibatkan Badan Permusyawaratan Desa, sementara Koperasi Petani juga dibentuk dan dikelola melalui proses yang demokratis. Model kolaboratif BUMDes-Koperasi Petani secara natural akan mendorong penuh proses pendidikan dan kesadaran politik warga desa, serta mendorong keterbukaan dan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan dan usaha bersama yang menyangkut kepentingan bersama.



Model kolaboratif ini dapat menjadi model ekonomi bisnis yang “*no one left behind*” atau tidak meninggalkan pihak mana pun jauh di belakang. Model yang dibutuhkan bukan hanya oleh Indonesia, tetapi oleh dunia usaha global yang akibat pandemi global telah dipaksa untuk berubah, mengoreksi, dan menata ulang model bisnisnya agar lebih inklusif dan berkeadilan bagi semua, manusia dan alam. []

## Profil Penulis

**Dewi Hutabarat**, pengurus KADIN (Kamar Dagang dan Industri) Indonesia Bidang UMKM Koperasi sebagai Wakil Ketua Komisi Tetap Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Koperasi; Pendiri dan Pengelola Usaha Koperasi KOBETA; Direktur Eksekutif Sinergi Indonesia Foundation; Master Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik.





# BUMDes Sebagai Ikhtiar untuk Meretas Jalan Kemandirian Ekonomi Lokal<sup>1</sup>

*Puji Qomariyah*

## **Pendahuluan**

**D**alam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 disebutkan bahwa BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan

---

1. *Call for Papers*

pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Usaha desa sendiri didefinisikan sebagai jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa, seperti usaha jasa penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.

Merujuk pada Peraturan Menteri tersebut, pembentukan BUMDes diharapkan muncul dari aspirasi masyarakat (dari bawah), sementara pemerintah kabupaten/kota memberikan asupan energi dari atas dalam bentuk permodalan, pembinaan, hingga pengawasan. Dengan skema tersebut pembentukan BUMDes adalah pemberian energi dari atas dan bawah sehingga proses pematangannya menjadi badan usaha yang *profit oriented* dapat memberikan manfaat secara ekonomi dan sosial bagi masyarakat desa.

## **BUMDes, rintisan pengembangan ekonomi lokal**

Berdasarkan produk hukum pendiriannya, BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai **lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*)**. BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial, BUMDes bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (baik barang maupun jasa) ke pasar. Fungsi komersial BUMDes dalam meraih keuntungan usaha ini diharapkan dapat berdampak pada masyarakat, baik secara langsung maupun secara tidak



langsung, yakni berupa terbukanya lapangan kerja baru, terserapnya tenaga kerja, turunnya angka kemiskinan, hingga meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, fungsi sosial BUMDes merupakan efek dari fungsi komersialnya.

**Tata kelola** yang baik akan memudahkan BUMDes dalam meraih visi-misinya, terlebih pada badan usaha yang diarahkan menjadi profesional. Harapannya, melalui tata kelola yang baik mata rantai perencanaan produksi-pemasaran dapat tersambung secara efektif dan efisien. Penggabungan nilai-nilai kearifan lokal bisa dijalankan sejauh tidak menyimpang dari kaidah manajemen. Tata kelola menjadi gambaran awal bagaimana kepengurusan menjalankan manajemen usaha untuk mencapai visi-misi dan tujuan BUMDes. Semakin besar nilai tata kelola/manajemen semakin sehat BUMDes dalam menjalankan usahanya, menghasilkan keuntungan, efektif-efisien menjalankan berbagai program.

Selain tata kelola, **permodalan** juga penting bagi BUMDes. Untuk mencapai tujuan tersebut, selain kesiapan SDM, tata kelola yang bagus juga mensyaratkan adanya permodalan usaha yang mampu menopang beroperasinya BUMDes. Modal usaha merupakan syarat utama bagi jalannya BUMDes baik dalam bentuk tata kelola, SDM, maupun modal pendanaan. Tanpa pemahaman yang kuat akan maksud dan tujuan pembentukan BUMDes, pemberian modal hanya akan habis di tengah perjalanan tanpa menghasilkan sesuatu yang berarti. Di sinilah perlunya penguatan

kelembagaan BUMDes agar memiliki visi-misi yang jelas, terarah, terukur.

Dalam hal permodalan, BUMDes diatur sebagai berikut :

BUMDes mendapatkan modal awal untuk melaksanakan kegiatannya dari kekayaan desa atau kekayaan desa yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta dari lembaga keuangan yang ada di desa dan sudah diserahkan kepada masyarakat.

BUMDes dapat memperoleh modal dari bantuan pemerintah pusat dan daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BUMDes dapat memperoleh permodalan dari penyertaan modal pihak ketiga yang hak-hak kepemilikannya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

BUMDes dapat memperoleh permodalan dari pinjaman melalui lembaga keuangan perbankan atau lainnya yang pengaturan pinjamannya dilakukan oleh dan atas nama Pemerintah Desa dan diatur dalam Peraturan Desa.

Idealnya, BUMDes mampu mengonsolidasi unit-unit usaha di bawahnya menjadi usaha yang menguntungkan dalam skala yang lebih besar. Dalam skema ini peran BUMDes bagi unit-unit usaha di bawahnya adalah *holding* yang memayungi perjalanan unit-unit usaha sehingga mampu beroperasi secara menguntungkan, efisien-efektif. Ukuran keberhasilan unit usaha dapat dilihat dari



keuntungan komersial yang dihasilkan sepanjang perjalanan unit usaha tersebut.

BUMDes dapat menjadi berdaya guna secara ekonomi maupun sosial bagi masyarakat ketika aktivitas produksi-pemasaran yang dilakukan mampu memberikan sumbangan ekonomi bagi institusi, anggota, maupun masyarakat secara umum. Pada titik ini BUMDes tidak bisa berdiri sendiri, baik di awal pembentukannya maupun dalam perjalanan menuju kemapanannya sebagai sebuah institusi perekonomian masyarakat. Rentangan tangan diperlukan sepanjang perjalanan waktu BUMDes, baik internal BUMDes maupun dengan para pihak (*stakeholders*).

Dalam banyak kasus, BUMDes tidak bisa tumbuh dan berkembang sendiri tanpa membangun kemitraan dengan pihak lain. Itulah sebabnya sejak awal pemerintah telah menyiapkan landasan regulasi berkaitan dengan persoalan ini. Bila kita menilik pada peraturan yang ada, BUMDes dapat membuat perserikatan/ kerja sama dengan pihak ketiga dengan ketentuan:

Apabila kerja sama dimaksud memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDes yang mengakibatkan beban utang maka rencana kerja sama tersebut harus mendapat persetujuan komisaris dan disetujui oleh masyarakat dalam musyawarah desa.

Apabila kerja sama dimaksud tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDes dan tidak mengakibatkan beban utang maka rencana kerja sama tersebut cukup diberitahukan kepada komisaris.

Kita bisa belajar bagaimana BUMDes di Cina menjalankan usahanya. BUMDes di Cina dikelola layaknya sebuah korporasi dengan menggabungkan unit-unit usaha kecil dalam sebuah garis komando usaha yang jelas. Ada aturan main yang jelas bagi jalannya usaha tersebut dan aturan tersebut dijalankan sebagaimana mestinya. Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui sehingga organisasi tumbuh menjadi lebih kuat secara bertahap. Rantai komando yang bertugas mengorganisir, mengontrol, melakukan pendampingan dijalankan sehingga tidak menyimpang dari jalur semestinya. Dalam bahasa sederhana, mereka menerapkan asas manajemen secara tertib dan disiplin. Terkait jenis usaha, unit-unit usaha dibentuk sesuai dengan potensi yang ada di wilayahnya. Unit-unit usaha yang hampir sama dikelompokkan dalam sebuah unit usaha yang lebih besar sehingga lebih memudahkan dalam operasional maupun pengawasannya.

Penguatan kelembagaan masih menjadi pekerjaan rumah inisiator BUMDes terutama dalam meningkatkan produktivitas unit-unit usaha, menguatkan tata kelola BUMDes, penguatan permodalan, *upgrading* pengelola, hingga pembentukan unit-unit usaha baru yang sesuai dengan potensi pasar. Dengan (sudah) terpetakkannya potensi wilayah, produktivitas BUMDes sesungguhnya bisa ditingkatkan melalui produk unggulan (barang-jasa), pengaturan hasil, pengaturan kualitas produk yang mampu bersaing sehingga hasil keuntungan yang didapatkan berasal dari rantai perencanaan-pemasaran yang telah ditargetkan.



Langkah awal membangun BUMDes adalah pembentukan unit usaha sebagai *core* bisnis sesuai potensi terbesar yang dimiliki masyarakat setempat. Selanjutnya unit tersebut diharapkan dapat membentuk satu unit usaha yang *establish* dalam tata kelola yang terencana dan terdokumentasi. Unit usaha yang sudah *establish* tersebut dapat direplikasi untuk unit usaha lainnya dengan penjenjangan yang bertahap sehingga bangunan usaha bisa lebih kokoh pada setiap bagiannya.

Mengambil metafora masyarakat Tionghoa dalam mengelola bisnisnya: *lebih baik berada di dalam perahu kecil dalam jumlah yang cukup banyak dibanding memiliki sebuah kapal yang besar*. Ketika terjadi ketidakstabilan, kerusakan, ataupun kebocoran pada satu perahu, perahu yang lain memiliki kesempatan untuk menolong agar tidak tenggelam. Sekalipun perahu tersebut tidak bisa diselamatkan dari tenggelam, masih ada kesempatan untuk menyelamatkan kru perahu berikut muatan yang masih mungkin diselamatkan.

Perahu kecil tidak untuk menyeberangi lautan yang tinggi ombaknya, akan tetapi masih bisa dioperasikan untuk mencari tangkapan di pesisir ataupun sungai. Pengelolaan perahu kecil tersebut lebih sederhana dibanding sebuah kapal besar. Ketika satu perahu tidak bisa beroperasi, masih ada perahu-perahu lain yang bisa menghasilkan dan dalam waktu yang bersamaan memperbaiki perahu yang rusak agar bisa beroperasi kembali.

Dalam kalkulasi ekonomi, perahu-perahu kecil yang beroperasi dalam sebuah irama bisnis yang terkendali sesungguhnya merupakan

sebuah bangunan ‘kapal besar’ badan usaha. Inilah semangat pembentukan BUMDes yang bisa dikembangkan lebih lanjut.

Peran pemerintahan desa sangat dominan dalam pembentukan dan pengembangan BUMDes. Pemerintahan desa mengambil peran di antaranya dalam bentuk:

- Inisiatif awal dalam pembentukan BUMDes;
- Penyertaan modal;
- Pemberian landasan legal di tingkat desa;
- Pemberian kewenangan atau peran kepada BUMDes dalam pengelolaan aset desa serta program pembangunan lainnya (seperti pengelolaan beras miskin, pengelolaan pasar desa).

Komitmen para pihak, terutama pemerintah dalam memberikan dukungan menjadi persenyawaan berikutnya yang akan mendorong keberhasilan BUMDes. Ketika pemerintah mampu membaca geliat masyarakat dalam beraktivitas ekonomi-sosial sesuai potensinya (SDM, SDA, dana), serta memberikan dukungan baik dalam kebijakan maupun penganggaran, ada celah terbuka untuk membuka kebuntuan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ruang tersebut sesungguhnya merupakan kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi ekonomi lokalnya, di sisi lain pemerintah (dan juga para pihak lainnya) berkesempatan memberikan dukungan dalam hal permodalan, pendampingan, pembinaan, hingga menjadikan BUMDes sebagai mitra strategis nantinya.



## **Karangrejek Menanam Air:**

### **Contoh Keberhasilan Pengelolaan BUMDes**

Karangrejek, sebuah desa di Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul, pada tahun 1993 ditetapkan sebagai Desa IDT. Mata pencaharian utama sebagian besar penduduknya adalah petani dan buruh tani. Sebagaimana desa-desa di Kabupaten Gunungkidul, desa Karangrejek didominasi jenis tanah berkapur yang minim sumber air. Hampir setiap tahun Desa Karangrejek mengalami krisis air pada saat musim kemarau.

Berangkat dari kenyataan yang ada, beberapa warga berikhtiar untuk ‘menanam air’ guna memenuhi keperluan air bersih sehari-hari. Usaha itu dilakukan dengan memetakan potensi sumber air yang ada di desa dan mengupayakan ketersediaan sumber air dengan memperhatikan proses siklus hidrologi. Pohon merupakan salah satu sumber penyimpan air alami, selain sumber air bawah tanah yang sesungguhnya banyak terdapat di daerah *karst*. Maka selain melakukan upaya penanaman pohon di berbagai tempat, mereka juga berupaya dengan berbagai cara agar bisa mengakses sumber air bawah tanah yang melimpah di bawah bebatuan kapur.

Pemerintah DIY mengakui bahwa upaya mengangkat air di daerah pegunungan kapur memerlukan investasi yang cukup besar. Namun, karena ada kesadaran bahwa air merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat, upaya apa pun ditempuh agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan air sehari-harinya, baik dengan biaya yang terjangkau atau bahkan secara gratis.



Hingga tahun 1990-an Pemkab Gunungkidul melalui PDAM membantu pengadaan air bersih bagi masyarakat setempat. Akan tetapi, bantuan tersebut sifatnya masih sementara sehingga tidak bisa menjawab kebutuhan air bersih bagi warga sepanjang waktu. Pada tahun 2005, atas izin Bupati Gunungkidul, Pemdes Karangrejek bersama lembaga desa mengirimkan pengajuan fasilitas pengeboran sumber dalam ke Departemen Pekerjaan Umum melalui Satker Pam DIY. Fasilitas tersebut nantinya dikelola desa untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat desa. Pada tahun 2007 melalui Satker Pam DIY Ir. Suharjono Sujanadi. M.M., pengajuan izin tersebut dikabulkan dengan tanggung jawab sebagai berikut:

- Pengelolaan fasilitas dilakukan secara profesional
- Fasilitas tersebut dikembangkan secara mandiri
- Adanya aturan pengelolaan yang transparan dan akuntabel
- Didirikannya koperasi sebagai unit pengelola fasilitas tersebut

Selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2007 Pemdes Karangrejek bersama lembaga dan tokoh masyarakat menyusun AD/ART tentang pengelolaan air bersih. Aturan ini digunakan sebagai langkah lanjutan setelah proyek selesai dikerjakan. Pada tanggal 20 Maret 2008 secara resmi proyek diserahkan berupa:

- Pengeboran beserta eksploitasinya.
- Pipa transmisi 100 mm sepanjang 1.800 m

Water meter dan pipa untuk sambungan rumah sebanyak 125 water meter dengan total nilai aset seluruhnya Rp768.416.085,00



Selepas penyerahan aset, pengelola melakukan pemipaan dan mengembangkan pengelolaan secara gotong royong. Pada tanggal 20 Maret 2008 Menteri Pekerjaan Umum Ir. Joko Kirmanto memberikan tambahan bantuan pipa jaringan 50 mm sepanjang 360 m sehingga aset mencapai Rp1.056.065.444,00. Dalam pengelolaan selanjutnya, tanggung jawab sebagai berikut:

- Penjagaan dan pemeliharaan seluruh aset pemerintah oleh pemerintah desa beserta seluruh masyarakat.
- Pengembangan fasilitas tersebut secara swadaya, mandiri sesuai kreativitas/kearifan lokal.

Melalui Perpub No. 5/Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendirian BUMDes, akhirnya Pemdes Karangrejek meresmikan pendirian BUMDes melalui Perdes No. 5/Tahun 2009 di mana salah satu unit usahanya berupa pengelolaan air bersih. Setelah BUMDes pengelolaan air terbentuk, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun usaha bersama pemerintah dan masyarakat desa Karangrejek ini memberikan keuntungan sebesar 20 persen. Keuntungan pengelolaan ini kemudian disetorkan ke kas desa sebagai pemasukan APBDes.

SUMBER DANA	2008	2009	2010	2011
PEMERINTAH SAT-KER PAM. DIY.	1.056.065.444	1.056.065.444	1.056.065.444	1.056.065.444
PENGEMBANGAN SWADAYA	556.041.127	706.035.702	739.839.555	806.980.155
JUMLAH ASET	1.612.106.517	1.762.101.146	1.795.904.999	1.863.045.500
<b>SHU.</b>	<b>78.658.075</b>	<b>103.190.170</b>	<b>123.758.560</b>	<b>155.953.683</b>

Sumber: Pemdes. Karangrejek, 2012



PERKEMBANGAN PELAYANAN SAMBUNGAN RUMAH					
KETERANGAN	AWAL	2008	2009	2010	2011
BANTUAN METER AIR	125	125	125	125	125
PENGEMBANGAN SWADAYA	0	465	582	680	799

Sumber: Pemdes. Karangrejek, 2012

PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN SHU UNIT KRIDIT MIKRO			
SUMBER MODAL	2009	2010	2011
UED. SP	12.517.511		
CADANGAN	3.163.432		4.297.250
IDT	12.224.440		
KEJAR PAKET B	1.200.000		
ADD./ PEMDES	19.000.000	19.000.000	19.000.000
ADD./ LPMD	2.000.000	2.000.000	2.000.000
PABTK		55.514.000	57.514.000
KIMPRASWIL		65.000.000	86.500.000
LKD		14.500.000	14.500.000
<b>JUMLAH</b>	<b>31.105.483</b>	<b>156.014.000</b>	<b>183.811.250</b>
<b>SHU</b>	<b>10.862.373</b>	<b>11.394.500</b>	<b>28.225.350</b>

Sumber: Pemdes. Karangrejek, 2012

Selain mengalami peningkatan aset, SHU yang dihasilkan dari pengelolaan air dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yakni sebesar Rp78.658.075,00 (2008), Rp103.190.170,00 (2009), Rp123.758.560,00 (2010), serta Rp155.953.692,00 (2011). Hingga tahun 2011-2012 hasil setoran SHU ke kas desa telah digunakan untuk membantu kegiatan pemeliharaan jalan lingkungan sepanjang lebih dari 5.000 meter



(dan lebar 3 meter) dengan total biaya Rp340.980.000,00. Tidak hanya itu, setoran itu juga digunakan untuk membuat tugu masuk jalan-jalan padukuhan di 19 tempat dengan rata-rata biaya stimulan dari desa adalah Rp2.500.000,00 per tempat (*Sumber: Pemdes. Karangrejek, 2012*).

Secara keseluruhan, sejak awal berdirinya BUMDes pertama tersebut hingga saat ini Desa Karangrejek mempunyai BUMDes dengan unit usaha, di antaranya:

- Jasa Pelayanan Air Bersih dengan nama Pengelolaan Air Bersih Tirta Kencana (PAB. Tirta Kencana)
- Jasa simpan pinjam dengan nama Unit Kredit Mikro (UKM) Tirta Kencana

Ke depan diharapkan dapat mendirikan unit-unit usaha, antara lain UKMA Amrih Ngrembaka (pertanian), jasa pengelolaan usaha desa, usaha boga, jasa pengadaan barang dan jasa konstruksi

Salah satu persoalan yang masih dihadapi masyarakat Desa Karangrejek dalam mengembangkan usaha perekonomiannya adalah permodalan. Sampai saat ini masyarakat Desa Karangrejek masih meminjam permodalan usahanya di BPR meskipun tingkat suku bunga yang harus ditanggung relatif lebih besar. Kemudahan mendapatkan pinjaman masih menjadi pertimbangan mereka untuk memilih BPR sebagai alternatif meminjam modal usaha. Hal ini dipandang sebagai suatu permasalahan yang dapat diselesaikan melalui pendirian BUMDes yang bergerak di bidang yang benar-

benar menjadi kebutuhan masyarakat. Pemberian layanan usaha simpan-pinjam bagi warga Desa Karangrejek dengan suku bunga yang kompetitif ini bisa mengembangkan potensi ekonomi warga. Oleh karena itu, pengelola BUMDes Karangrejek mencoba mengembangkan usaha BUMDes dengan beberapa langkah, di antaranya:

- Pinjaman dengan suku bunga rendah
  - Bantuan tambahan permodalan usaha BUMDes
  - Pengajuan proyek pembangunan rumah bagi warga yang belum memiliki dalam bentuk rusunawa kepada Kementerian Kimpraswil di Desa Karangrejek yang nantinya dikelola BUMDes
  - Pengembangan wisata air dari sumber mata air yang masih bisa dioptimalkan
- P • engembangan kawasan seni-budaya serta taman bermain dengan menggandeng kerja sama antara BUMDes dengan investor.

Belajar dari BUMDes Karangrejek, ada beberapa pembelajaran yang bisa dipetik.

***Pertama***, kelompok usaha ekonomi yang dibangun atas dasar kebutuhan masyarakat serta potensi sumber daya (alam, manusia, dana) setempat dapat menjamin keberlanjutan usaha itu sendiri, mengingat pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat berdampak



ganda, baik nilai ekonomi bagi masyarakat itu sendiri maupun bagi lembaga pengelola. Keberlangsungan usaha tersebut relatif lebih aman mengingat usaha yang dijalankan didasarkan atas kesepakatan bersama. Dengan demikian, kebermanfaatannya baik ekonomi maupun sosial dapat dirasakan oleh masyarakat banyak. Terlebih dengan adanya kesepakatan bersama, daya dukung lingkungan pada akhirnya mampu meningkatkan perekonomian yang dihasilkan dari terbukanya aktivitas ekonomi lainnya, semisal pengembangan wisata desa (kuliner, desa wisata, dan lain-lain).

Peningkatan daya dukung lingkungan juga dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang hidup dan beraktivitas di atasnya. Pembentukan kelompok usaha ekonomi (BUMDes) tersebut seolah mengikuti filosofi yang tumbuh di masyarakat: jika ingin membentuk usaha yang langgeng maka sepatutnya mengikuti kaidah “*dibutuhke wong akeh, butuhke wong akeh, agawe bungahe wong akeh*” (komoditas diperlukan banyak orang, aktivitas usaha ekonomi membutuhkan banyak orang sehingga bisa membuat bahagia banyak orang). Secara sederhana dalam kacamata ekonomi komoditas (barang/jasa) yang sesuai dengan prasyarat tersebut adalah *mass product* (produk massal) yang menjadi kebutuhan banyak orang.

**Kedua**, tahapan proses yang dijalani masyarakat dalam mengembangkan BUMDes dimulai dengan pengenalan potensi. Berpijak pada pengenalan potensi tersebut disusunlah sosialisasi, rencana kegiatan usaha, dan pembentukan badan usaha dengan aturan yang jelas. Bila tahap-tahap ini mendapat respons baik dari



masyarakat, langkah selanjutnya adalah melakukan penguatan kelembagaan melalui tata kelola dan tata program yang terencana hingga pengembangan usaha. Tahapan ini merupakan sebuah proses runtut yang mengikuti dinamika lembaga/organisasi sehingga dapat berdampak pada kekokohan struktur kelembagaan dalam waktu yang relatif lama.

**Ketiga**, unsur yang tidak kalah pentingnya adalah peran pemerintah dalam mendorong upaya masyarakat. Dukungan ini dapat mendorong kemandirian masyarakat secara ekonomi. Peran pemerintah diharapkan dapat memberikan pembinaan yang mampu mendorong BUMDes untuk lebih produktif dalam hal tata kelola maupun tata program.

**Keempat**, pembentukan BUMDes sebagai badan usaha produktif sudah seharusnya berorientasi pada manfaat ekonomi (*profit oriented*) sehingga pengelolaannya pun harus berpegang pada kaidah manajemen. Pada titik ini ketika manfaat ekonomi tercapai akan muncul dampak/efek ikutan lainnya seperti terbukanya lapangan usaha baru bagi masyarakat. Dengan adanya BUMDes yang secara aktif dikelola 17 orang pengurus, dampak tumbuhnya aktivitas ekonomi (baru) di desa Karangrejek bisa dirasakan masyarakat. Ketersediaan air di Karangrejek saat ini, misalnya, telah mampu dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian pangan *subsisten* yang mampu menyediakan pangan bagi petaninya sendiri. Di luar keuntungan yang diperoleh, keberadaan BUMDes tersebut juga



mampu menekan angka pengangguran serta angka kemiskinan di Karangrejek secara signifikan, yakni sebesar  $\pm 20$  persen

Pengelolaan BUMDes Karangrejek telah terstruktur. Pengelola yang mengurus unit usaha terdata dengan baik. Begitu pun administrasi terdokumentasi dengan baik sehingga aset BUMDes sebagai gambaran usaha yang sehat bisa terbaca. Membandingkan BUMDes dengan KUD, ada karakteristik mendasar yang membedakan keduanya, yaitu kemanfaatan. Jika KUD lebih memberikan manfaat langsung bagi anggotanya, manfaat BUMDes lebih luas lagi, yakni bagi masyarakat desa setempat.

## Penutup

Bicara mengenai BUMDes adalah berbicara tentang pengembangan ekonomi lokal. Hal ini dikarenakan ada beberapa potensi unggulan yang dimiliki oleh BUMDes, antara lain:

- BUMDes menggunakan bahan baku lokal dan bersifat padat karya (meskipun dalam perkembangannya akan menuju pada teknologi pengolahan).
- Modal kecil dengan rentang waktu produksi yang cepat
- Mampu memaksimalkan sumber daya lokal karena dapat dilaksanakan di berbagai tempat sesuai dengan potensi daerah.

Banyak memanfaatkan sumber daya lokal sehingga tidak banyak terpengaruh oleh gejolak perekonomian internasional, sebaliknya dapat merangsang pertumbuhan usaha lokal yang berdampak luas



pada optimalisasi pemanfaatan seperti lahan, hasil-hasil pertanian tambang dan bahan galian, produk sampingan hasil hutan, dan lain-lain sehingga ketergantungan pada barang-barang impor relatif rendah. Kekuatan tersebut dapat bersumber dari partisipasi warga maupun kapasitas pengelola berupa: prinsip-prinsip lokal (*local wisdom*) yang masih sangat kuat, swadaya, dan gotong royong, kesukarelaan dalam mengikuti kegiatan-kegiatan dan pertemuan di tingkat desa, nilai-nilai adat sebagai pengatur tingkah laku.

Produk barang bervariasi dari bahan mentah sampai dengan produk akhir.

Untuk pengembangan BUMDes agar dapat berdaya guna secara sosial dan ekonomi membutuhkan:

- Penguatan permodalan
- Penguatan kapasitas kelembagaan dan pengurus
- Pengembangan usaha dan unit usaha
- Kebijakan dan regulasi pemerintah desa dan kabupaten
- Fasilitasi dan pendampingan
- *Supporting system*
- Peningkatan pengetahuan dan keterampilan pengelola dan masyarakat
- Inkubator bisnis.[]



## **Profil Penulis**

**Puji Qomariyah, S.Sos., M.Si.** staf pengajar di Departemen Sosiologi, Universitas Widya Mataram. Dia meraih gelar Master dari Departemen Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada dengan tesis "Respon Masyarakat Terhadap Peran Politik Kyai di Kabupaten Rembang". Fokus penelitiannya berada di sekitar isu pangan, lingkungan, dan kebudayaan. Hasil penelitian Puji Qomariyah, S.Sos., M.Si. dipublikasikan di berbagai jurnal dan buku. Kini Puji Qomariyah, S.Sos., M.Si. sedang menempuh studi Program Pascasarjana Kajian Seni dan Masyarakat di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.





# Inovasi Akar Rumput untuk Ekonomi Berkelanjutan<sup>1</sup>

*M. Laksmana S. Adi Wibawa, S.IP.*

## **Pendahuluan**

**G**lobal Innovation Index (GII) pada tahun 2019 merilis hasil risetnya tentang kinerja inovasi dari seluruh negara di dunia. Indonesia sebagai negara *lower middle income* berada pada level 'rata-rata' (*in line with expectations for level of development*) atau

---

1. *Call for Papers*

*ranking* 11 dari 26 negara dengan pendapatan menengah ke bawah (*lower middle income*). Sedangkan pada tingkat global seluruh negara, Indonesia berada pada *ranking* 85 dari 129 negara di dunia. Indonesia kalah jauh dari negara-negara di Asia, bahkan di Asia Tenggara sekalipun. Singapura berada pada peringkat ke-8 dan Malaysia pada peringkat ke-35. Sementara Vietnam, Thailand, Filipina, dan Brunei Darussalam secara berturut-turut berada pada peringkat ke-42, 43, 54, dan 71. Hasil ini tentu bukan sebuah kabar yang menggembirakan bagi perkembangan inovasi di Indonesia.

*Global Innovation Index (GII)* merupakan produk ilmiah yang disusun oleh Cornell University, World Intellectual Property Organization, dan INSEAD dalam mengukur kinerja inovasi pada sebuah negara dengan menggunakan 80 indikator. Dari sekian banyak indikator tersebut terdapat 4 (empat) indikator terpenting, yakni investasi penelitian dan pengembangan (*research and development* atau '*R & D*'), jumlah paten dan merek internasional yang dimiliki sebuah negara, pengembangan aplikasi digital di ponsel, dan ekspor produk-produk teknologi tinggi (*high-tech*). *GII* juga menilai kunci sukses dari pemajuan inovasi pada sebuah negara adalah pada kuatnya perencanaan kebijakan oleh pemerintah untuk mendorong inovasi itu sendiri.

Daya saing inovasi Indonesia yang masih rendah pada tataran global ditanggapi oleh pemerintah dengan serius. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, pada berbagai kesempatan pidatonya terus mengulangi dan mengingatkan pentingnya inovasi. Mulai dari

pidato kemenangannya sebagai Presiden terpilih tahun 2019-2024<sup>2</sup> maupun pada pidato pertamanya sebagai Presiden definitif Republik Indonesia periode 2019-2024 pasca dilantik di hadapan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI)<sup>3</sup>. Pemerintah Indonesia menginginkan tumbuhnya inovasi yang mampu mendobrak rutinitas dan meningkatkan produktivitas dalam lingkungan global yang sangat dinamis dan penuh kejutan seperti saat ini.

Keinginan dan dorongan yang diberikan oleh pemerintah untuk memunculkan inovasi di Indonesia memberikan pandangan bahwa inovasi sejatinya dapat dilakukan oleh siapa saja dan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah. Inovasi dapat dilakukan di mana saja dan pada tingkatan masyarakat apa saja, termasuk dari warga dan komunitas masyarakat terkecil sekalipun. Pandangan *bottom-up innovation* tersebut tampak memberikan sudut pandang berbeda terhadap substansi dari rilis akademik oleh GII (2019) yang mengeluarkan indeks inovasi dari seluruh negara di dunia dengan 4 (empat) indikator terpenting (*R & D, high-tech products, patent, and smart application*).

Inovasi memang tak melulu soal investasi dan anggaran *Research and Development* yang besar, aplikasi pintar pada ponsel, hak paten, atau bahkan tentang ekspor produk berteknologi tinggi (*high-tech*)

- 
2. Pidato dengan topik Visi Indonesia di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat (Minggu, 14 Juli 2019).
  3. Pidato disampaikan sesaat pascapelantikan Jokowi-Ma'ruf sebagai Presiden dan Wapres oleh MPR-RI di Jakarta, Minggu (20 Oktober 2019).



saja, tetapi juga bergerak pada ide, kecerdikan, dan terkadang ‘hanya’ melalui improvisasi (Bubel dkk., 2015). Beberapa tokoh lainnya bahkan secara tegas menentang *status quo* dari praktik dan nilai-nilai inovasi umum yang berlaku. Boldrin & Levine (2008) dan Agola & Hunter (2016) sepakat bahwa hak paten tidak cocok untuk sebuah inovasi yang mungkin hanya akan menguntungkan sebagian besar orang saja dan mengesampingkan masyarakat yang terpinggirkan. Sedangkan Ross dkk (2012) menyebutkan bahwa inovasi tak harus berdasar pada *research and development* konvensional, serta tidak pula harus berbicara tentang teknologi canggih (Hossain, 2016).

Pandangan dari beberapa tokoh tersebut memberikan gambaran bahwa inovasi memiliki sifat dan ruang lingkup yang sangat fleksibel. Lebih lanjut, fleksibilitas sifat inovasi tersebut juga dapat ditinjau dari sumber munculnya inovasi itu sendiri. Inovasi ternyata juga tak harus secara kaku diarahkan dan dilegitimasi oleh otoritas dengan hierarki yang lebih tinggi melalui berbagai kebijakan inovasi, tetapi dapat pula berasal dan tumbuh dari masyarakat akar rumput (Halvorsen dkk., 2005; Seyfang & Smith, 2007; dan Hilmi, 2012).

Sebagai produk atau proses inovatif yang dibuat pada bagian bawah piramida, inovasi akar rumput biasanya tumbuh karena kebutuhan, kesulitan, dan tantangan yang dihadapi oleh suatu komunitas (Hilmi, 2012). Dalam konteks Indonesia, kondisi komunitas atau masyarakat seperti itu banyak dijumpai pada tingkat masyarakat desa. Data BPS-RI (2019) menginformasikan bahwa jumlah masyarakat miskin di pedesaan masih jauh lebih

banyak daripada masyarakat miskin di perkotaan, yakni sebanyak 9,99 juta jiwa masyarakat miskin di perkotaan dan 15,15 juta jiwa masyarakat miskin di pedesaan. Kondisi ini menggambarkan bahwa masyarakat pada bagian bawah piramida (*bottom of the pyramid*) di Indonesia sangat banyak terdapat di pedesaan. Oleh karena itu, konsep inovasi akar rumput memang lebih tepat disematkan pada desa-desa di Indonesia yang berinovasi (Zhang, 2012), terutama pada desa-desa miskin.

Sebagai komunitas formal warga yang terkecil atau menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebut sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki otonomi, desa-desa di Indonesia sebenarnya sudah berkembang sangat pesat. Hal tersebut tidak terlepas dari kebijakan dan program pembangunan desa yang telah dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan dan program-program tersebut di antaranya adalah prioritas pembangunan dari daerah pinggiran sebagaimana tercantum dalam Nawacita ke-3, gelontoran dana desa, program padat karya tunai, pengembangan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades), pembanguna embung air desa, pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan beberapa program lainnya.

Pemberian dana desa yang diiringi dengan berbagai kebijakan pembangunan desa ternyata belum efektif dan tidak dapat serta-merta memberikan ‘daya lenting’ terhadap kesejahteraan masyarakat desa dengan berbagai alasan yang mengiringinya (Sulastri, 2016; Aziz, 2016; Kambey, 2016; Meutia & Liliana, 2017; dan Amalia



dkk., 2018). Oleh karena itu, desa tetap perlu berinovasi dalam menjalankan roda pembangunan dengan harapan mampu meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat desa yang lebih berkeadilan. Akibatnya tidak sedikit desa yang akhirnya berinovasi dari tingkat akar rumput, salah satunya dengan memilih transformasi desa menjadi desa wisata.

Desa wisata diketahui mampu mendongkrak pendapatan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi yang muncul seiring inovasi yang dilakukan. Bercermin dari desa wisata terbaik di Indonesia, Desa Pentingsari di Yogyakarta yang bertransformasi menjadi desa wisata sejak tahun 2008 ini, mampu meningkatkan pendapatan warga desa secara signifikan jika dibandingkan sebelum menjadi desa wisata. Pada tahun 2017 omset warga desa tersebut dari pengelolaan pariwisatanya mencapai Rp2,5 miliar per tahunnya, melonjak dari hanya sebesar Rp30 juta dalam setahun pada tahun 2008. Hal ini diakibatkan dari tumbuhnya *homestay* di sana, dari hanya sebanyak 10 buah pada tahun 2008 hingga terdapat 50 buah pada tahun 2017 serta jumlah wisatawan yang datang mencapai sekitar 35 ribu wisatawan dalam setahun.

Angka kuantitatif tersebut menunjukkan bahwa transformasi menjadi desa wisata merupakan salah satu solusi yang tepat untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat desa. Oleh karena itu, penting bagi desa untuk melakukan inovasi secara mandiri dari tingkat akar rumput melalui model '*bottom up*'. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menjawab 'kegagalan' dari jangkauan berbagai



kebijakan dan inovasi yang dilakukan secara konvensional dengan model *'top-down'*. Terlebih lagi, sektor pariwisata diprediksi akan *booming* pasca-pandemic Covid-19.

## Gagasan Utama

Dorongan kompetisi tentu membuat lembaga formal, otoritas pemerintahan, maupun organisasi profit biasa melakukan inovasi (Hana, 2013 dan Shqipe dkk, 2013). Otoritas pemerintahan berinovasi untuk memenuhi kebutuhan publik yang semakin kompleks dengan mengembangkan layanan publik (Koch & Hauknes, 2005). Sedangkan organisasi profit (sektor privat) berinovasi untuk menembus pasar yang lebih luas, mempertahankan eksistensi perusahaan mereka, dan tentunya profit perusahaan yang lebih besar (Shqipe dkk, 2013). Akan tetapi, inovasi model konvensional *top-down* tersebut ternyata gagal dalam memberikan solusi terhadap masalah komunitas pada tingkat lokal (Smith & Stirling, 2016; Hossain, 2016; dan Dana, 2019) sehingga inovasi konvensional perlu mengembangkan metode baru yang lebih sesuai dengan kondisi lokal (Ahmed & Al-Roubaie, 2012). Inovasi akar rumput akhirnya tumbuh sebagai jawaban kesenjangan tersebut dan melengkapinya (Ornetzeder & Rohrer, 2013).

Contoh nyata yang dapat dilihat dari kegagalan model *top-down* dalam menyentuh komunitas masyarakat lokal di tingkat pedesaan didasarkan pada beberapa riset terdahulu, khususnya yang membahas tentang efektivitas program dana desa. Beberapa peneliti terdahulu



sepakat bahwa pemberian dana desa yang diiringi dengan berbagai kebijakan pembangunan desa ternyata belum efektif dan tidak dapat serta-merta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Sulastri, 2016; Aziz, 2016; Kambey, 2016; Meutia & Liliana, 2017; dan Amalia dkk., 2018). Hal tersebut tentu menjadi peluang bagi inovasi akar rumput dengan model *bottom up* untuk tampil sebagai solusi komunitas dalam gap yang terbentuk.

Desa Wisata Pentingsari di Yogyakarta telah menunjukkan keberhasilan dari produk inovasi akar rumput yang mereka lakukan sejak bertransformasi menjadi desa wisata pada tahun 2008. Konsep desa wisata yang mereka tawarkan berhasil menarik wisatawan hingga mencapai sekitar 35 ribu wisatawan dalam setahun. *Homestay* (rumah inap) di sana juga tumbuh signifikan dari hanya sebanyak 10 buah pada tahun 2008 hingga menjadi 50 buah pada tahun 2017. Akibatnya pendapatan ekonomi warga desa dari pengelolaan pariwisata mencapai Rp2,5 miliar per tahunnya, melonjak dari hanya sebesar Rp30 juta dalam setahun pada tahun 2008.

Peningkatan pendapatan ekonomi warga Desa Wisata Pentingsari didasarkan atas kebersamaan masyarakat yang dilakukan. Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan ekonomi dapat dirasakan secara berkeadilan dan berkelanjutan. Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa keberhasilan Pentingsari sebagai desa wisata terbaik tidak bisa dilepaskan dari peran masyarakat melalui kesadaran diri sendiri mengelola dan mengembangkan Pentingsari sehingga menjadi sekarang (Dispar



DIY, 2014). Sementara itu Sella (2016) menyebut bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Pentingsari sangat tinggi dengan terlibat langsung menyiapkan *homestay*, makanan untuk pengunjung, dan menangani paket wisata yang sudah direncanakan. Sedangkan pada riset lainnya, Tyas & Asnawi (2014) menyebutkan bahwa 90 persen warga Pentingsari terlibat dalam kegiatan usaha pariwisata di sana, hanya sedikit berbeda dengan Suarthana (2015) yang menyebutkan bahwa 85 persen masyarakat Pentingsari mendukung pengelolaan dan pengembangan desa wisata sehingga berdampak positif dalam peningkatan perekonomian masyarakat. Berbagai riset tersebut menunjukkan bahwa perwujudan ekonomi berkeadilan ternyata memang mampu dilakukan melalui kegiatan atau inovasi dengan model *bottom-up* dari komunitas akar rumput.

Keberhasilan Pentingsari dalam mewujudkan ekonomi berkeadilan dengan melakukan inovasi akar rumput melalui transformasi menjadi desa wisata perlu direplikasi oleh komunitas desa dari berbagai daerah lain. Untuk hal ini, pemerintah pada tingkat yang lebih tinggi pada akhirnya harus mengambil peran dalam pengelolaan peluang tersebut. Lantas bagaimana pemerintah dapat mengambil langkah konkret untuk membantu difusi dan replikasi inovasi tersebut ke banyak desa lainnya? Tulisan ini akan coba memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut melalui analisis faktor yang memengaruhi sebuah proses inovasi akar rumput. Hal-hal yang menjadi faktor pendorong perlu dijaga dan dikembangkan, sedangkan hal-hal yang menjadi faktor penghambat



perlu diselesaikan dan jika perlu dihilangkan. Oleh karena itu, langkah pertama adalah mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi faktor pendorong maupun faktor penghambat dari inovasi akar rumput itu sendiri.

Mengutip dari berbagai literatur terdahulu, kita dapat menemukan beberapa hal-hal yang menjadi penentu atau faktor-faktor yang memengaruhi proses inovasi akar rumput (Hua dkk., 2010; Ross dkk., 2012; Abrol & Gupta, 2014; Seyfang & Longhurst, 2016; Smith & Stirling, 2016; Dana dkk., 2019; dan Jones dkk., 2019). Masing-masing ahli memang memiliki pandangan tersendiri tentang hal-hal apa saja yang menjadi faktor-faktor tersebut. Namun, setidaknya ada beberapa hal yang menjadi irisan dari pandangan-pandangan mereka. Hal-hal yang menjadi faktor pendorong maupun penghambat dari inovasi akar rumput adalah sebagai berikut:

### **A. Faktor Pendorong**

- 1) Motivasi/keinginan yang tinggi untuk mencari masalah komunitas;
- 2) Kuatnya jaringan komunitas yang ada;
- 3) Tidak memerlukan teknologi maupun biaya yang tinggi;
- 4) Adanya cerita/pembelajaran inspiratif yang sebanding dari pihak eksternal.

### **B. Faktor Penghambat**

- 1) Dukungan pendanaan yang minim;
- 2) Tidak ada *platform* komunikasi khusus antarinovator;



- 3) Trilema sosial-komersial-budaya;
- 4) Ketergantungan pada tokoh sentral.

Beberapa hal yang menjadi faktor-faktor tersebut perlu direspons dengan tepat oleh pemerintah untuk menyuburkan inovasi akar rumput di daerah lain di Indonesia. Sekali lagi, kuncinya adalah dengan menjaga dan mengembangkan faktor pendorong serta menyelesaikan atau bahkan menghilangkan faktor penghambat.

Secara pragmatis, langkah yang dapat dilakukan pemerintah melalui instansi terkait untuk menjaga dan mengembangkan faktor pendorong tumbuhnya inovasi akar rumput adalah sebagai berikut:

**Pertama**, memastikan keterpaduan data desa di Indonesia. Pemerintah melalui kementerian terkait, baik itu Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal maupun Kementerian Dalam Negeri perlu terus memutakhirkan (*update*) data desa secara terus-menerus. Artinya, data tentang klasifikasi desa, baik itu desa mandiri, maju, berkembang, maupun tertinggal/sangat tertinggal (SK Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendes Nomor 30 Tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa) haruslah terkini dan valid. Dengan demikian, pemerintah dapat menentukan skala prioritas dan sasaran program dan kebijakan pembangunan desa yang tepat, terutama bagi desa berkembang maupun desa tertinggal/sangat tertinggal.

Data desa, terutama bagi desa berkembang maupun desa tertinggal/sangat tertinggal juga perlu memiliki kedalaman yang



baik, termasuk hingga mengetahui potensi desa. Hal ini dilakukan agar pemerintah dapat melakukan pendekatan yang tepat terhadap pembangunan di desa, termasuk melalui pendekatan pembangunan wisata berbasis desa. Dalam kaitannya dengan kedalaman data, pemerintah juga harus mengetahui struktur komunitas desa; siapa aktor sentral, bagaimana kerapatan (*density*) hubungan sosial antaranggota masyarakat, apa motivasi/keinginan utama mereka, hingga bagaimana struktur budaya yang ada di desa tersebut. Dengan demikian, pemerintah dapat menentukan pendekatan yang tepat untuk masuk ke dalam komunitas tersebut dan mendorong motivasi yang lebih kuat kepada warga desa agar mau mengembangkan potensi wisata desanya dengan bertransformasi menjadi desa wisata.

**Kedua**, menjaga kerapatan jaringan sosial antarwarga desa yang telah eksis serta kemungkinan memperkuat/memperluas jaringan tersebut. Warga desa memang memiliki kerapatan hubungan sosial yang sangat tinggi, sedikit berbeda dengan banyak masyarakat di kota. Hal ini seyogianya menjadi modal yang kuat bagi warga desa dalam membangun desanya. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa kehadirannya di tengah warga desa tidak akan melemahkan jaringan eksis tersebut dan mungkin dapat membantu membuatnya makin kokoh dan makin luas. Dalam hal ini pendekatan-pendekatan berbasis sosio-antropologis yang tepat mungkin dapat dilakukan.

Penguatan jaringan komunitas masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan lebih mengintensifkan komunikasi formal



maupun informal dengan dan antaranggota masyarakat. Kuatnya jaringan sosial sangat dipengaruhi oleh kontak yang terjadi di antara berbagai pihak. Dengan cara demikian, kerapatan atau kekuatan jaringan sosial salah satunya dipengaruhi oleh bagaimana kontak yang sering dilakukan antarpihak (Burt, 2003). Selain memperkuat, kehadiran pemerintah juga diharapkan mampu memperluas jaringan komunitas yang ada. Pemerintah dapat menjadi fasilitator untuk menghubungkan jaringan masyarakat desa ke pihak eksternal yang dapat membantu transformasi desa menjadi desa wisata, baik itu dukungan pendanaan, publisitas, maupun sosialisasi. Lebih dari sekadar menjadi penghubung, pemerintah dapat mengambil peran untuk membantu calon desa wisata membangun komunikasi dan lobi dengan pihak eksternal serta memastikan hubungan yang saling menguntungkan antara keduanya (bukan malah komensalisme atau bahkan parasitisme yang merugikan pihak calon desa wisata).

**Ketiga**, memfasilitasi dan membantu proses perencanaan dan penganggaran calon desa wisata. Di awal kita telah sepakat bahwa desa yang mengubah statusnya menjadi desa wisata sejatinya telah melakukan inovasi akar rumput. Namun, perubahan yang dilakukan ini tentu bukanlah perubahan yang serta-merta seperti membalikkan telapak tangan. Meskipun inovasi akar rumput itu sendiri tidak memerlukan teknologi dan atau biaya yang tinggi, tetapi calon desa wisata tetap harus melewati fase administratif yang akuntabel. Dengan keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh desa, pemerintah perlu hadir pada poin ini. Pemerintah tidak boleh tampil



sebagai sosok yang ‘galak’ dan anti terhadap kesalahan administratif, tetapi justru menjadi sosok ‘pengayom dan pengarah’ yang sabar dan baik. Tujuannya, fase administratif ini dapat dilalui dengan baik secara kolaboratif dan akuntabel. Apalagi inovasi model ini sendiri memang tidak menuntut penggunaan teknologi dan atau dana yang tinggi sehingga perubahan substansi perencanaan dan penganggaran mungkin tidak akan terlalu rumit.

**Keempat**, pemerintah dapat menghadirkan tokoh sentral dari contoh desa wisata yang secara nyata berhasil mengembangkannya. Cerita/pembelajaran inspiratif yang sebanding dari pihak eksternal tersebut akan membuat calon desa wisata termotivasi lebih tinggi untuk mereplikasi produk inovasi tersebut. Oleh karena itu, pemerintah perlu kembali menjadi fasilitator dalam memberikan ‘panggung’ terhadap tokoh sentral atau inovator yang berhasil mengembangkan desa wisata di tempatnya. ‘Panggung’ atau forum tersebut dapat diwujudkan dalam skala nasional yang dihadiri/didengar oleh tokoh-tokoh dari calon desa wisata maupun secara ‘*village to village*’ dengan menghadirkan tokoh tersebut berbicara langsung di lokasi dan di depan masyarakat yang juga ingin mengubah status desanya menjadi desa wisata.

Empat hal di atas merupakan langkah yang dapat dilakukan pemerintah untuk menjaga dan mengembangkan faktor pendorong dari tumbuhnya inovasi akar rumput. Sedangkan jika dilihat dari faktor penghambat, pemerintah secara pragmatis dapat melakukan upaya sebagai berikut:



**Pertama**, pemerintah perlu merancang insentif bagi desa yang berinovasi dan bertransformasi menjadi desa wisata. Meskipun inovasi akar rumput merupakan inovasi berbiaya rendah, tetapi tidak dapat dimungkiri bahwa inovasi ini tetap membutuhkan dukungan keuangan (Hua dkk., 2010). Hua dkk mengatakan bahwa pemerintah perlu menyadari bahwa inovasi akar rumput seyogianya memiliki potensi dalam penciptaan lapangan kerja dan penghapusan kemiskinan. Oleh karena itu, stimulan berupa insentif yang diberikan pemerintah di luar dari Dana Desa yang digelontorkan akan sangat bermanfaat bagi desa yang berinovasi dan membangun potensi wisata di desanya.

Secara teknokratik, rancangan pemberian insentif tersebut tentu tetap disusun secara profesional, akuntabel, dan menimbang kemampuan keuangan negara, terlebih pascapandemi Covid-19 yang ‘menguras’ kas negara secara signifikan. Rancangan insentif ini pun tentu memiliki nilai politis tinggi sehingga dapat diprediksi akan menjadi isu publik dan diskursus di tengah lembaga negara maupun masyarakat. Untuk hal ini pemerintah perlu memiliki kemampuan komunikasi yang baik agar mampu menjelaskan kepada publik bahwa rancangan dana insentif tersebut benar-benar akan digunakan secara profesional, akuntabel, efisien, dan lepas dari nilai politik apa pun. Tujuannya tak lain adalah agar desa-desa Indonesia dapat memanfaatkan dana tersebut, meski tak harus besar, untuk menjadi ‘modal’ dalam pembangunan potensi wisata desa masing-masing.



**Kedua**, pemerintah perlu merancang *platform* komunikasi khusus sebagai tempat berinteraksi, berbagi ilmu dan pengalaman, sekaligus memperluas jaringan yang berisikan para tokoh sentral desa di Indonesia, inovator maupun calon inovator yang tertarik mengembangkan inovasi akar rumput. Bila perlu pemerintah Indonesia dapat meniru keberhasilan negara lain seperti India (*Honey Bee Network*, *GIAN*, dan *NIF*) maupun Malaysia (Yayasan Inovasi Malaysia) yang membangun lebih dari hanya sekadar *platform* komunikasi, tetapi mampu membangun institusi khusus untuk pengembangan inovasi akar rumput di negara masing-masing. India bahkan telah berhasil menjadi contoh bagi dunia dalam pengembangan inovasi akar rumput. Mereka berhasil memberikan perlindungan kekayaan intelektual bagi para inovator akar rumput, menyebarkan pencapaiannya, dan mendukung inovator akar rumput atas nama inovator itu sendiri. Mereka juga berhasil membangun *platform* antarinovator akar rumput, mengintervensi sistem pendidikan, memberikan penghargaan bagi inovator akar rumput terbaik, membantu komersialisasi produk inovasi, membantu pencarian dana, menghubungkan inovator dengan investor dan perusahaan, dan mendorong pemerintah mengeluarkan program pemerintah untuk memberikan dukungan finansial bagi inovator akar rumput.

Keberhasilan India dalam mengelola inovasi akar rumput dapat menjadi *role model* bagi pemerintah Indonesia. Sekali lagi, tantangan untuk menuju ke arah perubahan tersebut sangat berat,

baik secara politis maupun teknokratis. Namun, harapan tidak serta-merta tertutup begitu saja. Apalagi setelah Presiden Joko Widodo menambahkan nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek). Pemerintah melalui BRIN bisa memulainya dari hal-hal kecil terlebih dahulu, seperti dengan memulai membuat *platform* komunikasi tersebut, menghubungkan mereka, dan membiarkan *transfer of knowledge and experience* itu terjadi di antara mereka.

**Ketiga**, pemerintah perlu membangun cara pandang dan orientasi bersama dengan masyarakat desa bahwa upaya membangun desa wisata harus didasarkan pada hal yang selaras antara tujuan sosial (mencari permasalahan komunitas secara bersama), komersial (memperoleh pendapatan ekonomi yang lebih baik), dan budaya (mengandalkan kearifan lokal desa sebagai potensi wisata desa). Cara pandang dan orientasi yang selaras membuat inovasi akar rumput yang diwujudkan dalam transformasi desa wisata akan menjadi lebih berkelanjutan. Tidak ada satu tujuan yang lebih ‘minor’ ataupun lebih ‘mayor’ dibanding tujuan yang lain.

Secara teknokratis, tujuan tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan desa pada awal pembangunan desa wisata. Sebagaimana upaya ketiga dalam pengembangan faktor pendorong sebelumnya, pemerintah perlu hadir memfasilitasi proses perencanaan tersebut. Namun, hadir saja tidaklah cukup. Pemerintah perlu terus melakukan pengawasan dan evaluasi berkesinambungan pada perjalanan pengelolaan desa wisata. Tujuannya agar konsensus awal



dengan tujuan sosial-komersial-budaya tetap berjalan selaras satu dengan lainnya dan tidak justru menimbulkan ‘trilema’ atau tarik-menarik yang membuat inovasi akar rumput tersebut cepat gagal (Jones dkk., 2019).

**Keempat**, pemerintah perlu membangun sistem yang berkelanjutan. Sistem yang dimaksud merupakan sistem pada berbagai tingkatan administratif, terutama pada tingkat desa itu sendiri. Sistem berkelanjutan dimaksudkan agar desa tidak tergantung pada salah satu atau beberapa tokoh sentral saja, meskipun tak dimungkiri bahwa di suatu komunitas dan periode akan selalu ada tokoh sentral yang punya pengaruh atau *power* kuat bagi masyarakat lainnya. Sistem perlu disusun secara profesional dan visioner (diejewantahkan dalam dokumen perencanaan pembangunan desa). Diskursus menjadi lebih kompleks ketika muncul pertanyaan; bagaimana jika tokoh sentral itu justru datang dari aktor pemerintah itu sendiri? Inilah yang dikatakan di awal bahwa sistem berkelanjutan perlu dibangun dari berbagai tingkatan, termasuk pada sistem pemerintahan itu sendiri. Pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat, perlu menyadari bahwa ia pun bagian dari sistem itu sendiri sehingga dirinya sendiri harus lebih dulu profesional dan visioner.

## Kesimpulan

Nilai daya saing global inovasi Indonesia yang diukur dari indikator makro (anggaran *research and development*, hak paten,



aplikasi pintar, dan teknologi tinggi) mungkin memang lebih rendah daripada negara lain. Pemerintah harus menggaungkan inovasi secara terus-menerus dan perlu menaruh perhatian lebih pada inovasi di tataran komunitas akar rumput, khususnya di pedesaan. Peluang desa semakin terbuka lebar ketika sektor wisata diprediksi akan mengalami *booming* pasca-*pandemic* Covid-19. Berinovasi menjadi desa wisata merupakan pilihan tepat.

Desa wisata menjadi salah satu alternatif produk inovasi akar rumput yang perlu mendapat fokus lebih dari pemerintah. Inovasi desa model ini ditengarai mampu menciptakan kehidupan ekonomi yang lebih baik dan berkeadilan di samping menghadirkan pasar kerja. Kehadiran pemerintah melalui instansi terkait diharapkan menjadi aktor protagonis dalam menjaga keberlangsungan inovasi akar rumput di tingkat desa wisata dengan mengelola determinan atau faktor-faktor yang memengaruhi proses inovasi tersebut. Empat hal yang menjadi faktor pendorong perlu dikembangkan, sedangkan empat hal yang menjadi faktor penghambat perlu diantisipasi dan diatasi. Dalam melaksanakan upaya tersebut pemerintah dituntut memiliki kapabilitas yang kuat secara sosio-antropologis maupun teknokratik administratif. Tujuannya tidak lain adalah kelancaran proses inovasi akar rumput yang dilakukan desa dalam transformasi menjadi desa wisata, kepastian hukum yang mereka terima, serta tentunya dampak positif yang dapat segera dinikmati oleh masyarakat desa.[]



## Profil Penulis

Penulis merupakan *Oemar Bakri* lulusan terbaik Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXIII Tahun 2016. Penulis memegang penghargaan bintang Kartika Pradnya Utama I dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang diberikan langsung oleh Presiden Joko Widodo serta bintang Kartika Adhi Kertiyasa I dari Rektor IPDN. Saat ini penulis bertugas sebagai PNS di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sejak Oktober 2017 setelah meluluskan Latihan Dasar CPNS Golongan III (dulu disebut dengan Latihan Prajabatan) di Pusdiklat Kemendagri Regional Bukittinggi juga sebagai lulusan terbaik.

Sebelumnya, penulis pernah bertugas sebagai CPNS di Pemerintah Provinsi Bengkulu pada Tahun 2016 sebagai staf pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu (Oktober s.d. Desember 2016) serta Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu (Januari 2017 s.d. September 2017). Mendapatkan kesempatan sebagai *awardee* beasiswa Pusbindiklatren Bappenas RI, penulis kini sedang menjalani masa studi pascasarjana Strata 2 dengan status tugas belajar pada Prodi Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. (*email: muhlaks@gmail.com*).





# Epilog

**Kongres Kebudayaan Desa**

**Membaca Desa, Mengeja Ulang I-N-D-O-N-E-S-I-A:**

**Arah Tataan Indonesia Baru dari Desa**

*Oleh:*

*Ryan Sugiarto*

*(Ketua Penyelenggara Kongres Kebudayaan Desa,*

*Ketua Yayasan Sanggar Inovasi Desa)*

## **Pengantar: Cerita dari Ruang Kendali dan Operasi**

**T**epat dua hari sebelum Idulfitri (24 Mei 2020), ruang Pusdalop (Pusat Data dan Operasi) Balai Desa Panggunharjo masih tampak riuh. Sejumlah anak muda mengoperasikan komputer, mengelola sistem informasi, dan menulis modul mitigasi Covid-19.

Ruangan ini merupakan tempat konsolidasi dan mitigasi Covid-19 Desa Panggungharjo. Dari ruangan ini pula beberapa langkah mitigasi klinis dan nonklinis (sosial, ekonomi, keamanan) Desa Panggungharjo disusun untuk memandu seluruh *stakeholder* desa bersama-sama melawan Covid-19.

Desa Panggungharjo melalui Panggung Tanggap Covid-19 (PTC-19) mengajarkan bagaimana desa tidak harus melakukan *lockdown* total, tetapi justru menjadi pemecah masalah Covid-19. Desa Panggungharjo dalam situasi darurat telah melakukan serangkaian pencegahan dengan aksi tanggap melalui identifikasi kondisi klinis harian warganya, baik secara fisik maupun psikologis. Desa Panggungharjo berinisiatif menghadirkan pelayanan dari negara untuk penanganan Covid-19 dengan mengedepankan penggunaan teknologi melalui dua platform utama yakni Platform Lapor dan Platform Dukung.

Selain mitigasi klinis, ekonomi, dan sosial, desa juga mentransformasikan dirinya sebagai representasi negara yang paling depan untuk mengorganisir segala sumber daya. Pemerintah desa aktif menggerakkan kemampuan kerelawanan warga mulai dari logistik hingga bantuan nonfisik. Warga juga didorong menjadi warga negara aktif untuk saling membantu sesama dengan prinsip *tanggung renteng*. Semua dilakukan berbasis data desa.

Dari sisi mitigasi ekonomi, pasardesa.id menjadi platform penting pengelolaan ekonomi di tengah pandemi dan sesudahnya. Pasar desa menjadi *market place*—toko barang-barang warga desa—



agar ekonomi terus berputar di desa, alih-alih lari ke luar desa. *Tagline* berbagi belanja menjadi napas lini ini.

Bagaimana dari sisi tata pemerintahan dan pengaturan hidup bersama warga? Kongres Kebudayaan Desa disusun sebagai panduan merevisi rencana pembangunan jangka menengah desa. Tepat dua hari sebelum lebaran, gagasan ini dilahirkan sebagai respons terhadap pandemi dan bagaimana hidup serta kehidupan warga desa kemudian dirumuskan. Selama 2 minggu awal, konsep dirumuskan, kerangka acuan kerja dituliskan, 18 tema sekaligus *term of reference* disusun, ide digelindingkan. Dan kita tahu gagasan ini menjadi gerakan bersama. Cukup banyak jejaring kemudian turut mengusung gagasan ini, membantu dalam implementasi, pewacanaan gagasan, hingga perumusan-perumusan hasil Kongres Kebudayaan Desa. Pertanyaannya, kenapa Kongres Kebudayaan Desa?

## **Memahami Situasi di Tengah Pandemi**

Bangunan kebudayaan Indonesia bukanlah sesuatu yang terberi (*given*) begitu saja. Kebudayaan Indonesia adalah hasil interaksi historis pelbagai kebudayaan nusantara, mulai dari Melayu, Jawa, Bugis, Papua, Aceh, dan suku bangsa lain yang hidup dalam ruang kultural dan sosial kepulauan nusantara. Interaksi historis kebudayaan Indonesia itu adalah bukti sejarah kebudayaan kita yang dinamis. Interaksi jalin menjalin antarkebudayaan-kebudayaan nusantara menghasilkan rona kebudayaan yang plural sebagai kekayaan negara bangsa kepulauan. Terdapat lebih dari 17.000



pulau di Indonesia yang terhubung melalui media laut, pelayaran, perdagangan, dan pertukaran-pertemuan antarkebudayaan sejak berabad-abad lalu. Jadi, generalisasi bahwa kebudayaan Indonesia adalah umum dan abadi perlu kita kaji ulang.

Perubahan kebudayaan menempatkan manusia menjadi ekosistem hidup yang sangat berkuasa dengan teknologi yang ia miliki: mengeksploitasi alam habis-habisan dengan kecenderungan besar merusaknya, alih-alih hidup berdampingan dengan alam dan memeliharanya. Dengan teknologi, manusia memproduksi barang yang tak diperlukan. Nilai barang pun ditentukan oleh kemasan. Sebagai contoh, air yang seharusnya dimiliki oleh publik berubah kepemilikannya di tangan korporasi yang memproduksi dan mengemasnya dalam botol-botol plastik. Pertambahan nilai inilah yang menyebabkan harga air menjadi jauh lebih mahal ketimbang nilai aslinya.

Rantai produksi-konsumsi manusia pun semakin panjang. Pola ini mengingatkan kita bahwa dunia telah bergeser dari paradigma *kosmosentris* ke paradigma antroposentris. *Kosmosentris* memandang alam sebagai sesuatu yang sakral. Kosmos yang sakral membuat hidup manusia tidak terpisah dari alam. Dengan demikian, pada paradigma ini, manusia tidak melakukan perusakan terhadap lingkungan karena alam merupakan bagian tidak terpisahkan dari dirinya dan berada dalam pola relasi yang sederajat. Dalam paradigma antroposentrisme, manusia menjadi pusat segala sesuatu. Manusia sangat mengandalkan rasionalitas dan subjektivitas yang individualis. Hal ini berdampak

pada pola relasi manusia dan alam. Pola relasinya menjadi *subordinatif* dan *dominatif*. Alam tidak lagi dipandang sakral dan tidak menjadi bagian dari dirinya sendiri. Alam dianggap sebagai benda mati yang bisa diatur. Akibatnya, manusia seenaknya melakukan eksploitasi terhadap alam untuk kepentingan diri sendiri. Ujungnya, sistem ekonomi pun menjadi terbalik. Semula orang memproduksi untuk memenuhi kebutuhan, sementara sekarang sistem ekonomi berfokus menciptakan kebutuhan konsumsi (yang perlu atau tidak perlu) dan produksi pun mengikutinya. Akibat dorongan konsumsi yang selalu diciptakan dan produksi yang terus digenjut maka bumi kita pun menjadi korban. Bumi dieksploitasi habis-habisan. Kapitalisme neoliberal diamini meski bencana ekologis mengintip dan perlahan pasti datang.

Hari-hari ini manusia tengah menuai bencana itu. Sejak Desember 2019, pelan tapi pasti, dunia memasuki *retreat* yang panjang. Aktivitas berhenti, pemerintahan di seluruh dunia menghadapi virus Covid-19 yang belum ditemukan vaksinnnya. Alam menunjukkan taringnya, mengurung manusia untuk tidak serakah. Manusia kemudian menjadi resah: ekonomi, agama, teknologi, birokrasi terkendala luar biasa. Negara-negara yang sebelum Covid-19 memberi jarak pada pengaturan ekonomi dan memberikan tempat seluas-luasnya kepada peran swasta melalui kapitalisme neoliberal kini kembali memainkan kendali penuh meski akhirnya tampak keteteran dan merapuh. Birokrasi yang menjadi



kaki tangan negara macet. Semua orang frustrasi dan kecewa dengan gerak negara yang cenderung lamban berhadapan dengan Covid-19<sup>1</sup>.

Di Indonesia, sejak pertengahan Maret 2020, seluruh pekerja kantor mengubah ritme kerjanya menjadi *work from home* (WFH). Kondisi ini menjadi pukulan telak di berbagai sektor kehidupan. Kelas menengah yang biasanya sibuk beraktivitas di berbagai tempat kini berdiam di rumah. Sektor informal bubar karena sepihnya aktivitas akibat pembatasan sosial berskala besar. Pekerja warteg, buruh bangunan, pedagang kecil, tukang parkir serabutan, pengemudi ojol dan taksi, sampai mal, kafe, gedung bioskop, hotel dan ruang-ruang diskusi serta seminar mengalami hibernasi. Saat roda ekonomi berhenti, risiko yang dihadapi ke depan semakin menyheramkan. Sebanyak 1,2-2 juta pekerja terkena PHK<sup>2</sup>.

Angka kemiskinan yang sejak reformasi bergulir coba dikurangi, dalam sekejap naik berkali-kali lipat. Mereka yang sempat terangkat dari kemiskinan, akibat Covid-19 akhirnya kembali ke jurang kemiskinan. Bantalan dan jaring pengaman sosial diturunkan. Dana 110 triliun direlokasi menjadi bantuan sosial bagi masyarakat. Hingga 8 Mei 2020, 479 daerah telah menyampaikan laporan penyesuaian APBD. Dari laporan ini, komposisi belanja daerah mengalami perubahan, yaitu adanya penurunan belanja barang/

---

1. Wibowo, A. Setyo. 2020. "Covid 19: Meditasi Heideggerian". Dalam *Majalah Basis*, Nomor 05-06, Tahun ke 69 2020, hlm. 11.

2. Wibowo, A. Setyo. 2020. Ibid. Lihat pula <http://www.cnbcindonesia.com/news/20200408213040-4-150737/bikin-merinding-12-juta-pekerja-kena-phk-dirumahkan>.

jasa dari 24,87% menjadi 20,86% dan modal dari 18,16% menjadi 12,89%. Di sisi lain, ada kenaikan belanja lainnya, yaitu dari 24,63% menjadi 30,33% yang ditujukan untuk bansos dan belanja tidak terduga. Total belanja yang direalokasi dan *refocusing* sebesar Rp51,09 triliun, yang ditujukan untuk bidang kesehatan (Covid-19) sebesar Rp22,34 triliun, jaring pengaman sosial sebesar Rp18,88 triliun, dan penanganan dampak ekonomi sebesar Rp9,88 triliun<sup>3</sup>.

Selain dampak ekonomi, Covid-19 juga membawa dampak lain dalam kehidupan sosial masyarakat. Timbul rasa curiga dan hilangnya kepercayaan terhadap orang-orang di seputar kita, juga pada orang yang kita belum kenal. Sebagai contoh, saat membeli makanan, baik di rumah makan maupun warung kaki lima, ada kecurigaan yang muncul. Apakah pelayan bersentuhan dengan orang yang terjangkit virus atau tidak, apakah pekerja warung mencuci tangan pada saat mengolah makanan yang dipesan atau tidak, dan seterusnya. Keraguan pun muncul. Prasangka dan diskriminasi terus terjadi, bukan hanya karena apakah seseorang menderita Covid-19, melainkan juga karena identitas yang sudah melekat padanya. Mereka diberikan label, stereotip, didiskriminasi, diperlakukan berbeda, dan/atau mengalami pelecehan status karena terasosiasi dengan sebuah penyakit. Relasi berubah, perilaku pun demikian.

Di sektor pendidikan, sekolah dan kampus lumpuh. Seluruh proses pendidikan dilakukan dari rumah. Covid-19 menyadarkan

3. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-perkembangan-ekonomi-dan-refocusing-anggaran-untuk-penanganan-covid-19-di-indonesia/>.



kita bahwa pendidikan yang selama ini sepenuhnya ditanggungkan pada sekolah telah berubah dan dikembalikan pada intinya, yaitu pendidikan keluarga. Orang tua diajak kembali memperhatikan pendidikan anak. Anggapan bahwa sekolah sebagai penanggung jawab tunggal atas pengajaran kini direvisi total. Kondisi ini membuat seluruh tatanan keluarga berbenah. Mau tidak mau, keluarga diharapkan menjadi tangguh karena ia satu-satunya ruang yang dianggap aman secara fisik maupun secara psikologis dari Covid-19.

Wabah ini telah merenggut ribuan nyawa manusia dan membuat dunia panik, takut, dan cemas. Orang tak lagi mampu menguasai serta mengendalikan diri dengan menciptakan situasi yang kondusif. Orang cenderung responsif terhadap penyebaran wabah ini sampai-sampai melupakan orang di sekitarnya. Bahkan berita-berita hoaks oleh berbagai media pun akan dibenarkan karena setiap pribadi dihalusinasi oleh keadaan.

Pada bagian lain, tata kelola dan perlakuan kita terhadap alam harus direfleksikan ulang. Proyek modernitas yang menurut Immanuel Kant merupakan proses “pendewasaan manusia” harus dikritik agar proyek ini tidak terus-menerus merusak alam yang artinya merusak dirinya sendiri (manusia). Salah satu pendapat kritis muncul dari filsuf Fritjof Capra yang mengungkapkan keberadaan dan makna kehidupan manusia dalam segala tingkatan, baik pada level biologis sampai ke level ekonomis dan spiritual, tidak bisa dilepaskan dari keberadaan alam semesta dan seluruh isinya.

Berdasarkan pandangan Capra, pandemi Corona adalah bentuk pembalasan alam terhadap manusia yang telah mengingkari dirinya sendiri. Dalam terminologi Jawa, kita mengenal *sapa nandur bakal ngunduh* ‘siapa yang menanam akan menuai’.

Covid-19 telah membuat peradaban manusia modern dikoyak-koyak menjadi tak berharga. Kehidupan manusia modern yang dibangun berdasarkan pada kecepatan gerak, *linearitas* berpikir, ketajaman rasio, kemenangan cara pandang individualis, dan perang teknologi kini lumpuh total di hadapan virus yang tak kasat mata. Kita baru sadar bahwa manusia modern adalah manusia-manusia rapuh. Peradaban politik, ekonomi, sosial di bawah bendera modernisme kini berada di titik nadir dan layak untuk kembali dipertanyakan ulang. Mau dibawa ke manakah kehidupan manusia dan bumi ini? Apakah kita sudah berada di arah membangun yang benar? Mungkin inilah waktu yang diberikan kepada manusia untuk mempertanyakan apa yang telah mereka jalani selama ini. Mungkinkan manusia sedang berada pada ujung kepunahannya?

## **Pandemi yang Mendekonstruksi dan Upaya Merumuskan Tatanan Baru**

Fakta dan data virus Corona membuka sudut pandang bahwa ketidakpastian kognitif berhubungan dengan tingkat ketidakpastian yang terkait dengan kepercayaan dan sikap. Dalam situasi ini, satu sama lain tidak mampu diatasi oleh perusahaan industri kesehatan.



Setidaknya sejauh ini positivisme juga fenomenologi belum mampu menjawabnya.

Covid-19 menyadarkan kita bahwa manusia dan sistem pemikirannya sangat rapuh dan rentan. Kapitalisme sebagai buah gagasan manusia telah menghancurkan dirinya sendiri. Konsepsi neoliberalisme luluh lantak oleh Covid-19. Ideologi sistem ekonomi pasar kapitalisme dan sistem demokrasi dunia mengindikasikan kegagalan dalam membangun industri kesehatan untuk menghormati martabat manusia yang dibuktikan dengan langkanya alat-alat kesehatan. Di beberapa negara, industri tradisional mulai dilibatkan untuk menanggulangi kondisi tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa kapasitas basis ideologi pembangunan ekonomi tidak dapat menjamin martabat manusia dan keadilan sosial. Sementara sosialisme juga tak mampu menawarkan apa pun dalam kondisi semacam ini.

Kesimpulannya, ideologi ekonomi dan paradigma pembangunan kesehatan manusia dengan fakta empiris data wabah virus Corona sama dengan apa yang dikatakan oleh Daniel Bell dalam buku *The End of Ideology* (1960). Ia menuturkan bahwa ideologi *grand-humanistik* yang lebih tua, yang berasal dari abad ke-19 dan awal abad ke-20 telah habis, dan ideologi baru yang lebih baik akan segera muncul. Daniel Bell berpendapat bahwa ideologi ekonomi, demokrasi, dan sistem politik telah menjadi tidak relevan di antara orang-orang yang “masuk akal”, dan pemerintahan masa depan akan didorong oleh penyesuaian dekonstruksi tatanan baru.



Maka perlu upaya dekonstruksi atas isme-isme dan instrumen pelaksanaannya. Tatanan baru pun mesti dirumuskan. Meminjam konsep filsafat analitik pascamodern yang dipopulerkan oleh Jacques Derrida (1930-2004), *dekonstruksi* ditujukan kepada upaya pembongkaran terhadap kemapanan pemaknaan simbol dan bahasa (analitik) yang melekat kesedaran manusia. Dekonstruksi istilah gerak sosial dalam konteks bencana wabah justru membatasi gerak persinggungan fisik yang bermuara pada jalinan sosial dan bertentangan dengan pemaknaan yang selama ini melekat kesedaran masyarakat umum sebagaimana aktivitas jabat tangan, berpelukan, atau aktivitas fisik lain. Gerak sosial tersebut kemudian dapat diarahkan kepada aktivitas akal budi yang melibatkan segenap instrumen *ruhiyah* meliputi rasa, karsa, dan cipta, untuk memproduksi konsep gerak sosial baru.

Selama ini, Covid-19 sering kali dinilai dari sisi negatif sebagai sebuah ancaman, tetapi satu hal yang luput dari kesadaran kita adalah bahwa wabah ini mendekonstruksi semua tatanan. Berangkat dari kenyataan bahwa pemerintah tidak membangun perencanaan yang baik dan selalu bergerak lambat, tata ruang itu kemudian diambil alih oleh swasta dan kekuatan modal. Tebersit di pikiran, “Apakah Covid-19 diciptakan bukan bebas nilai? Apakah ada sebuah gelombang baru pasca-Covid-19? Apakah ada sebuah upaya dekonstruksi dan konstruksi lain yang sudah disiapkan?”



## Hipotesis

Dalam kondisi ini penting untuk setidaknya membangun gagasan alternatif dan konstruksi baru dalam relasi-relasi sosial kebudayaan. Selama 3-4 bulan bercengkerama dengan Covid-19 telah menyadarkan banyak hal. *Pertama*, kita tidak bisa hidup sendiri. Institusi sekolah dan agama tidak lagi penting dan keluarga menjadi sandaran akhir sekaligus juga awal dari segalanya. Nilai utama relasi sosial berasal dari keluarga hingga melahirkan etik baru dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, politik, budaya, dan seterusnya.

Covid-19 mendekonstruksi semua tatanan tanpa teriakan revolusi. Maka hipotesis yang perlu dibuktikan adalah apakah puncak dari relasi sosial adalah gotong royong? Apakah puncak dari relasi ekonomi adalah kerja sama? Apakah puncak dari relasi politik adalah musyawarah? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang ingin diuji dan dibuktikan dari serangkaian agenda Kongres Kebudayaan Desa. Dan kesemuanya itu tentu saja membutuhkan kesetaraan yang oleh Habermas dinamai sebagai *demokrasi deliberatif*. Rebut kesempatan untuk membangun tatanan yang lebih bermartabat, lebih berkeadilan, dan lebih *berkesetaraan*. Dan hal ini tidak lepas dari nilai-nilai luhur nusantara, sehingga gagasan alternatif ini bercorak khas nusantara. Kita tidak lagi mengadopsi gagasan dari luar yang berjarak dengan konteks kita. Kita punya gagasan gotong royong, selain sosialisme dan kapitalisme.

## Kongres Kebudayaan Desa

Kita telah mencermati, mengalami, dan berjibaku dengan Covid-19 dan kenyataannya hingga hari ini kita belum bisa keluar darinya. Namun, tidak ada kata menyerah di dalamnya. Perjuangan harus berumur panjang. Maka siasat-siasat kebudayaan perlu dirumuskan untuk mengelak dari kehancuran dan kehilangan nyawa yang lebih banyak lagi, mengelak dari kepunahan manusia. Pandemi memberikan sisi positif bahwa manusia dengan segala daya, akal budi, dan kreativitasnya harus mencari ruang “perlawanan” yang lebih baik. Menyerah berarti mengantarkan kematian dan hancurnya kemanusiaan. Maka tidak ada kata lain selain terus berjuang. Dan perjuangan itu harus dimulai dari desa, sebuah entitas negara yang paling dekat dengan warganya. Tidak ada jenjang pemerintahan yang lebih dekat dengan warga selain desa.

Karena itulah perlu disusun serangkaian upaya untuk merumuskan tata nilai dan tata kehidupan baru bernegara dan bermasyarakat di era pandemi dan sesudahnya. Sekali lagi, dimulai dari desa. Apa dan bagaimana tatanan baru itu? Kongres Kebudayaan Desa (KKD) yang akan menjawabnya.

Kongres Kebudayaan Desa adalah pertemuan antara para pemangku desa (pemerintah desa, lembaga, komunitas, dan warga desa), para pemikir, akademisi yang memiliki ketertarikan terhadap isu desa ataupun bisa jadi lahir dan tumbuh dalam ekosistem desa, para praktisi, birokrat, pelaku bisnis, dan pekerja media yang



berupaya merumuskan kembali arah tatanan Indonesia baru dari desa.

Kongres ini melibatkan beberapa *stakeholder* yang meliputi ABCGFM: akademisi, birokrasi, *community, government, finance*, dan media. Kesemuanya akan berkontribusi untuk bersama-sama dengan warga desa merumuskan tatanan Indonesia baru dari desa. Kongres ini bergerak pada dua ranah sekaligus. *Pertama*, tataran konseptual dengan menggali pemikiran-pemikiran dari para akademisi, pemikir, peneliti, praktisi, birokrat, pelaku bisnis, dan media yang menghasilkan dokumen-dokumen konseptual hasil olah pikir dan nalar budi. *Kedua*, tatanan praksis dengan menghasilkan dokumen panduan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) yang memberi pola tata kelola pemerintahan dan tata hidup baru warga desa untuk desa-desa di Indonesia.

## **Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara**

Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara adalah bagian dari pelaksanaan Kongres Kebudayaan Desa. Dua bagian ini menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi. Kongres Kebudayaan Desa sebagai bagian dari upaya serius untuk merumuskan kembali tatanan Indonesia baru dari desa, sedangkan Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara adalah bagian dari perayaan kebudayaan, perayaan gagasan, rekognisi desa-masyarakat adat di Indonesia. Perayaan nusantara. Kongres adalah perayaan kebudayaan itu sendiri.



Maka tepat di sini jalinan dan upaya saling melengkapi antara bentuk kongres dan festival mewujudkan. Istilah *kongres* yang selama ini lekat dengan kesan serius dan penuh khidmat diubah menjadi sebuah perayaan. Pengertian *kongres* yang biasa dipahami sebagai bentuk pertemuan tertinggi, eksklusif, dan terpusat dari organisasi-organisasi sosial dan politik, kini dikembangkan menjadi semacam perhelatan dari ruang-ruang partisipasi masyarakat.

Maka festival kebudayaan ini didorong untuk merayakan dua hal sekaligus. *Pertama, culture experience*. Pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke dalam sebuah pengalaman kultural. Dengan demikian kebudayaan lokal selalu dapat lestari. *Kedua, culture knowledge* yang merupakan pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara membuat suatu pusat informasi mengenai kebudayaan yang dapat difungsionalisasi ke dalam banyak bentuk. Tujuannya adalah untuk edukasi ataupun untuk kepentingan pengembangan kebudayaan itu sendiri.

## **Membaca Desa, Mengeja Ulang I-N-D-O-N-E-S-I-A: Arah Tatanan Indonesia Baru dari Desa**

Desa adalah tempat di mana sebagian besar kita berasal. Karenanya kita lebih fasih membaca desa *tinimbang* Indonesia. Faktanya, desa lebih dulu ada dibandingkan Indonesia. Bahkan hingga hari ini kita masih selalu saja terbata-bata membaca Indonesia. Artinya kita perlu mengeja ulang Indonesia. *Reason d'etre* agenda ini adalah desa maka yang harus dieja ulang adalah Indonesia yang sudah



sengkarut. Apakah Indo-nesia, Indon-esia, Ind-one-sia, In-do-nesia ataukah akan kita sebutkan dalam satu tarikan napas: Indonesia? Artinya, tanpa (huruf) D-E-S-A, kata Indonesia tak akan sempurna.

Bagaimana cara kita mengeja ulang sangat tergantung dari kemampuan kita membaca desa sebagai ibu bumi. Desa menjadi sosok ibu yang *nuturing, ngopeni, ngrumat, ngemonah, nggulowentah, murakabi* semua anggota keluarga.

Lihatlah di masa pandemik seperti ini. Orang-orang desa yang merantau ke kota mengalami kecemasan. Ia yang papa tak diterima di lingkungan kota dan terusir darinya. Kota menjadi tidak ramah. Lihatlah bagaimana orang mencuri-curi cara agar tetap pulang kampung ketika kota tak lagi menyediakan kerja dan orang-orang kelas menengahnya mengurung diri di rumah. Mereka pulang ke desa.

Selayaknya ibu, desa adalah ibu bumi tempat kembalinya para petarung kehidupan yang harus rela meninggalkan desa untuk bekerja di ibu kota dan karena kondisi saat ini harus kembali pulang. Kembalilah ke pangkuan ibu bumi, selayaknya ibu. Desa akan menerima kehadiran kembali, apa pun adanya kita saat ini. Selayaknya ibu, desa adalah ibu bumi, tempat kembali dan berbagi.

Tema ini ingin menguatkan Indonesia dari desa. Dan tampaknya ungkapan “masa depan Indonesia adalah desa” semakin relevan. *Merdesa* berasal dari kata *desa* dalam bahasa Jawa Kuno, artinya ‘tempat hidup yang layak, sejahtera, dan patut’. Dalam pengertian ini juga tersirat makna desa, suatu kawasan yang merdeka dan berdaulat.



Dalam rumus *otak-atik gathuk*, ada persamaan antara *paradise* (surga) dengan *paradesa*, *para* (tertinggi), maka kedudukan desa diletakkan dalam *maqam*, derajat, dan martabat di puncak paling atas. Desa merupakan visi, cita-cita tertinggi, pencapaian pembangunan surga di dunia nyata, yakni ‘tempat hidup yang layak, sejahtera, dan patut’. Layak secara ekonomi, layak secara sosial budaya, layak secara politik. Itulah sejahtera. Sedangkan patut (kepatutan) memiliki dimensi yang holistik: adanya pola hidup yang bersahaja, rukun, penuh kesederhanaan, tak ada individualisme karena sistem kehidupan dilandasi oleh pertimbangan kebersamaan, *komunalitas*, berjemaah, tidak mudah mengumbar keserakahan dan eksploitasi, tak ada yang dominan pada kepentingan diri pribadi karena orang yang mementingkan diri pribadi justru diyakini sedang membangun neraka dan dianggap durhaka, *dur-angkara*. Semua ada takarannya. Gandhi pun pernah berkata: “Bumi ini cukup untuk kesejahteraan seluruh umat manusia, tetapi tidak cukup untuk keserakahan satu manusia.”<sup>4</sup>

Karenanya, upaya menuju kemandirian desa menjadi bagian penting dari Kongres Kebudayaan Desa. Terwujudnya kedaulatan politik dan pemerintahan desa, kedaulatan perekonomian desa, kedaulatan data desa, adalah syarat desa sebagai “*paradise*”. Tata kelola pemerintahan dan warga desa dalam tatanan baru Indonesia dengan sendirinya harus memastikan tata kelola pemerintahan dan

---

4. Raharjo, T. 2013. “Menyambut Buku Indonesia Bagian dari Saya”. <https://www.caknun.com/2013/menyambut-buku-indonesia-bagian-dari-desa-saya/>.



kehidupan sosial warga yang bersih dan antikorupsi, sejahtera lahir dan batin, pendidikan yang merdeka, dan seterusnya.

Penekanan kongres ini selain mengkaji tata kelola pemerintahan dan aspek-aspek kehidupan warga desa juga mengarusutamakan isu-isu antikorupsi. Membangun pemerintahan yang bersih dan politik yang bermartabat sangat mungkin didorong dari ruang negara yang lebih kecil, yaitu desa. Dan desa jauh lebih memungkinkan untuk menerapkan praktik tata kelola dan implementasi negara yang bebas dari korupsi.

Langkah yang lebih jauh, kongres ini berupaya memberikan tawaran alternatif untuk membangun kembali tatanan yang lebih setara, lebih adil, bermartabat, dan antikorupsi, serta model kehidupan yang lebih harmonis antara manusia dan alam. Tawaran alternatif tentang “*new normal*” akan mengisi ruang-ruang kosong tentang reproduksi pengetahuan dari berbagai aspek kehidupan masyarakat yang selama ini seolah direduksi hanya pada tataran tata cara teknis kehidupan (cuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak). Tawaran ini juga menyediakan seperangkat panduan untuk penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa yang bisa diadopsi oleh sebanyak mungkin desa di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah desa-desa adat beserta masyarakat adat di seluruh nusantara.

## Kongres Kebudayaan Desa dalam Angka

Dua setengah bulan persiapan dan pelaksanaan Kongres Kebudayaan Desa (Juni-Agustus), memberikan gambaran-gambaran angka partisipasi berbagai *stakeholder* dalam KKD. Pertama, riset kondisi dan imajinasi masyarakat desa tentang arah tatanan Indonesia baru dari desa. Riset ini merespons pandemi dan harapan warga desa. Sebanyak 1.231 responden telah terlibat dan memberikan pandangannya. Rentang responden bergerak dari berbagai provinsi dari Aceh hingga Papua. Pengambilan data yang menggunakan Google Form cukup mampu menjangkau jumlah responden, warga, dan pemangku pemerintahan desa. Dilihat dari komposisi gender, responden cukup seimbang.

Kedua, *call for papers* Kongres Kebudayaan Desa. Menyadari bahwa tidak semua gagasan dan keterwakilan bisa diringkus dalam 20 seri webinar, KKD membuka seluas-luasnya ruang bagi masyarakat desa, akademisi, peneliti, warga desa, birokrat, aktivis sosial, mahasiswa, dan siapa pun yang memiliki ikatan serta pemikiran tentang desa untuk *urun rembuk* tentang tatanan Indonesia baru. Sebanyak 57 naskah masuk melalui *call for papers* KKD. Jumlah tersebut tentu saja diseleksi secara ketat untuk bisa masuk dalam buku yang diterbitkan sebagai bagian dari *output* KKD. Hasilnya, sebanyak 31 naskah lolos kurasi dan berhak masuk dalam buku yang diterbitkan.

Ketiga, seri webinar KKD yang dilaksanakan dalam rentang 10 hari berturut-turut (1-10 Juli 2020), 100 jam webinar dengan 20

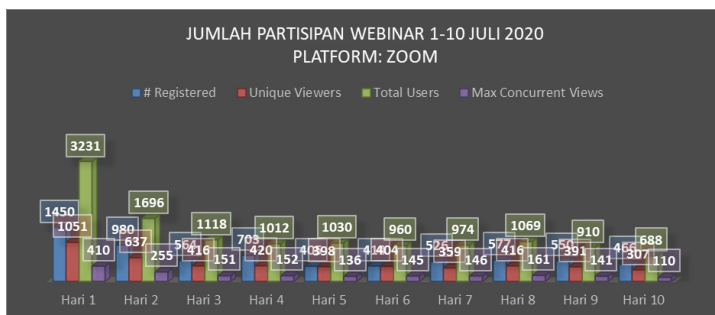


tema dan 20 *term of reference*, melibatkan 20 moderator di berbagai tempat di Indonesia serta 100 narasumber dari berbagai perspektif keilmuan dan keahlian.

Dua puluh tema webinar tersebut adalah: Seri 1. Arah Tatanan Baru Indonesia: “New Normal” Apa dan Bagaimana Hidup di Era Pandemi dan Sesudahnya; Seri 2. Ekonomi Berkeadilan: Perekonomian Desa dalam Tatanan Indonesia Baru; Seri 3. Pendidikan yang Membebaskan: Membalik Paradigma Pendidikan Urban; Seri 4. Kesehatan Semesta: Menghadirkan Kembali Kesehatan yang Setara untuk Semua dari Desa; Seri 5. Keamanan dan Ketertiban: Menghadirkan Rasa Aman dan Pelindungan dalam Tatanan Indonesia Baru; Seri 6. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Perempuan untuk Masa Depan Desa dan Arah Tatanan Indonesia Baru yang Inklusif; Seri 7. Kedaulatan Pangan dan Lingkungan Hidup: Merdeka Sandang, Pangan, dan Papan dari Desa untuk Tatanan Indonesia Baru; Seri 8. Pemuda Desa: Merekonstruksi Ulang Formasi Strategis Pemuda Desa di dalam Tatanan Indonesia Baru; Seri 9. Agama: Dari Ritus ke Substansi (Transformasi Peran Agama dalam Mengawal Tatanan Nilai Indonesia Baru); Seri 10. Kebudayaan: Mengonstruksi Ulang Alam Pikiran Nusantara sebagai Basis Peradaban dan Tata Nilai Indonesia Baru; Seri 11. Tata Ruang Desa dan Infrastruktur Lingkungan Pemukiman: Menegosiasikan Ulang Peta Ruang dan Lingkungan Pemukiman Desa; Seri 12. Reformasi Birokrasi: Merumuskan Tata Birokrasi Desa yang *Compatible* untuk Tatanan Indonesia Baru;



Seri 13. Hukum dan Politik Desa: Membangun Habitus Politik dan Regulasi yang Memuliakan Martabat Manusia dalam Tatanan Indonesia Baru; Seri 14. Prinsip Antikorupsi, Akuntabilitas, dan Transparansi: Membangun Sistem dan Habitus Antikorupsi dari Desa untuk Tatanan Indonesia Baru; Seri 15. Datakrasi: Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Desa Berbasis Data Menuju Tatanan Indonesia Baru; Seri 16. Keluarga: Reformulasi Peran Strategis Keluarga dalam Pemuliaan Martabat Manusia untuk Tatanan Indonesia Baru; Seri 17. Kewarganegaraan: Merumuskan Pola Relasi Baru Warga Desa dan Negara untuk Tatanan Indonesia Baru; Seri 18. Komunikasi, Media, dan *Influencer*: Merumuskan Kebijakan Komunikasi Publik dalam Tata Pemerintahan Desa Menuju Indonesia Baru; Seri Khusus Inklusi Sosial: Mewujudkan Masyarakat Inklusif dalam Tatanan Indonesia Baru; Seri Khusus Revitalisasi Desa: Merajut Desa Membangun sebagai Bagian Gerakan Global.

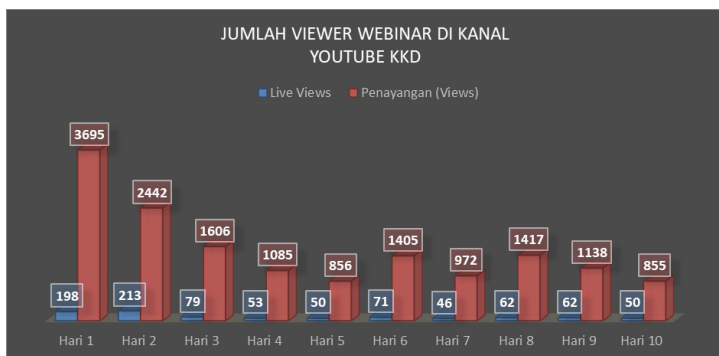


Tabel 1 Jumlah Peserta Webinar Melalui Aplikasi Zoom



Dari sisi partisipan seri webinar KKD menunjukkan angka partisipasi yang cukup besar. Dilihat dari data yang ditarik langsung dari aplikasi Zoom dan merupakan gambaran partisipasi webinar dalam satu hari, tabel berikut menggambarkan jumlah partisipasi webinar melalui kanal Zoom.

Selain melalui kanal Zoom, peserta juga bisa mengikuti keseluruhan seri webinar melalui kanal YouTube Kongres Kebudayaan Desa, baik secara *live* atau tayang ulang. Sampai tanggal 18 Juli 2020, berikut data penayangan video webinar Kongres Kebudayaan Desa:

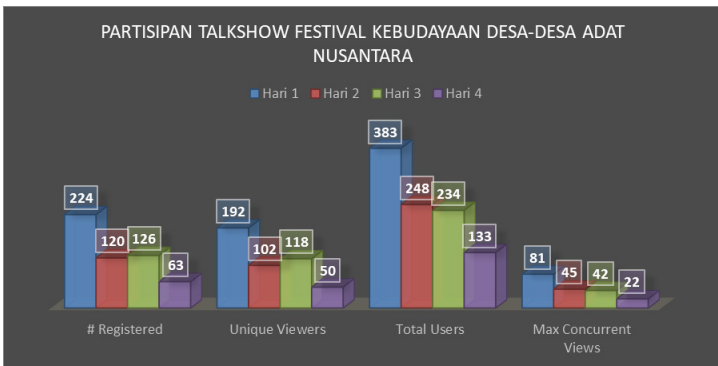


Tabel 2 Jumlah Peserta Webinar KKD Melalui YouTube

Selain ditayangkan melalui kanal resmi Kongres Kebudayaan Desa, serial webinar juga ditayangkan melalui kanal YouTube suara.com, *live* Facebook kata desa, bumdes.tv, Gatra.tv, kanal YouTube wiradesa dengan perkiraan *audience* lebih dari 10 ribu.

Keempat, Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara. Festival ini membicarakan secara khusus gagasan dan pemikiran tentang

arah tatanan Indonesia baru dari perspektif desa-masyarakat adat di Indonesia. Ada 13 desa-masyarakat adat yang ambil bagian dalam seri *talkshow* Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara, yaitu: Desa Adat Boti, NTT; Desa Adat Papua; Desa Adat Sigi, Sulawesi Tengah; Desa Adat Baduy, Banten; Desa Adat Aceh; Desa Adat Minang; Desa Adat Melayu; Desa Adat Batak; Desa Adat Tidore; Desa Adat Dayak; Desa Adat Bajo; dan Desa Adat Sasak. Desa adat menyampaikan gagasan, pemikiran, serta praktik-praktik hidup dan penghidupan dalam konteks sehari-hari, misalnya tentang bagaimana membangun desanya masing-masing untuk memberi perspektif yang lebih besar bagi tatanan Indonesia baru. Ada 34 narasumber yang berasal dari 13 desa-masyarakat adat di Indonesia dan 8 moderator serta 8 video yang diproduksi untuk tiap-tiap *talkshow*.

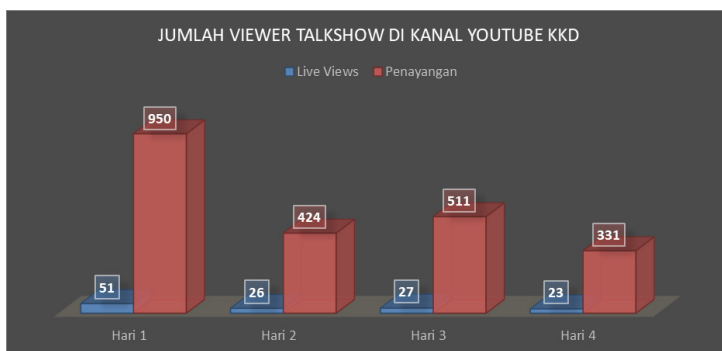


Tabel 3 Peserta *Talkshow* Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara (13-16 Juli 2020) via Zoom

Sama halnya dengan serial webinar Kongres Kebudayaan Desa, *talkshow* Festival Kebudayaan Desa juga ditayangkan langsung



melalui kanal YouTube resmi Kongres Kebudayaan Desa selama *talkshow* berlangsung. Selain itu, video *talkshow* juga diunggah ke kanal YouTube tersebut untuk memfasilitasi peserta yang tidak dapat mengikuti *talkshow* secara langsung. Berikut gambaran dari penayangan video *talkshow* Festival Kebudayaan Desa di kanal YouTube Kongres Kebudayaan Desa sampai tanggal 18 Juli 2020.



Tabel 4 Peserta *Talkshow* Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara (13-16 Juli 2020) via YouTube

Kelima, penerbitan buku. Rangkaian KKD ini menghasilkan 21 buku, terdiri dari 19 buku dari seri webinar, 1 buku bunga rampai strategi pemajuan kebudayaan nusantara, dan 1 buku putih (berisi hasil riset KKD dan panduan penyusunan RPJMDesa). Desain buku ini menggambarkan keseluruhan hasil-hasil Kongres Kebudayaan Desa. Sampul tiap-tiap buku adalah bagian dari peta Indonesia mulai Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, yang menggambarkan kekayaan endemik satwa dan tetumbuhannya. Salah satunya seperti yang tengah Anda baca sekarang ini.

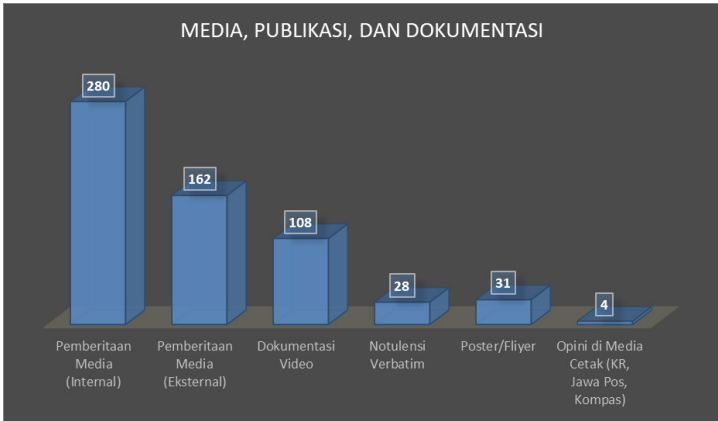
Keenam, buku putih Arah Tataan Indonesia Baru dari Desa: Panduan Penyusunan RPJMDesa. Buku ini secara khusus merangkai hasil-hasil Kongres Kebudayaan Desa dan rekomendasi-rekomendasi yang selama pelaksanaan kongres terekam dengan baik. Selain itu buku ini juga merumuskan gagasan dan rekomendasi yang dihasilkan dari pembacaan atas diskusi/tanya jawab selama webinar, *call for papers*, maupun hasil riset.

Ketujuh, publikasi dan media. Ada 280 berita yang diproduksi oleh tim media KKD di laman [www.kongreskebudayaandesas.id](http://www.kongreskebudayaandesas.id); 162 berita yang tayang di media nasional, baik *online* maupun cetak; 108 video dokumentasi yang diproduksi dan terunggah di kanal YouTube Kongres Kebudayaan Desa; 35 poster untuk tiap-tiap agenda kongres; dan ada 4 opini yang dimuat di koran *Kedaulatan Rakyat*, *Jawa Pos*, dan *Kompas*. Keseluruhan agenda webinar kongres dan *talkshow* festival juga didokumentasikan dalam *notulensi* verbatim sejumlah dua puluh delapan. Dan sebanyak 35 poster publikasi mengantarai semua agenda kongres.

Seluruh aktivitas pemberitaan dimulai dari 22 Juni hingga 27 Juli (ketika naskah ini dituliskan), artinya rerata dalam 1 hari ada sedikitnya 12 berita, baik yang diproduksi oleh tim internal KKD maupun media-media nasional, baik cetak maupun *online*.

Hampir keseluruhan rangkaian Kongres Kebudayaan Desa menggunakan platform *online*. Karena itu kanal-kanal informasi juga berbasis *online*. KKD menggunakan *landing page* utama web, diseminasi juga didesain menggunakan media sosial. Berikut jumlah



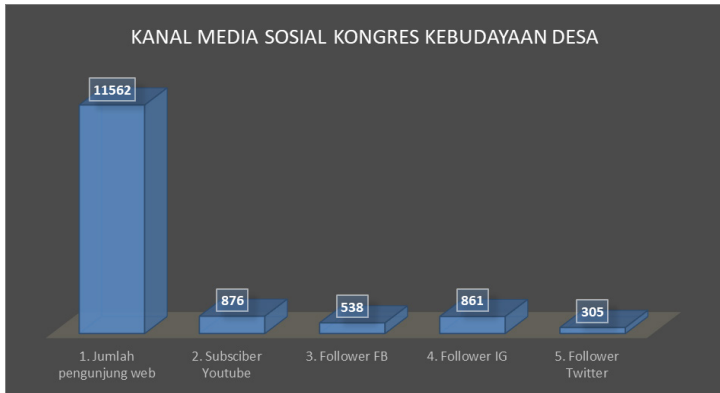


Tabel 5 Jumlah Pemberitaan, Publikasi, dan Dokumentasi KKD

jangkauan dari web utama dan media sosial yang digunakan selama pelaksanaan kongres. Catatan ini diambil tepat ketika epilog ini ditulis.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah pengunjung [www.kongreskebudayaandesa.id](http://www.kongreskebudayaandesa.id) sejumlah 11.562 kunjungan, jumlah *subscriber* kanal YouTube 876, *follower* FB 538, *follower* IG 861, dan *follower* Twitter sebanyak 305. Angka itu dibukukan sejak 20 Juni 2020.

Kedelapan, dua kali “syukuran”. Di sela-sela pelaksanaan rangkaian kongres, penyelenggara menggelar dua *event offline*, yaitu Andrawina Budaya dan Suluk Kebudayaan. Andrawina Budaya dihadiri oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi beserta sekjen; Kiai Jadul Maula; serta berbagai jaringan pendukung kongres. Kedua, Suluk Kebudayaan yang digelar untuk memungkas agenda Festival Desa-Desa Nusantara dan



Tabel 6 Gambaran Jangkauan Melalui Kanal Media Sosial KKD

menghadirkan budayawan Wani Dharmawan, Irfan Afifi, Nanang Garuda, dan lain-lain. Seluruh pelaksanaan agenda *offline* ini tetap menjalankan protokol kesehatan.

Kesembilan, jaringan kerja dan kepanitiaan. Kerja-kerja Kongres Kebudayaan Desa ini melibatkan 90 orang panitia penyelenggara yang terbagi dalam bagian-bagian kerja, mulai dari *steering committee*, tim LO, tim IT, tim festival, tim riset, tim *call for papers*, tim media, tim dokumentasi, tim buku, tim acara, tim perumus, tim administrasi dan keuangan, tim desain visual, tim medsos, tim konsumsi, tim *runner*, dan lain-lain. Selain itu pelaksanaan kongres juga didukung oleh 51 jaringan dan lembaga, dengan pendukung utama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan GIZ. Secara umum kolaborasi



dari berbagai *stakeholder* ini dirumuskan ABCGFM: akademisi, birokrasi, *community*, *government*, *finance*, dan media.

Kesepuluh, deklarasi arah tatanan Indonesia baru dari desa. Agenda deklarasi dibacakan Presiden Joko Widodo dua hari menjelang peringatan hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan melibatkan para kepala desa dan seluruh rakyat Indonesia.

## Mengintip Hasil Kongres

Hingga epilog ini ditulis, tim perumus hasil-hasil kongres masih bekerja. Tim mencermati seluruh proses webinar, *notulensi*, makalah narasumber, naskah-naskah *call for papers*, hasil penelitian, hingga melihat ulang tayangan yang tersimpan di YouTube KKD. Semua itu akan menjadi bagian dari buku putih arah tatanan Indonesia baru dari desa yang disusun dalam panduan penyusunan RPJMDesa. Buku ini terdiri dari analisis kebijakan terkait desa, *review* RPJMN, *problematika*, dan isu-isu strategis kemandirian desa; visi Indonesia baru, asas, arah kebijakan, tujuan dan sasaran, serta indikator-indikator arah tatanan Indonesia baru dari desa.

Dari sekian banyak rekomendasi yang dihasilkan dari Kongres Kebudayaan Desa, klaster utama rekomendasi adalah mewujudkan kemandirian desa melalui tiga pilar: *pertama*, kedaulatan politik dan pemerintahan desa; *kedua*, kedaulatan perekonomian desa; *ketiga*, kedaulatan data desa. Tiga pilar kemandirian desa inilah yang akan diintrodusir untuk bersama-sama membangun gerakan kemandirian

desa. Jika 75 ribu desa bergerak untuk membangun kemandiriannya maka gelombang ini akan dengan sendirinya mampu memperbaiki kondisi negara. Masa depan Indonesia adalah desa. Detail hasil-hasil kongres bisa Anda simak di buku *Arah Tatanan Indonesia Baru dari Desa* (Panduan Penyusunan RPJMDesa).

\*\*\*

Pada bagian akhir epilog panjang ini, kami hendak *menghaturkan* terima kasih *kagem* Bapak Dr. (H.C). Drs. H Abdul Halim Iskandar, M.Pd., Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi beserta jajaran Kemendesa yang telah memberikan dukungan penuh terhadap Kongres Kebudayaan Desa. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Sujanarko, Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi (PJ KAKI) KPK, untuk dukungan yang luar biasa. Rasa terima kasih kami sampaikan pula kepada Bapak Dr. Hilmar Farid, Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kemendikbud. Terima kasih pula kami sampaikan kepada Mbak Meta Yanti mewakili GIZ untuk semua diskusi dan dukungannya. Juga kepada segenap jaringan kerja Kongres Kebudayaan Desa dengan segenap dukungan dan bentuknya. *Matur nuwun*.

Ucapan terima kasih sungguh-sungguh pula kami sampaikan kepada seluruh moderator, narasumber, dan tentu saja sobat Kongres Kebudayaan Desa yang selama pelaksanaan kongres terus terlibat



secara aktif, baik sebagai responden riset, *call for papers*, maupun sobat kongres yang mengikuti webinar dan *talkshow* festival.

Rasa bangga disertai ucapan syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Bapak Wahyudi Anggoro Hadi, inisiator Kongres Kebudayaan Desa, Lurah Desa Panggungharjo, beserta jajaran pemerintah desa yang terus *ngesuhi* dan *ngemong* seluruh tim penyelenggara. Dan tentu saja kepada seluruh panitia penyelenggara Kongres Kebudayaan Desa yang telah bekerja keras dan bekerja cerdas untuk bersama-sama menyelenggarakan KKD serta mengemas gagasan arah tatanan Indonesia baru dari desa. Sungguh sebuah kerja yang menyejarah. Untuk itu *matur nuwun*, terima kasih.

Akhirnya, semoga Kongres Kebudayaan Desa yang pertama kali diselenggarakan di Indonesia ini memberi sumbangan yang besar kepada sebanyak mungkin desa juga kepada Indonesia. Sekali lagi kami sampaikan *sakalangkong, matur nuwun, hatur nuhun, matur suksme, amanai, muliate, tampiaseh, tarimo kasi, kurusumanga'épanngawang*, terima kasih. Salam budaya desa. Panjang umur perjuangan![]

Senin, 28 Juli 2020

Desa Panggungharjo, Bantul, Yogyakarta





# Deklarasi

## ARAH TATANAN INDONESIA BARU DARI DESA

**M**engingat kekuatan tatanan kehidupan masyarakat desa merupakan hasil pergulatan nenek moyang dalam menggeluti pengalaman kosmologis, *epistemologis*, dan ontologis sehingga filosofi desa adalah filosofi yang mewujud dalam budi pekerti, perilaku, dan tindakan; serta mempertimbangkan situasi pandemi Covid-19 maka kekuatan desa harus dijadikan modal sosial, budaya, ekonomi, dan politik bagi arah tatanan baru masyarakat.

Pandemi membuat manusia harus terus berjuang mencari ruang kehidupan yang lebih baik. Dan perjuangan itu telah dimulai melalui Kongres Kebudayaan Desa yang mengajak desa-desa Indonesia bergerak dan bangkit dengan kesadaran *kebhinekaan* dalam merumuskan tatanan baru bangsa Indonesia. Bahwa desa-desa yang membentuk ke-Indonesia-an harus membangun tatanan yang lebih bermartabat, lebih berkeadilan, dan lebih *berkesetaraan*.

Bahwa tatanan itu lahir dari kekayaan sejarah panjang pengetahuan nusantara dan cara pandang jauh ke depan dengan kesadaran bahwa puncak dari relasi sosial adalah gotong royong, puncak dari relasi politik adalah musyawarah, dan puncak dari relasi ekonomi adalah kerja sama. Bahwa semua itu bersumber dari kekayaan kebudayaan desa dari Aceh hingga Papua.

Atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Mahakuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur maka desa menyatakan cita-cita tatanan Indonesia baru dari desa adalah terselenggaranya politik pemerintah desa yang jujur, terbuka, dan bertanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat yang partisipatif, emansipatif, tenggang rasa, berdaya tahan, mandiri, serta memuliakan kelestarian semesta ciptaan melalui pendayagunaan datakrasi yang ditopang oleh cara kerja pengetahuan dan pengamalan lintas ilmu bagi terwujudnya distribusi sumber daya yang setara untuk kesejahteraan warga.

Bahwa perwujudan tatanan Indonesia baru dari desa tersebut ditempuh dengan cara menjadikan desa sebagai arena demokratisasi politik lokal sebagai wujud kedaulatan politik, menjadikan desa

sebagai arena demokratisasi ekonomi lokal sebagai wujud kedaulatan ekonomi dan *pemberkuasaan* desa melalui aktualisasi pengetahuan warga sebagai wujud kedaulatan data.

Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan kemandirian dan inovasi desa yang mampu mengelola kewenangan dan hak atas asal-usulnya, yang mampu memberikan *pemberkuasaan* pada warga desa. Kita berdoa memohon rahmat, hidayah, kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, menyongsong Tatanan Indonesia Baru dari Desa.

Salam budaya desa. Panjang Umur Perjuangan.[]

Yogyakarta 15 Agustus 2020



## KERABAT KERJA KONGRES KEBUDAYAAN DESA 2020

### Dewan Pengarah

1. Wahyudi Anggoro Hadi (Ketua)
2. Rumakso Setyadi
3. FX Rudy Gunawan
4. Andreas Budi Widyanta
5. Eko Pambudi
6. Ilham Yuli Isdiyanto
7. Achmad Musyaddad
8. Ryan Sugiarto

### PANITIA KONGRES KEBUDAYAAN DESA

#### Ketua: Ryan Sugiarto

#### A. Strategis Business Unit: Sholahuddin Nur'azmy

##### Administrasi dan Keuangan

1. Ahmad Arief Rohman  
(Koordinator)
2. Any Sundari
3. Rindy Widya Rasmono
4. Cintya Raffa Fathiya

##### Tim Media

1. Edy SR (Koordinator)
2. Ahmad Za'im Yunus
3. Ashilly Achidsti
4. Elyvia Inayah
5. Endah Sulistyorini
6. Gunawan Wibisono
7. Lutfi Retno Wahyudyanti
8. Vitus Kevinda Bramantya Viastra

##### Tim Humas

1. Muhammad Zidny Kafa  
(Koordinator)
2. Aina Ulfah
3. Lina Listia

4. Nava Anggita Ardiana
5. Yesseta Novi Sukma

##### Tim Dokumentasi

1. Akhmad Nasir (Koordinator)
2. Amirul Mukmin
3. Annisa Suryantari
4. Ari Aji Heru Suyono
5. Khoirul Azmi
6. Shavira L. Phinahayu
7. Syaiful Choirudin
8. Veronika Yasinta
9. Windi Meilita W.

##### Tim IT

1. Muhammad Hanif Rifai  
(Koordinator)
2. Ahmad Mizdad Hudani
3. R. Nurul Fitriana Putri
4. Adam Hanafi Syafrudin
5. Damar Saksomo Jati



## **B. Program: Aditya Mahendra Putra**

### **Tim Webinar**

1. Ambar Sari Dewi (Koordinator)
2. Angga Kurniawan
3. Emira Salma
4. Farhan Al Faried
5. Johan Visky Catur Aga
6. Okky Yayan Putra Armanda
7. Robi Setiyawan
8. Ruliyanto
9. Satrio Yoga Rachmanto
10. Tommy Destryanto
11. Toni Fajar Ristanto
12. Tri Muryani
13. Yusan Aprilianda

### **Tim Festival**

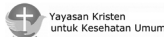
1. Eko Nuryono (Koordinator)
2. Gundhi Aditya
3. Hardiansyah Ay
4. Linggar Ajikencono
5. Mona Kriesdinar
6. Nanang Garuda
7. Nandar Hutadima Idamsik
8. Nurohmad
9. Raliyanto Bw
10. Saptaji Prasetyo
11. Siska Aprisia
12. Very Hardian Kirnanda
13. Warsono

### **Tim Buku dan Call Of Papers**

1. Faiz Ahsoul (Koordinator)
2. Ageng Indra Sumarah
3. Agus Teriyana
4. Ahmad Yasin
5. Amanatia Junda Solikhah
6. Asy Syaffa Nada Amatullah
7. Berryl Ilham
8. Chusna Rizqati
9. Citra Maudy Mahanani
10. Rheisnayucyntara
11. Dadang Ari Murtono
12. Diah Rizki Fitriani
13. Dwi Cipta
14. Dyah Permatasari
15. Fawaz
16. Fitriana Hadi
17. Fiqih Rahmawati
18. Gregorius Ragil Wibawanto
19. Irfan Afifi
20. Iswan Heriadjie
21. Ketjilbergerak
22. Kusharditya Albihafifzal
23. Prima Hidayah
24. Rio Anggoro Pangestu
25. Rofi Ali Majid
26. Suhairi Ahmad
27. Yona Primadesi



# JARINGAN KERJA KONGRES KEBUDAYAAN DESA 2020





**KPK**  
Komisi Pemberantasan Korupsi



KEMENTERIAN  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

